

PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI  
TERHADAP KEBIJAKSANAAN DESENTRALISASI  
DI REPUBLIK RAKYAT CINA

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Asal	Hadiah	Klass 330.951 HAK 70 e.1
	<del>Pembelian</del>	
Terima	Tgl, 25 FEB 2003	
Oleh	No. Induk	

Lukman Hakim

960910101092

Pembimbing

Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS.

NIP. 131 843 511

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

2002



Lembar Pernyataan

Saya menyatakan  
bahwa skripsi ini adalah  
hasil karya asli saya  
dan semua bahan yang digunakan  
berasal dari sumber yang sah dan diketahui

Lukman Hakim  
[Nim: 96 0910101092]



PENGESAHAN

Diterima oleh dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi  
guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu (S-1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional

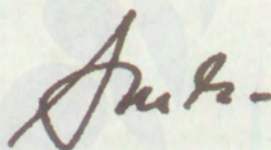
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Mei 2002  
Pukul : 08.00 WIB

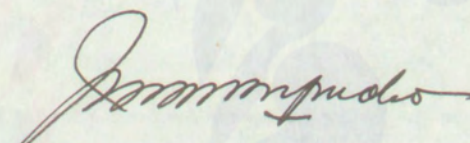
Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



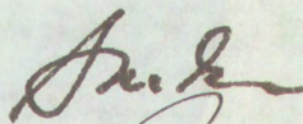
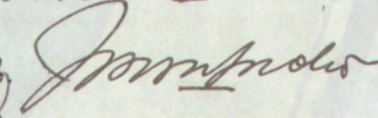
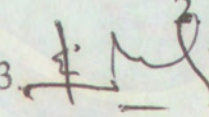
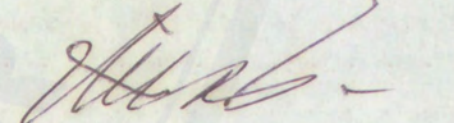
Drs. Sjoekron Sjah, SU



Drs. Sunardi P, MIS

Susunan Anggota Panitia Penguji:

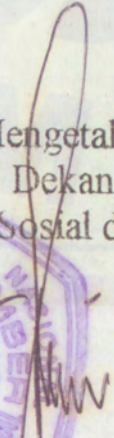
1. Drs. Sjoekron Sjah, SU
2. Drs. Sunardi P, MIS
3. Drs. A. Eby Hara, MA. PhD
4. Drs. Umaid Radi, MA

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui  
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
Drs. H. Moch. Toerki

NIP. 130 524 832



## Lembar Persembahan

Sesuatu yang tertunda....

Halaman ini penulis dedikasikan sebagai ungkapan atas tertundanya penyelesaian skripsi ini yang kupersembahkan kepada :

Ibu dan Bapak

Yang memberikan segenap kasih sayang, pengorbanan dan doa-doanya.

Eyang Putri,

Yang mengajarkan kesabaran, ketabahan dan keteguhan.

May, Roro, Rahmi, Azis, dan Aprilia,

Yang memberikan dorongan dan inspirasi kebahagiaan

Aristi Kurnia Davi

Terima kasih atas suntingan naskah dan dukungannya hari demi hari.

Serta atas segala keceriaan yang dilimpahkan dalam hidup penulis.



Free Trade Is Like A Bicycle.  
You Have To Keep Moving Forward,  
Or You Lose Your Balance  
A n d F a l l O v e r .

G. Pierre Good

[ Koresponden Ekonomi Majalah Far Eastern Economy Review] \*

I wish we could slow the globalization train  
down, but there is no one at the control<sup>⊗</sup>.

Thomas L. Friedman

---

\* Far Eastern Economy Review, November 25, 1999

⊗ Thomas L. Friedman, The Lexus and The Olive Tree, Harper Collins Publishers, London, 2000



## KATA PENGANTAR

Segenap puji bagi pemilik rohku -Allah SWT. Salam sejahtera semoga dicurahkan kepada rasul yang telah dipilih-Nya juga kepada penutup mereka, Muhammad SAW, para sahabatnya sebagai pemimpin penyebar hidayah dan kepada mereka yang mengikuti jejak dan petunjuknya.

Globalisasi dewasa ini merupakan istilah yang paling populer dan sangat gencar ditelinga kita. Globalisasi yang diambil dari kata **Global**, yang bermakna *universal*, merupakan universalisme atas nilai-nilai kapitalisme dalam peradaban manusia di dunia. Ungkapan yang demikian ini mengandung makna adanya integrasi dan penundukan perekonomian lokal kedalam perekonomian dunia, dengan cara memaksakan penerapan perekonomian dunia. Globalisasi bukanlah sekedar slogan ekonomi kapitalis dan bukan pula salah satu fenomena dalam ideologi kapitalisme yang beraneka ragam. Globalisasi adalah sebuah pemikiran ideologi kapitalisme yang komprehensif atas segenap aspek kehidupan, kendatipun yang menonjol adalah aspek ekonomi. Globalisasi merupakan serangan kapitalis yang melanda seluruh pelosok dunia dengan *ganas* dan *mematikan* melalui kekuatan modal. Kesemuanya itu mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Dengan demikian pasar dan perekonomian dunia itu tentunya bukanlah perekonomian yang tertutup atau terproteksi, melainkan perekonomian terbuka, atau apa yang disebut dengan pasar terbuka terhadap segala kekuatan ekonomi.

Robert O. Keohane, Joseph S. Nye Jr., Samuel P. Huntington, Helen P. Milner, dan Richard Falk adalah beberapa ahli yang meyakini bahwa batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa akan semakin berkurang relevansinya akibat globalisasi. Negara-negara sering kali disusupi atau dilompati oleh aktor-aktor lain, baik sama-sama negara-bangsa maupun non negara. Bagi beberapa aktor bahkan



batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan lagi. Atas dasar itu dalam menyikapi globalisasi ini maka hendaknya kita dapat mengambil apa yang baik bagi kita dan membuang yang buruk dari dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Sebagai karya akademik, penulis terikat dalam mematuhi seperangkat disiplin dan metodologi ilmu pengetahuan. Oleh karenanya studi ini dikaji dengan menggunakan seperangkat teoritisasi dan pembuktian secara empiris, mengingat parameter umum menuntut studi ini dibuktikan dalam wujud validitas logika dan verifikasi empiris guna memperoleh kebenaran ilmu. Namun kebenaran ilmu pengetahuan bukanlah mutlak adanya sejalan dengan dinamika keilmuan dan fenomena-fenomena yang muncul. Dengan demikian skripsi ini, tidak pula proses akhir dari perjalanan penulis dalam belajar.

Pemilihan pemikiran atau ide-ide mengenai tatanan ekonomi politik dalam konteks globalisasi dan pengaruhnya terhadap proses politik domestik sebagai obyek materi dalam penulisan ini bukanlah dimaksudkan untuk melawan kecenderungan *mainstream* dari sebagian besar mahasiswa Hubungan Internasional, yang memilih isu-isu *militarisme*, *seccurity*, demokratisasi maupun proses politik praktis sebagai kajian utama. Alasan yang bersifat teoritis dan aktual menjadi landasan penulisan ini. Semenjak Koehane mulai mengembangkan bidang ekonomi politik internasional sebagai terobosan baru, dimana studi hubungan internasional selama ini didominasi oleh *security studies* yang menomorduakan tujuan-tujuan ekonomi dan pengaruh-pengaruh kebijakan dengan lebih mengutamakan tujuan-tujuan dan pengaruh militer.

Menyadari akan celah-celah kekurangan dalam studi ini yang patut dibenahi guna mendapatkan konstruksi bangunan yang memenuhi kelayakan ilmu pengetahuan, penulis membuka ruang dialog guna mengundang datangnya kritik dan saran yang konstruktif dan dipertanggung jawabkan. Komitmen yang demikian ini, semakin terasa manakala dihubungkan dengan keketatan perangkat metodologis, saat berkecimpung dalam *scientific enterprise* dan *intellectual exercise*. Dimasa berikutnya, kearifan inilah secara filsafat cenderung membayangi kajian ini



Sebagaimana karya tulis lainnya, skripsi ini tidak ditulis dalam ruang kosong. Skripsi ini bisa terselesaikan karena orang-orang di sekeliling penulis yang bersedia menanggung beban dan memberikan bantuan dengan *cara dan jalan sendiri-sendiri*, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Sunardi Prawiroatmoko, MIS. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Syoekron Sjah, S.U Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember dan juga selaku Dosen Wali penulis, atas segala bantuan dan petunjuk yang diberikan selama penulis menuntut ilmu disana.
3. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, atas segala bantuan, bimbingan, pelayanan dan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi disana. (Mr. Agus Try, *thanks a lot, your advice has opened my mind*)
4. DR. Susan L. Shirk, Phd. *Thank's for your opinion, critique, and your maill.*
5. Ozzy, CT, Yudi, Cobain, Farid, Jack "O", Pol Pot, Febbry, Zam Zam, Onny, Didik, Hurry, eRse, [K:], Dwi', Joseph, Benny, Wenny, Dian, dan Saint yang telah membantu dengan cara mereka sendiri-sendiri (*keep in touch, dude*)
6. Keluarga Besar Drs. Kailimi Siradj di Condet, yang memberikan bantuan selama penulis melakukan riset di Jakarta. Teman-teman baru di Depok, Aweng, Zen zen, Ekky, Saysay (terima kasih telah menemani saya untuk riset)
7. Staf Perpustakaan CSIS, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Jakarta, atas segala bantuan teknis dan data yang diperlukan oleh penulis.
8. Mas Rexly, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang selama ini telah diberikan pada penulis,



9. Me (my wild butterfly), yang telah mencurahkan segalanya untuk menjadikan penulis lebih baik. Hidup tak selamanya indah dan tetaplah menjadi bintang di langit. *Nothing compare with you*, terima kasih atas segalanya di masa lalu.
10. Ikatan Mahasiswa Genteng (se-Jawa Bali, yang membantu diawal penulisan ini sebagai tempat bernaung dan bercengkrama), Himpunan Mahasiswa Islam (atas segala bantuan diskusi yang menggodok penulis), Kelompok Studi Veritas, Mastrip Community, Kawan HI-96, - Marwan, Krisna, Hexa, Arif, Irman, Kimpul, Rizal, Allib, Asna, Sigit, Vivin, Elly, Nana, Estu, Feni, Lian, Novi, dan kawan HI yang lain, Joko&Maharini (*keep your love forever, budd*), Dewi Moonrogue, Nunuk, Novi, Rina (*tg a bunch for remind me and give me another vision*), E', Aini, Rhein (*sorry, I'm not as like as you wanna to be*), anak-anak USEF (*keep fight on, yeach*). Im@ge computer (Imong, Yoes, Tamtam, Moel & Vivi) thank's for your help.
11. Padi, Dewa, Sheila on 7, yang memberikan inspirasi untuk tetap bertahan dalam menggapai asa. Green Master Malang, [Anshori@Prasasti](mailto:Anshori@Prasasti) Music Organizer (*for great time being with you all, fellas*), Francis Fukuyama, Stephen Hawkings, Alfred Toffler, Sir Arthur Conan Dayle, Jhon Grisham, Sydney Sheldon dan Alfred H, atas wacana berpikir untuk tetap kritis ke depan.

Semoga segala amal yang telah diberikan kepada penulis selama ini mendapat balasan dari Sang Kholiq, Allah SWT. Amien.

Jember, Maret 2002



DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pernyataan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Bagan .....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
1.3 Permasalahan.....	10
1.4 Kerangka Teori .....	11
1.5 Hipotesa .....	27
1.6 Metode Penelitian .....	29
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	30
1.6.2 Metode Analisa Data .....	31
1.7 Pendekatan .....	32
1.7.1 Pendekatan Scientific.....	32
1.7.2 Pendekatan Induksionis.....	33
1.7.3 Pendekatan Ekonomi Politik .....	34
1.7.4 Pendekatan Desentralisasi .....	37
<b>Bab II. Globalisasi dalam Sistem Ekonomi Internasional .....</b>	<b>41</b>
2.1 Globalisasi .....	41
2.1.1 Faktor-faktor yang Mendorong Globalisasi .....	44
a. Menurunnya Hambatan-hambatan dalam Perdagangan dan Investasi .....	44



b. Kemajuan Teknologi.....	47
c. Berubahnya Lingkungan Perusahaan	
Multinasional.....	48
d. Berubahnya Tata Ekonomi Internasional .....	49
2.1.2 Bukti-bukti Terjadinya Globalisasi Ekonomi .....	51
a. Meningkatnya output dan perdagangan dunia .....	52
b. Meningkatnya investasi langsung luar negeri.....	55
2.2 Republik Rakyat Cina dalam Perekonomian Global .....	60
2.3 Republik Rakyat Cina – GATT/WTO .....	70
2.3.1 Usaha-usaha Cina Menjadi Anggota WTO.....	78
2.3.2 Kepentingan Nasional Cina dalam WTO .....	85
2.3.3 Analisis Interdependensi Cina terhadap WTO .....	86
2.3.4 Keuntungan Interdependensi Cina terhadap WTO .....	88
<b>Bab III. Perubahan Politik Domestik Republik Rakyat Cina .....</b>	<b>89</b>
3.1 Sekilas Republik Rakyat Cina.....	89
3.1.1 Pemerintahan Cina .....	89
3.1.2 Landasan Ekonomi Cina .....	90
3.2 Republik Rakyat Cina Era Mao Zedong (1949-1978).....	91
3.2.1 Permulaan Reformasi dan Rekonstruksi .....	96
3.2.2 Kampanya “Anti” .....	96
3.2.3 Kolektifisasi .....	96
3.2.4 Kampanye Seratus Bunga dan Anti Golongan Kanan .....	97
3.2.5 Lompatan Besar ke Depan (Great Leap Forward).....	97
3.2.6 Perbaikan Ekonomi .....	98
3.2.7 Revolusi Kebudayaan .....	98
3.2.8 Meninggalnya Mao Zedong dan Zhu Enlai .....	99
3.3 Republik Rakyat Cina Era Deng Xiaoping (1978-1996) .....	100
3.3.1 Naiknya Deng Xiaoping ke Pucuk Kekuasaan .....	102
3.3.2 Program Empat Modernisasi.....	102
a. Industri.....	113
b. Pertanian .....	117



c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	117
d. Pertahanan .....	118
3.3.3 Peristiwa Tiananmen .....	121
3.3.4 Reformasi Ekonomi .....	127
3.3.5 Reformasi Legal System .....	132
3.3.6 Matinya Deng .....	138
3.4 Republik Rakyat Cina Era Ziang Zemin dan Jhu Rongji (1996-sekarang) .....	139
<b>Bab IV. Hubungan Globalisasi Ekonomi dengan Struktur Politik dan Ekonomi Domestik Republik Rakyat Cina.....</b>	
4.1 Transformasi Ekonomi Republik Rakyat Cina .....	144
4.1.1 Transformasi Sistem Ekonomi Republik Rakyat Cina .....	144
4.1.2 Transformasi dalam Partai Komunis Cina .....	149
4.1.3 Transformasi Legal System .....	152
a. Amandemen Konstitusi Cina.....	153
b. Pembatasan SOE's .....	154
c. Perlindungan Hak Milik Pribadi .....	154
d. Perlindungan Hak Cipta .....	155
e. Revisi Hukum Investasi .....	155
f. Liberalisasi Hukum Foreign Exchange .....	155
4.2 Restrukturisasi Lembaga Pemerintahan Republik Rakyat Cina .....	156
4.2.1 Reorganisasi dan Reshapping Pemerintahan Pusat.....	156
4.2.2 Desentralisasi Administrasi.....	158
4.3 Restrukturisasi Pemerintahan Lokal Republik Rakyat Cina .....	176
4.3.1 Fungsi Pemerintahan Lokal.....	176
4.3.2 Hubungan antara Pemerintah Lokal dan Pusat .....	178
4.4 Restrukturisasi Ekonomi Republik Rakyat Cina.....	178
4.4.1 Perluasan Ekonomi melalui Pendapatan,	



Perdagangan dan Investasi .....	180
a. Pertumbuhan Pendapatan Cina .....	181
b. Pertumbuhan Perdagangan Cina .....	183
c. Pertumbuhan Arus Investasi Cina .....	187
4.4.2 Desentralisasi Ekonomi dan Perluasan Ekonomi.....	196
a. Desentralisasi Fiskal .....	197
b. Desentralisasi Kepemilikan Badan Usaha	
• Milik Pemerintah.....	200
c. Desentralisasi Bidang Investasi dan Perdagangan	
Asing .....	201
4.4.3 Keberhasilan Desentralisasi dan Pertumbuhan	
Ekonomi .....	209
<b>Bab V. Kesimpulan .....</b>	<b>213</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	



Daftar Tabel

No.	Judul	Hal
2.1	Angka Rata-rata Tarif pada Barang Manufaktur dalam Bentuk Presentase dari Nilai	45
2.2	Perubahan Output dan Perdagangan Dunia	53
2.3	Pertumbuhan GDP Asia (persen per tahun)	54
2.4	Komposisi Nasional Perusahaan Multinasional, 1973 – 1997	56
2.5	Negara-negara Berkembang di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	61
2.6	Negara-negara Berpendapatan Rendah Kebawah	61
2.7	Proporsi Pendapatan Dunia	62
2.8	Nilai Impor dan Ekspor Cina dalam Rangka 9 Perdagangan Dunia, 1999	63
2.9	Daftar 10 Besar Dunia pendapatan Ekonomi, 1995	64
2.10	Transformasi Komoditas Ekspor Impor Cina	64
2.11	Neraca Perdagangan Amerika Serikat- Cina, Berdasarkan Daerah Ekonomi (dalam US\$ Milyar)	65
2.12	Neraca Perdagangan Amerika Serikat-Cina (dalam US\$ Milyar)	67
2.13	Selisih Angka dalam Neraca Perdagangan AS – Cina (dalam US\$ Milyar)	67
2.14	Proporsi Perdagangan Bilateral Amerika Serikat	68
2.15	Perbandingan GDP Cina dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, 1997-1999	70
2.16	Poin-Poin Utama Perjanjian Putaran Uruguay	74
2.17	Perkiraan Manfaat Pendapatan yang Diperoleh dari Adanya Putaran Uruguay – GATT, 1995 (dalam US\$ Billion)	76



4.1	Pengurangan Anggaran Belanja Cina ( % terhadap GNP)	147
4.2	Pembagian Administratif Republik Rakyat Cina	161
4.3	Pertumbuhan Rata-rata GDP Cina, 1960-1999	183
4.4	Nilai Perdagangan Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat dengan Cina, 1999 (dalam US\$ Milyar)	184
4.5	Impor Utama Cina, 1999	185
4.6	Ekspor Utama Cina, 1999	185
4.7	10 Besar Rekan Dagang Cina, 1999 (dalam US\$ Billion)	187
4.8	Perbandingan Prosentase Bentuk FDI di Cina, 1979-1994	189
4.9	FDI di Cina, 1979-1999	190
4.10	Penyebaran FDI Berdasarkan Geografis di Cina (dalam US\$ Juta)	193
4.11	Penerimaan dan Pembelanjaan Propinsi di Cina, 1983 dan 1991 (dalam Yuan Billion)	199
4.12	Nilai Ekspor dan Impor tiap Propinsi di Cina, 1994 (dalam US\$ Juta )	203
4.13	Nilai Investasi tiap Propinsi di Cina, 1986-1994 (dalam US\$ 10.000 )	208



Daftar Bagan

No.	Judul	Hal
1.1	Model Interaksi State Centric	16
1.2	Interaksi Internasional dan Politik antar Negara dalam Model Hubungan Transnasionalisme	18
1.3	Hubungan Politik dan Ekonomi dalam Model Hubungan Transnsionalisme	20
1.4	Hubungan antara Ekonomi Internasional, Institusi Domestik, dan Perubahan Politik	22
1.5	Hubungan antara Kondisi Ekonomi dengan Struktur Institusi	24
2.1	Tingkat Pertumbuhan Perdagangan dan Output Dunia, 199-1994	46
2.2	Aliran Keluar FDI, 1982-1998 (dalam US\$ Milyar)	55
2.3	Prosentase dari Total Stok FDI, 1980-1997	58
2.4	Aliran Masuk FDI Dunia, 1985-1997	59
2.5	Arus FDI ( % dari Gross Fixed Capital Formation), 1985-1996	60
4.1	Struktur Pemerintahan Cina	160
4.2	Susunan Dewan Negara, 1956	163
4.3	Struktur Pemerintahan Republik Rakyat Cina Era Mao Zedong	166
4.4	Susunan Dewan Negara, 1998	171
4.5	Periodisasi Perubahan Lembaga Pemerintahan Cina, 1949-1999	172
4.6	Struktur Lembaga Pemerintahan Republik Rakyat Cina, 1999	173
4.7	Jalur Pengambilan Keputusan Era Mao Zedong	174
4.8	Garis Perpotongan Pengambilan Keputusan pasca Mao Zedong	175
4.9	Struktur Hirarkis Administrasi di Cina, 1996	177
4.10	Bentuk-bentuk FDI di Cina	188
4.11	Hubungan Fiskal Sistem Kontrak	198



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Peta Negara Republik Rakyat Cina.
- Lampiran 2 Pidato Laporan Hasil Rencana Pembangunan Lima Tahun X Tahun 2001 oleh Presiden Ziang Zemin.
- Lampiran 3 Konstitusi Republik Rakyat Cina Tahun 1982.
- Lampiran 4 Amandemen Konstitusi Republik Rakyat Cina Tahun 1988.
- Lampiran 5 Amandemen Konstitusi Republik Rakyat Cina Tahun 1993.
- Lampiran 6 Komunika Press : Penandatanganan Persetujuan Bilateral antara Pemerintah Republik Rakyat Cina dengan Pemerintah Amerika Serikat Berkenaan dengan Penerimaan Republik Rakyat Cina dalam Keanggotaan WTO.
- Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian dari Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
- Lampiran 9 Surat Keterangan Penelitian dari CSIS





## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dinamika internasional telah melahirkan peristiwa-peristiwa empiris yang (terkadang) tidak pernah diantisipasi sebelumnya, baik oleh kalangan intelektual maupun para pengambil keputusan. Kejadian-kejadian itu semakin terasa dalam dua dekade terakhir ini. Situasi internasional yang semakin kompleks dan sukar diraba kemana arahnya akan bergerak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain akan terasa dampaknya di belahan lain dunia. Persoalan-persoalan ekonomi dan sosial-politik di negara-negara utara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap denyut nadi negara-negara di bagian selatan dunia. Kesemuanya itu tidaklah bergerak dalam skala global saja, namun juga menembus kepada permasalahan nasional dan bahkan kepada urusan lokal. Dilain pihak berakhirnya perang dingin telah membawa suasana yang baru dalam kehidupan antar negara diseluruh belahan dunia. Jika dahulu dinamika interaksi antar negara senantiasa diwarnai dengan konflik dan tarik menarik antar kepentingan politik, maka setelah masa itu terlihat pergeseran kearah yang lebih berdimensi ekonomis.

Keterkaitan ekonomi dan politik, negara dan pasar, negara dan masyarakat, dan domestik dengan internasional tidak lagi memerlukan penjelasan panjang lebar. Hal ini dapat kita perhatikan dari berbagai pemerintahan di dunia yang berusaha menyelesaikan masalah domestiknya dengan memanfaatkan hubungan internasional. Salah satu hal yang lazim digunakan adalah menggunakan mekanisme ekonomi internasional.

Perubahan-perubahan didalam perekonomian dunia, pergeseran pusat-pusat kekuatan ekonomi, pembaharuan di negara-negara sosialis, revolusi teknologi dan komunikasi dan sebagainya, telah menyeret setiap perekonomian nasional kedalam kancah perekonomian global. Setiap pelaku perekonomian global harus mampu



kancah perekonomian global. Setiap pelaku perekonomian global harus mampu menangkap dan memahami implikasi-implikasi dari perubahan lingkungan ekonomi politik dunia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan diikuti perubahan struktur sosial, geografi perpindahan penduduk, peningkatan mutu pendidikan, dan konsekuensi-konsekuensi lainnya yang muncul sebagai efek dari pertumbuhan, merupakan tanda-tanda yang mendasari bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap sistem politik yang ada. Keadaan dunia yang seperti itu memaksa negara-negara untuk membuat langkah-langkah yang dianggap sesuai dan bermanfaat bagi negaranya sebagai antisipasi perkembangan global dunia yang semakin kompleks.

Globalisasi menggambarkan percepatan interaksi bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi merupakan proses dalam fenomena hidup dimana perubahan multi lapis dan dimensi yang didorong oleh kekuatan kapitalisme.<sup>1</sup> Dunia yang terglobalisasi berarti saling terhubungkannya peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dilihat dari keluasan, kedalaman dan kecepatannya. Globalisasi dapat dikatakan sebagai *Globalution*, paduan kata *globalization* dengan *evolution*.<sup>2</sup> Dalam hal ini globalisasi dapat menimbulkan ketegangan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Untuk menghilangkan ketegangan ini adalah dengan melakukan proses yang terus menerus, umpamanya dengan globalisasi ekonomi.

Globalisasi ekonomi merupakan proses terintegrasinya perekonomian negara kedalam masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, saling tergantung, dan saling mempengaruhi. Globalisasi ekonomi diperlihatkan oleh ketergantungan dan terintegrasinya produksi,<sup>3</sup> investasi, kredit, dan pemasaran antar negara yang semakin sulit dipisahkan dan semuanya akan menjadi satu kesatuan. Secara ekstrim,

---

<sup>1</sup> Dochak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, halaman.21

<sup>2</sup> "Wawancara Khusus dengan Friedman", dalam *Tempo*, No. 34/XXIX/ 23-29 Oktober 2000, halaman 108

<sup>3</sup> Contoh produk yang terintegrasi adalah komputer, walaupun merk-nya dari satu negara namun beberapa komponennya dibuat dari beberapa negara yang berbeda-beda.



globalisasi ekonomi diartikan sebagai "*homogenization*", karena harga barang, upah, dan tingkat rata-rata suku bunga bank akan sama diseluruh dunia.<sup>4</sup>

Apabila proses globalisasi ekonomi diartikan sebagai penyebaran industri keseluruh dunia, maka globalisasi yang dimaksud itu telah sama tuanya dengan sejarah manusia. Banyak contoh mengenai hal ini, seperti pengalihan pembuatan kaca dari Siria ke Italia, pengalihan industri metalurgi dari Roma ke Spanyol, pengalihan industri sutera dari Cina ke Turki, Italia, Eropa Timur dan Inggris, dan sebagainya.<sup>5</sup> Hal yang membedakan globalisasi dahulu dengan sekarang adalah dalam hal intensitasnya. Setelah selesai Perang Dunia II, teknologi modern belum begitu penting dalam perekonomian global seperti sekarang ini. Ideologi kapitalisme dunia disebarkan kearah global yang didukung teknologi canggih, terutama teknologi informasi. Hal ini menyebabkan dunia terasa semakin mengecil dan batas-batas negara semakin bersifat formalitas saja. Sifat pasar beserta peluang yang diciptakannya menjadi semakin dinamis, sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat sekaligus mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial lainnya.

Hubungan antara ekonomi dan politik dalam era global sangat erat. Ekonomi politik internasional adalah perluasan kaitan antara ekonomi dan politik ke lingkungan internasional melalui hubungan negara-pasar yang melampui batas wilayah satu negara, sehingga menjadi internasional, regional bahkan global. Hubungan tersebut merupakan bentuk pengaturan sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi sistem produksi, perdagangan, dan distribusi global, serta nilai-nilai yang mendasari pengaturan itu.<sup>6</sup> Pengaturan itu merupakan hasil keputusan yang diambil dalam konteks kelembagaan karena kebiasaan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengaturan sosial sama pentingnya dengan pengaturan politik maupun

---

<sup>4</sup> Kenneth Waltz, "Globalization and governance", dalam [www.rojasdatabank.org](http://www.rojasdatabank.org), data didownload pada 20 November 2001

<sup>5</sup> Sabana Kartasasmita, "Kecenderungan dan Globalisasi Ekonomi", dalam Analisis CSIS Tahun XX, No. 3 Mei-Juni 1991

<sup>6</sup> Mochtar Masoed, Bahan Kuliah EPI HI-FISIPOL UGM, 1988



ekonomi dan menegaskan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat didalam hubungan ekonomi-politik bukanlah hanya mengenai lembaga atau organisasi saja, namun juga nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Negara dan pasar sebagai lembaga ekonomi-politik dipertautkan dengan struktur ekonomi-politik internasional, yaitu sistem produksi, perdagangan dan distribusi global. Dengan mempelajari bagaimana pasar dari berbagai negara saling dipertautkan, maka dapat dilihat bentuk pengaturan yang berfungsi mempertautkan keduanya. Berbagai pengaturan atau struktur itu dipengaruhi oleh kultur, sejarah, dan nilai-nilai yang ada disekelilingnya. Walaupun yang diproduksi, diperdagangkan dan didistribusikan biasanya berwujud barang dan jasa, namun segi-segi kehidupan lain (misalnya, kekuasaan dan status) juga bisa diproduksi, diperdagangkan dan didistribusikan. Hal yang dapat dipelajari dan dipahami bahwa pengaturan ini menekankan dimana beberapa negara bisa menjadi lebih kaya daripada yang lain, atau memiliki status lebih tinggi dari yang lain, atau memiliki wewenang lebih besar dari yang lain sebagai akibat dari struktur atau pengaturan global. Peningkatan globalisasi dapat dilihat atau diamati dari meningkatnya output dunia, perdagangan dan investasi internasional serta meningkatnya jumlah perusahaan multinasional.<sup>7</sup>

Secara umum globalisasi ekonomi disebabkan oleh penurunan hambatan-hambatan dalam perdagangan dan investasi serta kemajuan teknologi. Kenichi Ohmae menyebutkan faktor globalisasi sebagai 4“I” yaitu, *Investasi, Industri, Informasi, dan Individual*,<sup>8</sup> sedangkan menurut beberapa ahli yang lain, faktor-faktor globalisasi adalah :

1. Inovasi teknologi dan meningkatnya jaringan infra struktur, seperti sistem komunikasi internasional, pemukiman, kredit, asuransi, dan perkembangan pasar yang mengurangi ongkos sistem perdagangan dan pembayaran internasional.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bukti-bukti mengenai globalisasi ekonomi akan dibahas lebih lanjut pada bab II

<sup>8</sup> Kenichi Ohmae, “Berakhirnya Negara Bangsa”, terjemahan Sunarto dan Daru Mursito, dalam Jurnal Analisis CSIS tahun XXV No 2, 1996

<sup>9</sup> C.Corsi, S.Kudrya, C.Cordone (ed), *From Control State to Free Global Market Economy*, Kluwer Academy Publisher, Dordrecht Nedtherland, 1997, halaman IX



2. Menurunnya biaya transportasi,
3. Kebijakan pemerintah dalam bidang investasi dan perdagangan internasional.
4. Faktor dan proses produksi dalam suatu negara.<sup>10</sup>

Adanya globalisasi memaksa suatu negara untuk meliberalisasi diri, sementara meningkatnya transaksi internasional menimbulkan dampak pada politik domestik. Sistem politik domestik suatu negara merupakan organisasi dimana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan bersama mereka. Untuk itu, sistem politik haruslah memiliki lembaga-lembaga atau struktur-struktur yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang memungkinkan sistem politik merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijaksanaannya. Konsep sistem, struktur, dan fungsi itu semuanya merupakan bagian dari proses yang sama. Konsep-konsep itu digunakan untuk memahami bagaimana politik dipengaruhi oleh lingkungan alam dan manusianya, dan bagaimana politik mempengaruhi kedua lingkungan tersebut. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa sistem politik suatu negara itu dikelilingi oleh lingkungan domestik dan internasionalnya, dimana mereka saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Sampai sejauh ini dapat ditekankan bahwa terdapat suatu hubungan antara suatu sistem internasional dengan kebijakan domestik suatu negara. Suatu negara dengan perekonomian terbuka, mudah berinteraksi dalam perdagangan dan investasi internasional dan mereka berusaha memiliki struktur yang menunjang perekonomiannya. Dengan demikian, struktur internal dari sistem politik juga akan berubah sesuai dengan berubahnya lingkungan eksternal. Perubahan ini berpengaruh terhadap *output* berupa kebijakan organisasi dan lembaga internal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri.

---

<sup>10</sup> Robert O Keohane, Helen, Milner (eds), *Internationalization and domestic Politics*, Cambridge University Press, Cambridge-UK, 1996, halaman 167-169 lihat juga Panji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1994, halaman 23-24 yang menyatakan bahwa penyebab semakin derasnya arus globalisasi selain kemajuan dibidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi juga penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, serta semakin mapannya kerangka sistem moneter dan perdagangan dunia.



Semenjak akhir PD II pondasi ekonomi dunia menguat dengan inovasi-inovasi institusionalnya. Beberapa inovasi insitusional tersebut adalah evolusi dari *General Agreement on Tarff and Trade* (GATT) menjadi *World Trade Organization* (WTO).<sup>11</sup> GATT diciptakan untuk menjamin kerja sama yang lebih konstruktif. GATT yang pada awalnya hanya merupakan perjanjian intern, menjadi satu-satunya instrumen perdagangan yang memperoleh konsensus untuk mengatur perdagangan internasional. Dalam perundingan Putaran Uruguay 1994, dibahas upaya menyempurnakan GATT sebagai organisasi internasional yang akhirnya menyetujui perubahan organisasi tersebut menjadi WTO. WTO mengambil alih posisi GATT dengan kewenangan baru yang jauh lebih luas daripada GATT.<sup>12</sup> WTO dipandang sebagai representasi dari rezim ekonomi global yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mereview kebijakan ekonomi nasional anggotanya. WTO mengisyaratkan sejumlah aturan main terhadap anggotanya dan bagi negara-negara yang ingin bergabung didalamnya. Dengan demikian suatu negara yang ingin berpartisipasi dalam perekonomian global, haruslah mematuhi atau menyesuaikan diri dengan aturan main WTO. Penekanan ini dilakukan untuk menjaga sistem perdagangan dunia tetap terbuka dan tetap diterima oleh banyak pihak dengan digunakannya asas GATT. Asas-asas GATT yang digunakan adalah asas non diskriminasi, asas *national treatment*, dan komitmen untuk mengadakan pembebasan dalam perdagangan secara bertahap, serta transparansi dalam penentuan dan ketentuan kebijaksanaan.<sup>13</sup>

Hal penting yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah adanya putaran pengurangan tarif dibawah mekanisme GATT. Dengan memperendah hambatan perdagangan para aktor-aktor ekonomi yang berada dalam keanggotaan GATT mendapat kesempatan untuk mencapai keuntungan dan tantangan dalam

<sup>11</sup> Sejarah perubahan GATT menjadi WTO akan dibahas pada bab berikutnya.

<sup>12</sup> Chia Siow Yue, Joseph L.H. Tan, *ASEAN in the WTO; Chalenges and Response*, Institut of South East Asian Studies, Singapore, 1996, halaman 17

<sup>13</sup> Secara luas arti dan maksud dari asas-asas GATT/WTO dapat dilihat pada H.S. Kartaćjoemena, *Op. Cit*, halaman 108



mengurangi tarif bagi terciptanya pasar dalam negeri yang terbuka. Berdasarkan kenyataan yang ada, semenjak tahun 1970-an negara diseluruh dunia ini termasuk diantaranya adalah Meksiko, Chili, India, Vietnam, dan Cina (RRC) memutuskan pengurangan hambatan perdagangan, intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi dan melakukan privatisasi badan-badan usaha milik negara sebagai dampak dari tekanan-tekanan internasional.<sup>14</sup>

Sebagai salah satu negara yang dalam tiga dekade terakhir ini semakin diperhitungkan perannya dalam konstelasi sistem ekonomi politik internasional, Cina banyak melakukan pembaharuan. Semenjak didirikan pada tahun 1949, Mao Zedong telah mencoba melakukan pembangunan modernisasi Cina dengan menekankan pembangunan industri berat. Tahun 1956, Mao menyadari bahwa model ini tidak cocok bagi Cina. Perubahan ekonomi yang atraktif di Asia Pasifik diawal tahun 1960-an,<sup>15</sup> telah menekan sektor pertanian, industri ringan, dan perkembangan propinsi-propinsi pesisir untuk membuka perekonomiannya. Kontradiksi orientasi ekonomi politik Autarki dengan kecenderungan ekonomi internasional yang liberal diawal tahun 1970-an telah meningkatkan ongkos pelaksanaan kebijaksanaan Autarki Cina.<sup>16</sup>

Setelah rezim Mao tumbang, Deng Xiaoping naik ke puncak kekuasaan dan berinisiatif melakukan reformasi. Platform kebijakan Deng ini diperkenalkan pada bulan Desember 1978 dalam Pertemuan Komite Pusat XI. Reformasi ini berpengaruh pada munculnya kebijaksanaan desentralisasi, dimana secara garis besar Deng menyatakan bahwa desentralisasi dan pasarisasi ekonomi domestik Cina akan dilakukan secara bertahap dan Cina akan lebih membuka diri terhadap investasi

<sup>14</sup> Helen V. Milner, Robert O Keohane, *op. cit*, halaman 24

<sup>15</sup> Sejumlah negara dikawasan Asia Pasifik menciptakan perekonomian yang semakin atraktif dan menambah komitmennya untuk menciptakan kawasan pasar bebas, AS menerapkan strategi utama di Asia Pasifik dengan fokus pada Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan memperluasnya ke kawasan Asia Tenggara. Paad dekade tahun 1970'an Jepang memulai investasinya diwilayah tersebut, khususnya setelah nilai tukar mata uangnya -Yen, menguat diakhir dekad tahun 1980-an. Investasi Jepang menjadi kekuatan utama dalam terciptanya integrasi ekonomi dikawasan tersebut dan menciptakan pola pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai "Model Angsa Terbang" dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Lihat Susan Shirk dalam Robert O Keohane, Helen V. Milner, *op. cit*, 1996, halaman 191



asing.<sup>17</sup> Pendekatan ini menambah dukungan pada Deng.<sup>18</sup> Dengan adanya reformasi ekonomi dan kebijaksanaan pintu terbuka telah mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi Cina yang pesat.<sup>19</sup> Deng menjalankan Program Empat Modernisasi, dengan menjalankan Politik Pintu Terbuka yang disertai dengan dijalankannya kebijaksanaan desentralisasi fiskal di awal tahun 1980-an.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menelaah pengaruh globalisasi ekonomi terhadap kebijaksanaan desentralisasi yang dijalankan Cina. Terdapat suatu kenyataan bahwa kekuatan sistem ekonomi internasional, mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi politik dalam negeri. Dari sini jelaslah bahwa terdapat dampak globalisasi ekonomi terhadap kebijaksanaan politik dalam negeri. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan penulisan skripsi berjudul:

“ Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Kebijakan Desentralisasi di Republik Rakyat Cina”.

---

<sup>16</sup> Susan Shirk, dalam Robert O. Keohane dan Helen V. Milner, *Op. Cit*, halaman 193

<sup>17</sup> *ibid*, halaman 194

<sup>18</sup> Deng dan para pengikutnya (kelompok moderat) memperoleh dukungan dari golongan militer, mereka kemudian menangkap para pemimpin kelompok kiri (Jiang Qing, Wang Hongwen Yao Wenyuan, dan Zhao Chengqiao) yang terkenal sebagai “*the gang of four*”. Persaingan antara kelompok kiri dengan kelompok moderat, antara golongan Hua Guefang dan “*the gang of four*” dengan golongan Deng Xiaoping dapat dibaca lebih jauh di Chandler hauss, *Comparative politics; Domestic Response to Global Challenge ; Second Edition*, West Publishing Company, St. Paul – Minneapollis, 1997, halaman 287-292

<sup>19</sup> Selama dasawarsa 1984-1994 ekonomi Cina telah berkembang dengan rata-rata 10% per tahun, sehingga pendapatan domestik bruto Cina telah bertambah empat kali lipat dari dekade sebelumnya. *Kompas*, 5 Maret 1997



## 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup pembahasan dalam penulisan memiliki arti penting untuk memberikan arah pembahasan sesuai dengan yang dimaksud dan mempermudah penulis dalam mengatasi kesulitan dalam mencari data. Seperti yang diungkapkan Hadi, bahwa :

“ Sekali suatu penelitian telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok-pokok permasalahan tersebut. Bagi penyelidik sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada tulisan ini diserahkan, penegasan selalu berfungsi untuk mencegah timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan”<sup>20</sup>.

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka penulis memilih ruang lingkup pembahasan kedalam dua aspek, yaitu aspek pembatasan waktu dan aspek pembatasan materi.

### a) Pembatasan waktu

Aspek pembatasan waktu adalah rentang waktu terjadinya sebuah peristiwa yang dianalisis. Dari aspek ini penulis memulai pembahasan semenjak tahun 1949, saat itu Mao mulai menjalankan pemerintahannya dan menggelirkan kebijaksanaan desentralisasi (walaupun sangat terbatas) sampai tahun 2000. Momentum penting bagi RRC di tahun 2000, yaitu adanya kesepakatan antara Cina dengan Uni Eropa dan AS berkenaan dengan proses masuknya Cina kedalam WTO.

### b) Pembatasan Materi

Aspek pembatasan materi, penulis menekankan pada perubahan-perubahan yang ditimbulkan dari partisipasi Cina dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini berupa kebijakan desentralisasi yang diambil Cina sebagai langkah menyesuaikan diri atas perekonomian internasional.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal.8



### 1.3 Permasalahan

Adanya tantangan, kesangsian, halangan, ambiguitas, dan kebingungan atas suatu fenomena akan menimbulkan permasalahan. Pemecahan masalah yang dirumuskan dalam suatu penelitian, sangat berguna untuk membersihkan kebingungan kita. Oleh karena itu, haruslah ditentukan masalah dan masalah tersebut dirumuskan untuk memperoleh jawaban.

Sebagaimana dengan kemajuan ekonomi internasional, sektor-sektor perdagangan juga meluas dan semakin sensitif terhadap pasar dunia. Dari kenyataan tersebut memunculkan kemungkinan-kemungkinan kebijaksanaan baru dalam negeri dan perubahan institusi-institusi politik domestik yang akan berkembang menuju perekonomian yang peka terhadap tekanan-tekanan dari luar seperti sistem ekonomi internasional itu sendiri. Sistem ekonomi internasional telah mengambil alih otonomi kebijaksanaan ekonomi makro pemerintah. Hal ini membuat pemerintahan Cina yang bersifat tertutup pada awalnya menjadi lebih terbuka. Di lain pihak, mobilitas modal dapat dipandang jauh lebih menjangkau sistem perdagangan yang terbuka daripada sistem perdagangan yang tertutup. Sistem ekonomi internasional dapat menimbulkan dampak terhadap suatu negara meskipun negara tersebut menganut sistem yang tertutup, selayaknya Cina sebagai negara sosialis. Dalam dua dekade terakhir ini Cina telah melakukan transformasi ekonomi dan politiknya menuju perekonomian yang berorientasi pasar dengan membuka kran arus perdagangan dan investasi luar negeri. Sebagai implikasinya maka pemerintahan Cina melakukan penyesuaian terhadap tata ekonomi internasional dimana untuk itu struktur politik domestik Cina juga berubah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan masalah yaitu :

- I. Mengapa Struktur Politik Dalam Negeri RRC berubah ?
- II. Sejauh mana perubahan dalam struktur politik domestik RRC ?



#### 1.4 Kerangka Teori

Dalam mencari pemecahan terhadap permasalahan diatas, diperlukan suatu teori yang dapat memberikan dukungan atas hipotesis yang diajukan. Suatu teori berguna sebagai landasan berpijak dalam melakukan analisa dan pemecahan suatu permasalahan. Jack C. Plano memberikan pengertian teori secara umum sebagai berikut :

“ Suatu gagasan atau kerangka berfikir yang mengandung penjelasan, ramalan, atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu pengetahuan empiris ( termasuk ilmu politik empiris ) teori mengacu pada kaidah yang logis pada perangkat preposisi yang memastikan adanya hubungan di antara variabel-variabel, yang dimaksud menjelaskan atau meramalkan kedua-duanya”.<sup>21</sup>

Sementara itu Mc Clelland memberikan definisi yang spesifik tentang teori,yaitu :

1. Teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta
2. Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan
3. Teori merupakan seperangkat pertanyaan mengenai keadaan yang diharapkan
4. Teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dunia nyata
5. Teori merupakan abstraksi.<sup>22</sup>

Menurut Budiardjo, teori itu merupakan generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena, yang dalam penyusunannya selalu memakai konsep-konsep.<sup>23</sup> Dengan demikian teori pada dasarnya terdiri dari konsep-konsep. Bertitik tolak dari pendapat-pendapat tersebut, didalam setiap pembahasan suatu masalah ilmiah diperlukan adanya kerangka dasar teori untuk menyajikan penjelasan dalam menjawab permasalahan yang diajukan.

Kerangka dasar teori memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, menjadi

<sup>21</sup> Jack C Plano, dkk, *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, halaman 266

<sup>22</sup> Charles A. Mc Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*, CV. Rajawali Press , Jakarta, 1990, halaman 10

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1972, halaman 20



pendorong bagi penyusun, membimbing peneliti dalam mencari jawaban permasalahan, dan dalam membuat ramalan atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam studi hubungan internasional menyangkut semua bentuk hubungan dalam kehidupan sosial umat manusia yang melintasi batas-batas negara. Hubungan internasional tidak hanya menyangkut hubungan-hubungan politik antar negara, tetapi juga juga meliputi aspek-aspek lain seperti perdagangan internasional, diplomasi, masalah keamanan, lingkungan hidup, bantuan luar negeri, kebudayaan dan sebagainya. Salah satu bentuk hubungan internasional yang menonjol dan berlangsung cukup intensif adalah hubungan dalam bidang ekonomi. Hubungan ekonomi internasional ini dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerja sama internasional<sup>25</sup>.

Prioritas kepentingan nasional yang paling mendasar dapat digunakan untuk menjelaskan kepentingan Cina dalam ekonomi internasional dan kebijaksanaan yang diambil untuk mendukung kepentingannya tersebut. Menurut Donald E Nuechterlein ada empat macam kepentingan nasional, yaitu:

1. *Economic Interest* atau kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dalam hubungan dengan negara lain. Menyangkut masalah-masalah produksi barang tertentu, perdagangan internasional yang berhubungan dengan masalah moneter, pengaturan masalah-masalah ekspor impor suatu negara, persetujuan yang dilakukan oleh negara mengenai harga terhadap harga sejenis, dan tarif.
2. *Kedua, Defence Interest* atau kepentingan pertahanan, yaitu kepentingan negara untuk melindungi warga, wilayah, dan sistem politiknya dari serangan ataupun ancaman pihak luar. Menyangkut masalah pertahanan dan keamanan beserta sistem yang digunakan, mengadakan kerja sama dan latihan perang bersama, jual beli senjata dan masalah-masalah penggunaan dan pembangunan pangkalan militer.
3. *Ketiga, World Order Interest* atau kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional, sehingga negara merasa aman dan warga dapat bebas melakukan perdagangan dengan pihak luar.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986, halaman 39

<sup>25</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional (Edisi 2)*, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1992, halaman. 1



4. *Keempat, Ideology Interest* atau kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk melindungi seperangkat nilai-nilai yang dianut dan dipercayai oleh rakyat dan negara sebagai nilai-nilai baik. Landasan kepentingan politik mereka adalah melindungi dan mempertahankan nilai-nilai yang mereka miliki atau setidaknya tidaknya berusaha agar ideologi tersebut diterima negara lain dan bila mungkin dapat dipergunakan negara lain.<sup>26</sup>

Relevansi konsep kepentingan ini terletak pada poin kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan untuk meningkatkan perekonomian dalam hubungan dengan negara lain. Strategi kebijaksanaan Cina, adalah dengan mengandalkan kemampuan hubungan luar negeri dalam mencapai pemenuhan kepentingan nasionalnya. Hal ini tercantum dalam Kebijakan Empat Modernisasi Deng (industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan), maupun kebijaksanaan politik pintu terbuka. Melalui dua kebijaksanaan ini, Deng berharap menjadikan Cina sebagai salah satu kekuatan yang besar.<sup>27</sup>

Dalam memahami globalisasi diperlukan asas-asas tertentu, yaitu: (1). Perlunya pemahaman akan konteks global diantara negara-negara dan pelaku-pelaku yang saling berinteraksi, (2). Pemahaman bahwa globalisasi lebih menekankan analisa sejarah dalam membandingkan sistem internasional, (3). Asumsi global yang menyatakan bahwa mekanisme atas eksistensi yang dominan akan menjaga pembangunan dinegara-negara dunia ketiga dan memberikan kontribusi terhadap negara-negara yang juga bukan negara berkembang, (4). Asumsi global bahwa faktor-faktor ekonomi lebih bersifat kritical absolut bagi eksplanasi evolusi dan penggunaan dari sistem ekonomi kapitalis, serta menjadikan negara-negara didunia ketiga sebagai subordinat sistem internasional.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Donald E. Nuechterlein, *The Concept of National Interest A Time for New Approach*, Orbish, Spring, 1979, halaman. 79 dan catatan-catatan kuliah penulis

<sup>27</sup> Rizal Sukma, "Pemikiran Strategis Cina dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping", CSIS, Jakarta, April 1995, halaman 44

<sup>28</sup> Dochak Latief, *Op. Cit*,



Asumsi historis atas evolusi sistem ekonomi global, akan memungkinkan untuk memahami struktur saat ini. Faktor sejarah merupakan faktor penting dan menjadi penunjuk sifat dari sifat kapitalisme globalisasi ekonomi. Sistem ekonomi yang demikian ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi individu, negara, ataupun masyarakat. Walaupun demikian Cina yang termasuk kedalam negara sosialis tetap harus melakukan adaptasi terhadap perekonomian global yang kapitalistik. Penulis melihat, proses globalisasi diadopsi dari sistem dunia yang kapitalistik sementara sistem kapitalis dunia tersebut merupakan awal dari hubungan yang bersifat ketergantungan. Hal ini merupakan antitesis dari sosialisme dan komunisme, sehingga Cina dipaksa untuk tidak banyak memiliki pilihan-pilihan kepentingan yang secara signifikan dimana mereka sebelumnya telah membatasi perekonomiannya diantara sistem ekonomi kapitalis.

Sebuah negara tidak sepenuhnya berdasar pada pertimbangan politis atau strategis secara terus menerus, sementara pertimbangan lain diabaikan. Tujuan Cina saat ini berdasarkan pada pertimbangan ekonomi yang menitik beratkan pada perluasan perdagangan luar negeri. Cina telah melihat kenyataan bahwa perdagangan dan keuangan internasional dapat digunakan sebagai alat bagi pencapaian kepentingan nasionalnya. Pencapaian perolehan ekonomi menjadi tujuan penting dalam melakukan hubungan dengan negara lain.<sup>29</sup> Modernisasi yang dilakukan Cina berakibat pada konflik institusional domestiknya. Institusi-institusi yang berhasil melewati transisi tersebut telah melakukan adaptasi dengan cara mencairkan diri dan membatasi pertumbuhan inovasi fungsional dalam kegiatan industri.<sup>30</sup> Dengan kata lain globalisasi ekonomi menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi pencapaian perolehan ekonomi.

Hubungan yang bersifat asimetris diantara bangsa-bangsa di dunia ini telah mengemuka dalam perekonomian. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial-ekonomi telah mencapai irama kehidupan modern, karena logika waktu tampaknya

---

<sup>29</sup> S.L.Roy, *Sejarah Diplomasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, halaman .27



berjalan semakin cepat, maka logika ruang menyempit dengan adanya komunikasi dan transportasi. Pentingnya logika global ini menurut Isaak lebih merujuk pada karakteristik ekonomi dunia dewasa ini, yaitu sifat transnasional antar sistem negara, bangsa dan sistem sosial dunia. Dengan demikian ekonomi politik global dapat digunakan untuk berpikir secara global tetapi bertindak secara lokal.<sup>31</sup> Sudah sejak abad ke-17 sebagian besar studi dan praktek hubungan internasional mulai dengan asumsi bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem politik global. Menurut Karl Keiser, mewakili kaum tradisional menyatakan bahwa arena untuk tindakan politik yang terletak diantara negara-negara (*inter nations*) dan pelaku yang terlibat didalam arena itu adalah negara (*nationes*).<sup>32</sup>

Asumsi yang demikian ini Menurut Robert Mansbach memberikan implikasi sebagai berikut :

1. Politik Global didasarkan pada interaksi berbagai negara, dimana negara sekaligus menjadi objek dan subjek.
2. Setiap negara sama berdaulatnya dengan negara yang lain,
3. Setiap negara diperlakukan seolah-olah sebagai suatu sistem politik yang homogen dengan suatu pemerintah pusat yang di dalam negerinya memiliki monopoli memaksa,
4. Masing-masing negara adalah bebas; bisa dibedakan satu sama lain, dan tidak tunduk pada wewenang lain,
5. Negara-bangsa secara eksklusif mengendalikan wilayah yang berbatas jelas dan sejumlah warga; sedangkan dunia dibagi kedalam kotak-kotak geografis.
6. Partisipan dalam politik dunia hanya terdiri dari para pelaksana politik luar negeri pemerintah berbagai negara, yaitu para diplomat sementara kelompok lain yang berkepentingan dengan politik dunia menyampaikan kepentingannya melalui perantara-perantara pemerintah,
7. Negara-bangsa merupakan tempat manusia mengerahkan kesetiaan sekulernya yang tertinggi.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1991, halaman 415

<sup>31</sup> Robert A. Isaak, *Ekonomi Politik Internasional*, pengantar Mochtar Mas'oeed, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, halaman 11

<sup>32</sup> Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, edisi revisi, LP3ES, Jakarta, September 1994, halaman 227



maupun sekarang dan mengariskan dalam bentuk haluan yang dibuat oleh para pembuat keputusan sebagai tujuan yang harus dicapai atau merupakan tuntutan yang harus dipenuhi sebagai kepentingan mereka. Walaupun demikian, dalam sistem global ini berbagai macam keputusan dan kebijaksanaan yang dibuat merupakan dorongan dari berbagai aktor untuk saling mempengaruhi dan memaksakan. Tingginya transaksi yang terjadi dan ketergantungan antar aktor tersebut menjadikan aktor-aktor itu tidak benar-benar otonom. Hubungan antara tingkat interdependensi antar aktor internasional ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi, telah menjadikan kebijaksanaan yang diambil oleh aktor tersebut semakin relatif bebas. Kondisi yang demikian ini menjadikan model hubungan yang sebelumnya bersifat *state-centric* berkembang menjadi bentuk hubungan yang bersifat *transnasional*.<sup>34</sup>

Semua struktur tata dunia selama ini berpusat pada negara-bangsa, organisasi pemerintahan, atau integrasi negara-negara kedalam satuan politik yang lebih tinggi. Kedaulatan dan kekuasaan merupakan jantung dari sistem ini. Kesemuanya itu merupakan model tata dunia yang berpusat pada negara, sementara struktur internasional yang terbentuk melalui interaksi antar negara akan menentukan perilaku negara-negara tersebut dan menghasilkan sistem internasional yang anarki, dimana tidak ada negara-bangsa yang secara legal formal berstatus lebih tinggi dibanding dari yang lain.<sup>35</sup>

Sekalipun demikian, kita dapat melihat banyak transaksi dalam sistem internasional yang tidak melibatkan perantara pemerintah, tetapi langsung dilakukan antar individu, atau antar pemerintah dengan sebuah perusahaan asing. Proses inilah yang disebut sebagai proses transnasionalisme. Interaksi ini melibatkan dua atau lebih aktor non-pemerintah atau antara satu aktor pemerintah dan satu atau lebih aktor swasta. Sistem transnasionalisme merupakan sistem multisentris, dimana negara bukan satu-satunya aktor dalam proses politik internasional. Banyak aktor lain yang mempengaruhi proses politik internasional seperti organisasi internasional antar pemerintah (contohnya PBB, Bank Dunia, IMF, WTO), organisasi-organisasi

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 228



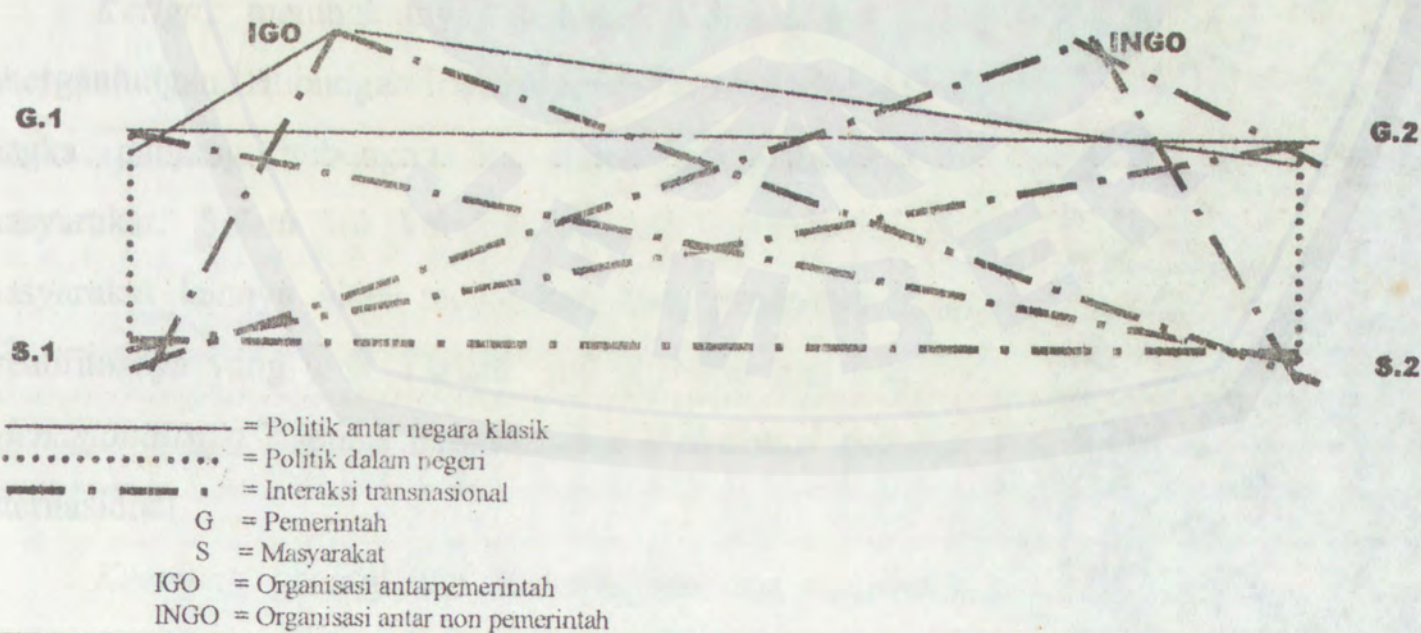
internasional non pemerintah yang berorientasi bisnis (contohnya Toyota, Freeport), maupun yang tidak berorientasi laba (contohnya Greenpeace), bahkan bisa juga aktor individual seperti Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev maupun kelompok yang tidak formal seperti Cina perantauan.

Asumsi pokok dalam hubungan transnasional menurut Masoed :

“ Berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor non negara. Dengan adanya kenyataan bahwa batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kurang relevan. Negara-negara sebagai aktor politik, seringkali disusupi dan dilampaui oleh aktor-aktor lain, baik sama-sama negara-bangsa maupun negara. Secara geografis batas-batas wilayah tersebut akan semakin absurd dan kurang berarti bagi beberapa aktor tersebut ”.<sup>36</sup>

Dilain pihak *transnasionalisme* diartikan sebagai perpindahan barang, informasi dan gagasan yang melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah.<sup>37</sup> Pola hubungan ini melibatkan partisipasi berbagai aktor secara besar-besaran, terutama aktor non pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Bagan 1.2 Interaksi Internasional dan Politik Antarnegara dalam Model Hubungan Transnasionalisme



<sup>35</sup> Steven L. Spiegel, *World Politics in a New Era*, Harcourt Brace & Company, USA, 1995, halaman 601

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 254

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 274



Sumber: Adaptasi dari Robert O Keohane dan Joseph S. Nye Jr, " *transnational Relations worl Politics*", Harvard UP, 1972 dalam Moctar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, September 1994, halaman 232

Salah satu ciri pokok hubungan ini ialah adanya berbagai jenis interaksi yang melewati pemerintah dan secara langsung mempengaruhi lingkungan domestik, dimana aktor non pemerintah memiliki peran yang semakin penting. Hubungan transnasionalisme memberikan enam pengaruh atas prespektif hubungan internasional. *Pertama*, hubungan transnasional menimbulkan perubahan sikap para aktornya. Hubungan tersebut dapat mengubah persepsi yang ada, dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan sosial dan budaya, mempertajam wawasan, dan mengurangi kebencian. Pada umumnya, perubahan-perubahan sikap ini dapat menunjang transformasi sistem internasional dengan memperbesar tingkat toleransi antar bangsa, terutama dari kalangan elitnya.

*Kedua*, semakin meningkatnya hubungan pluralisme internasional. Hubungan ini akan memperbanyak ikatan antara proses-proses politik domestik dan sistem internasional. Akan semakin banyak kepentingan yang dilibatkan dalam pembuatan keputusan dimana elit-elit nasional menjalin hubungan dengan rekannya di luar negeri dan semakin banyak pelayanan yang tercipta bagi lebih banyak orang.

*Ketiga*, meningkatnya peluang terbentuknya ketergantungan dan saling ketergantungan. Hubungan transnasional memperjelas kebutuhan bersama, dan dalam jangka panjang hubungan itu dapat menghilangkan akar-akar konflik antar masyarakat. Selain itu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap masyarakat lainnya akan meningkat, baik produktifitasnya maupun bentuk-bentuk kreatifitasnya yang unik. Dalam hal ini hubungan transnasional menunjang proses "*denasionalisasi*" setiap bangsa yang membatasi pemerintah dari pusat transaksi internasional.

*Keempat*, peningkatan transnasionalisme memberikan efek menguntungkan bagi aspek-aspek sistem internasional yang berpusat pada negara. Jelasnya, stabilisasi antar bangsa seiring dengan meningkatnya ketergantungan antar masyarakat akan

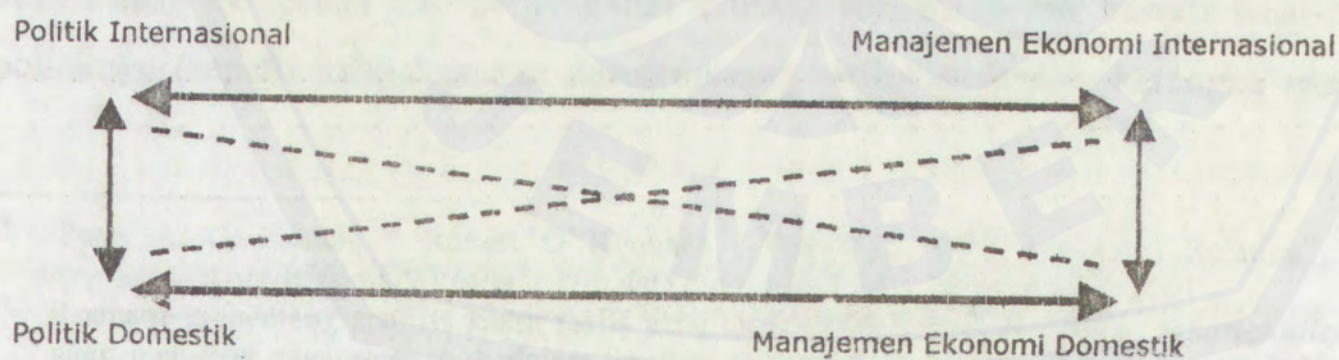


meningkatkan hubungan damai antar pemerintah, serta membuka peluang guna saling mempengaruhi.

*Kelima*, partisipasi transnasional bila dilembagakan dapat menciptakan aktor-aktor otonom atau semi otonom baru yang berpengaruh dalam sistem internasional. Antara lain, organisasi-organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga informal yang bertindak sebagai pengatur interaksi transnasional.

*Keenam*, pengaruh transnasionalisme adalah pelembagaan transaksi antar masyarakat secara bertahap, yang akhirnya bisa menjadi organisasi internasional fungsional yang non-pemerintah. Seperti halnya dengan organisasi formal (pemerintah atau antar pemerintah) yang hanya memiliki satu tujuan, yakni merumuskan norma-norma internasional dalam bidang masing-masing, organisasi nonformalpun mampu menciptakan norma-norma bagi mereka sendiri. Dalam pandangan transnasionalisme, isu-isu ekonomi akan meningkat dan hubungan ekonomi internasional menjadi semakin peka terhadap perekonomian dalam negeri suatu negara dan begitu pula sebaliknya, ekonomi dalam negeri suatu negara semakin peka terhadap perubahan ekonomi internasional (lihat table 1.3).

Bagan 1.3 Hubungan Politik dan Ekonomi dalam Model Hubungan Transnasionalisme:



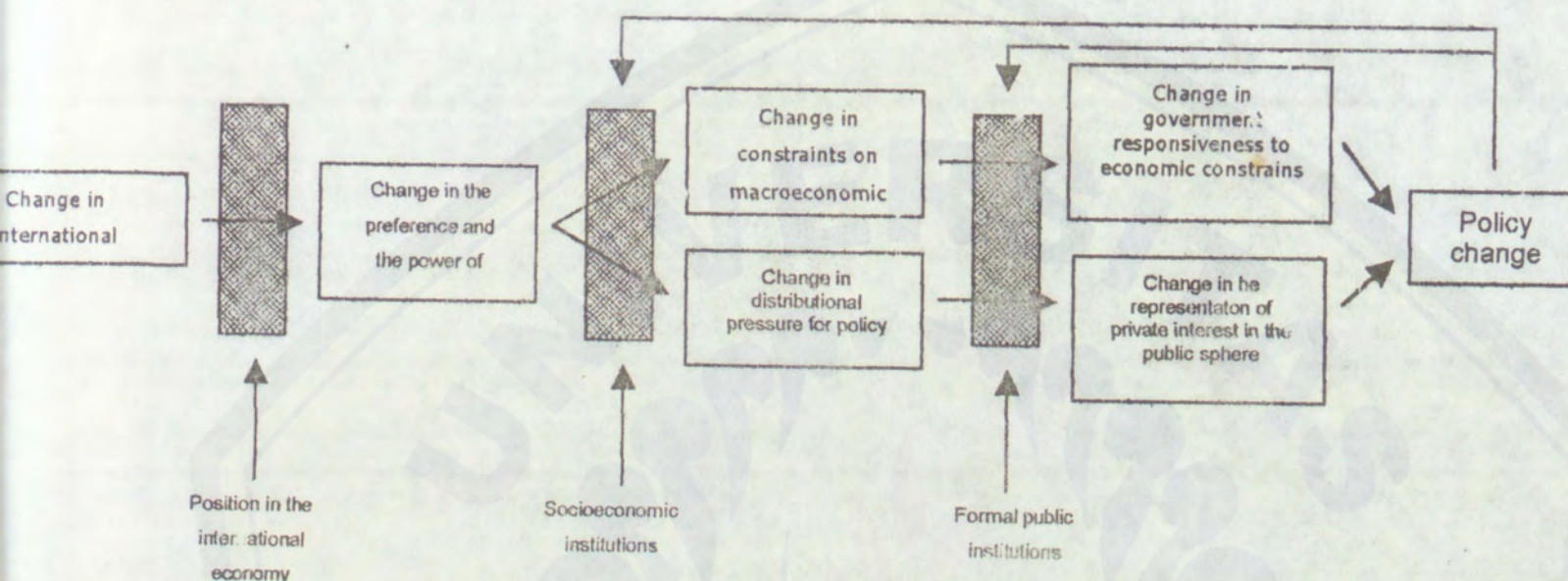
Sumber : Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, September 1994, halaman 233

Garis diagonal patah-patah dalam figur tersebut menunjukkan bahwa politik dalam negeri bisa mempengaruhi ekonomi internasional, ekonomi domestik bisa mempengaruhi politik internasional, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini penulis



sebagai landasan argumentasi teori dari Garret dan Lange sebagaimana pada bagan 1.4 berikut ini.<sup>40</sup>

Bagan 1.4 Hubungan antara Ekonomi Internasional, Institusi Domestik Perubahan Politik



Sumber: Geoffrey Garret and Peter Lange, "Internationalization, Institutions, and Politic Change", dalam Robert O. Keohane, Helen V. Milner (ed), *Internasionalization and Domestic Politics*, Cambridge University Press, Cambridge-UK, 1996, halaman 51

Pada tahap I, menunjukkan perubahan dan kondisi ekonomi internasional yang menjadi rangsangan umum bagi perubahan konstelasi ekonomi politik domestik suatu negara. Sebelumnya haruslah dipahami tentang tingkah laku dari suatu pemerintahan, bahwa pemimpin-pemimpin politik memiliki keinginan untuk tetap memegang kekuasaan semaksimal mungkin. Untuk itu mereka akan berusaha agar kekuasaannya langgeng. Memainkan distribusi kekuasaan dalam pemerintahan merupakan cara bagi para pemimpin untuk tetap mendominasi kekuasaan dengan memfokuskan pada agregasi penampilan ekonomi. Distribusi kebijaksanaan yang menguntungkan dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok yang mendukungnya. Hal ini memberikan sedikit gambaran tentang keragaman perubahan kebijaksanaan ekonomi makro yang dijalankan oleh pemerintah.

<sup>40</sup> Garret dan Lange, dalam Robert O. Keohane dan Helen V. Milner, *op.cit*, halaman 50-54



mengkaji bagaimana struktur politik domestik Cina yang berubah sebagai eksekusi dari responnya terhadap globalisasi ekonomi.

Dalam hubungan transnasionalisme, Keohane dan Joseph Nye, mengajukan model hubungan “Interdependensi Komplek” sebagai suatu bentuk hubungan negara-negara dengan berbagai area permasalahan dalam perekonomian, lingkungan, migrasi, budaya, dan sebagainya, (dimana pada masing-masing area permasalahan ini terdapat lebih dari satu dimensi yang memiliki pola spesifik atas pengaruh dari kekuasaan).<sup>38</sup> Adanya perubahan pola hubungan antar negara yang semakin kompleks, dari hubungan berdasar pada pendekatan keamanan dan ideologi menjadi pendekatan ekonomi, hal ini menjadikan masalah ekonomi menjadi *high politics*. Masalah-masalah ekonomi yang mengglobal telah mengubah tata ekonomi dunia, dan juga hampir semua bagian kehidupan suatu negara. Negara-negara itu pada akhirnya menjadi tergantung kepada sistem internasional bukan hanya dalam bidang ekonomi, namun juga budaya dan politik.

Interdependensi kompleks dan hubungan transnasionalisme merupakan konsep-konsep yang memuat beberapa unsur-unsur yang menentang pemikiran realisme yang membawa kearah perubahan.<sup>39</sup> Guna memperjelas bagaimana hubungan transnasionalisme dalam ekonomi berpengaruh terhadap politik dalam negeri akan mengubah atau berpengaruh terhadap institusi politik beserta hasil-hasil politiknya (seperti kebijaksanaan desentralisasi), maka digunakan kerangka analisis

---

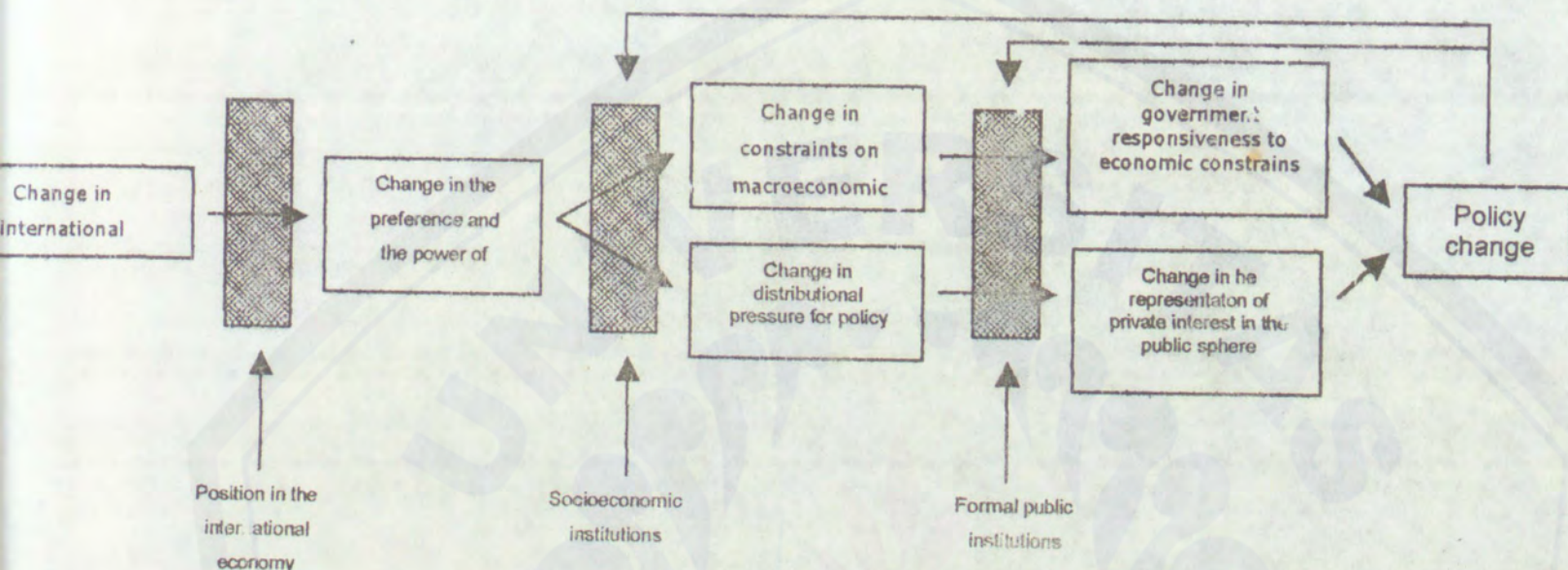
<sup>38</sup> Peter A. Geurivitch, “ Robert O Keohane : The Studi of International Relation”, dari [www.apsanet.org/PS/sept99/keohane.cfm](http://www.apsanet.org/PS/sept99/keohane.cfm) data didownload pada 23 September 2001

<sup>39</sup> Keohane menentang analisis kaum realis yang menyatakan bahwa anarki dan *security dilemma* akan menyeret negara-negara kedalam konflik, pertama-tama dengan berpegangan pada konsep transnasional, bahwa walaupun negara merupakan sebuah aktor yang uniter, lembaga-lembaga yang ada dapat mengatasi hambatan kerjasama yang diakibatkan oleh anarki, jadi konsep tersebut dapat mengesampingkan sentralitas negara yang selama ini selalu menjadi unit analisa pada awal tahun 1970-an. Keohane menerima pentingnya keberadaan suatu sistem untuk membentuk perilaku suatu negara (hal mana yang merupakan pertentangan dengan Kenneth Waltz, yang lebih mengutamakan penggunaan “konflik”). Keohane memandang adanya kemungkinan kerjasama. Pernyataan bahwa kerjasama akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada konflik, masih belum memperoleh sanggahan dari teorisi sistem lainnya. Hasil akhir dari suatu koordinasi pastinya akan mengungguli keuntungan utama dari konflik. *Ibid.*



sebagai landasan argumentasi teori dari Garret dan Lange sebagaimana pada bagan 1.4 berikut ini.<sup>40</sup>

Bagan 1.4 Hubungan antara Ekonomi Internasional, Institusi Domestik Perubahan Politik



Sumber: Geoffrey Garret and Peter Lange, "Internationalization, Institutions, and Politic Change", dalam Robert O. Keohane, Helen V. Milner (ed), *Internasionalization and Domestic Politics*, Cambridge University Press, Cambridge-UK, 1996, halaman 51

Pada tahap I, menunjukkan perubahan dan kondisi ekonomi internasional yang menjadi rangsangan umum bagi perubahan konstelasi ekonomi politik domestik suatu negara. Sebelumnya haruslah dipahami tentang tingkah laku dari suatu pemerintahan, bahwa pemimpin-pemimpin politik memiliki keinginan untuk tetap memegang kekuasaan semaksimal mungkin. Untuk itu mereka akan berusaha agar kekuasaannya langgeng. Memainkan distribusi kekuasaan dalam pemerintahan merupakan cara bagi para pemimpin untuk tetap mendominasi kekuasaan dengan memfokuskan pada agregasi penampilan ekonomi. Distribusi kebijaksanaan yang menguntungkan dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok yang mendukungnya. Hal ini memberikan sedikit gambaran tentang keragaman perubahan kebijaksanaan ekonomi makro yang dijalankan oleh pemerintah.

<sup>40</sup> Garret dan Lange, dalam Robert O. Keohane dan Helen V. Milner, *op.cit*, halaman 50-54



Tahap II, kebijaksanaan yang dikeluarkan dan didistribusikan kepada institusi-institusi ekonomis sosial berasal dari respon aktor-aktor ekonomipolitik atas perubahan dan kondisi ekonomi internasional dan kondisi ekonomi dalam negeri. Institusi-institusi ekonomis sosial memiliki pengaruh terhadap perbedaan kebijaksanaan, dimana reaksi suatu negara terhadap tekanan ekonomi dari luar tergantung pada kemampuan institusi politik yang ada.

Tahap III, pengaturan kembali institusi ekonomipolitik domestik untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan peningkatan ekonomi. Pengaturan institusi bertumpu pada dampak yang muncul dari beragamnya tingkah laku pemerintah dalam institusi-institusi formal di publik area. Bentuk institusi ini dipengaruhi oleh hambatan-hambatan ekonomi makro yang dijalankan oleh pemerintah serta dari reaksi mereka sendiri terhadap munculnya tekanan-tekanan bagi perubahan kebijaksanaan. Dilain pihak daya responsif dari pemerintah terhadap perubahan domestik tergantung pada rezim yang ada,<sup>41</sup> kedua, kelompok pendukung pemerintah; ketiga, banyaknya kepentingan yang beredar dalam sistem politik; keempat, otoritas birokrat yang ada terhadap kebijaksanaan yang berhubungan dengan perubahan dalam konstelasi sektor publik.

Tahap IV, terciptanya perubahan-perubahan struktur institusi politik untuk menurunkan suhu tekanan yang muncul dari tekanan politik dan perekonomian. Menurut Garret dan Lange,

“ Pemerintah lebih suka mengubah institusinya manakala telah menerima resiko dari perubahan yang terjadi, sedangkan kondisi konjungtur (seperti perekonomian internasional yang sehat) akan lebih diminati, dan jika ada kesempatan yang lebih baik pemerintah

---

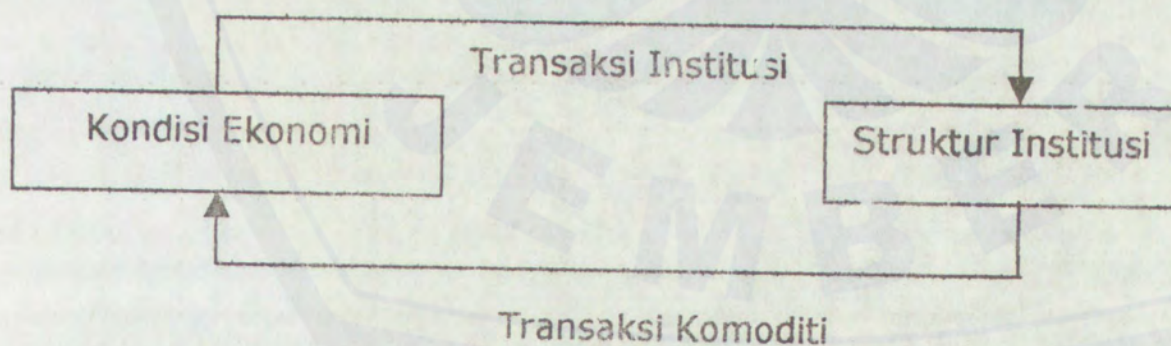
<sup>41</sup> Model rezim yang berkuasa dan perubahan dalam pemerintahan merupakan determinan utama yang mendasari bagi suatu pemerintahan untuk menyikapi perubahan. Dengan kata lain semakin murah biaya untuk menentang suatu pemerintahan, maka akan semakin mudah untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada apabila mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak populer. Dan apabila semakin responsif suatu pemerintahan terhadap perubahan sosial tersebut, maka hal itu dianggap sebagai kewajiban beban dari pemerintah. Dengan asumsi yang demikian, perubahan akan cepat terjadi pada suatu rejim yang demokratis dibanding yang otoritarian, *Ibid*



berkeinginan untuk melakukan pertanggungjawaban pada warga negaranya".<sup>42</sup>

Aktor-aktor ini beroperasi dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi dalam transnasionalisme. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fenomena hubungan internasional semenjak tahun 1970-an telah didominasi sistem ini. Kecenderungan neo liberalisme dalam ekonomi global memperkuat dominasi kapital dalam perekonomian global dan mendorong transnasionalisme berlaku efektif. Aktifitas-aktifitas yang sedemikian rupa itu merupakan jawaban atas kondisi perekonomian yang baru, dengan fokus pada lahirnya atau penataan institusi-institusi baru yang disebut sebagai "Pergantian Institusional (*Intstitutional Transactions*)".<sup>43</sup> Munculnya struktur institusi baru berasal dari pergantian institusi lama sebagai respon atas perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekonomi-politiknya. Struktur institusi yang baru berpengaruh pada komoditas yang diperdagangkan. Komoditas dalam hal ini adalah konstelasi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sebagaimana dalam teori ekonomi.<sup>44</sup> Fenomena "transaksi" institusional dapat dijelaskan dengan bantuan figur dibawah ini.

Bagan 1.5 Hubungan antara kondisi ekonomi dengan struktur institusi



Sumber : Daniel W. Brownly, *Economic interest and Institutions; Conceptual Foundations of Public Policy*. Basil Blackwell, Oxford, 1989, halaman 10

<sup>42</sup> *Ibid*,

<sup>43</sup> Daniel W. Brownly, *Economic interest and Institutions; Conceptual Foundations of Public Policy*. Basil Blackwell, Oxford, 1989, halaman 10

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 146



Adanya transaksi komersial internasional yang dijalankan oleh suatu negara berpengaruh terhadap ekonomi. Kondisi ekonomi baru yang tercipta dari transaksi ekonomi berpengaruh terhadap lembaga atau institusi ekonomi politik suatu negara. Kondisi ekonomi politik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang tercipta dari transaksi ekonomi. Perubahan institusi ekonomi politik menciptakan struktur institusi baru yang sesuai bagi transaksi ekonomi selanjutnya.

Dalam suatu negara yang sentralistik seperti Cina, maka setiap tindakan dari luar akan dipandang sebagai gangguan atas otonomi politik dan kebijaksanaan. Dalam proses pembuatan keputusan, aktor otonom mengkombinasikan informasi masa lalu hingga sekarang dan menggariskan yang oleh para pembuat keputusan itu dipandang memenuhi kepentingan organisasi yang diwakilinya. Tingginya tingkat transaksi yang diantara aktor-aktor dan tingginya derajat ketergantungan dalam kehidupan sosial, dan ekonomi masa kini, telah menunjukkan bahwa tidak ada aktor yang betul otonom.

Keseluruhan pembahasan ini membawa kepada paradoksial bahwa globalisasi dan modernisasi menimbulkan kecenderungan negara-bangsa untuk "membangkitkan" atau "membangkitkan".<sup>45</sup> Disadari atau tidak, negara sebagai entitas politik memiliki kecenderungan untuk mengambil bentuk yang lebih kecil. Hal ini karena globalisasi telah menimbulkan dua keadaan yang berbeda. Pertama, negara menghadapi masyarakat yang menyebar kearah global dan berakibat terhadap perubahan politik dalam negerinya. Secara esensial hal ini akibat respon terhadap tantangan peluang eksternal. Kedua, munculnya reaksi untuk memperkokoh jati dirinya sebagai bentuk penolakan terhadap penetrasi unsur asing. Sistem nasional mempunyai

Adanya transaksi komersial internasional yang dijalankan oleh suatu negara berpengaruh terhadap ekonomi. Kondisi ekonomi baru yang tercipta dari transaksi ekonomi berpengaruh terhadap lembaga atau institusi ekonomi politik suatu negara. Kondisi ekonomi politik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang tercipta dari transaksi ekonomi. Perubahan institusi ekonomi politik menciptakan struktur institusi baru yang sesuai bagi transaksi ekonomi selanjutnya.

Dalam suatu negara yang sentralistik seperti Cina, maka setiap tindakan dari luar akan dipandang sebagai gangguan atas otonomi politik dan kebijaksanaan. Dalam proses pembuatan keputusan, aktor otonom mengkombinasikan informasi masa lalu hingga sekarang dan menggariskan yang oleh para pembuat keputusan itu dipandang memenuhi kepentingan organisasi yang diwakilinya. Tingginya tingkat transaksi yang diantara aktor-aktor dan tingginya derajat ketergantungan dalam kehidupan sosial, dan ekonomi masa kini, telah menunjukkan bahwa tidak ada aktor yang betul otonom.

Keseluruhan pembahasan ini membawa kepada paradoksial bahwa globalisasi dan modernisasi menimbulkan kecenderungan negara-bangsa untuk "membangkitkan" atau "membangkitkan".<sup>45</sup> Disadari atau tidak, negara sebagai entitas politik memiliki kecenderungan untuk mengambil bentuk yang lebih kecil. Hal ini karena globalisasi telah menimbulkan dua keadaan yang berbeda. Pertama, negara menghadapi masyarakat yang menyebar kearah global dan berakibat terhadap perubahan politik dalam negerinya. Secara esensial hal ini akibat respon terhadap tantangan peluang eksternal. Kedua, munculnya reaksi untuk memperkokoh jati dirinya sebagai bentuk penolakan terhadap penetrasi unsur asing. Sistem nasional mempunyai

<sup>45</sup> Pengertian "kecil" atau "besar" disini namun dipahami sebagai bentuk kesolidan, persatuan, dan atas dasar kesamaan-kesamaan budaya didalam merumuskan otoritasnya politiknya.

<sup>45</sup> Pengertian "kecil" atau "besar" disini dimaksudkan bukan berarti dalam arti geografis atau namun dipahami sebagai bentuk kesolidan, persatuan, dan atas dasar kesamaan-kesamaan budaya didalam merumuskan otoritasnya politiknya.



untuk takut kehilangan jati diri. Bagi Cina, salah satu jati diri yang akan tetap dipertahankan adalah sistem ekonomi sosialisnya.

Disatu sisi, Cina sebelum tahun 1978 merupakan negara komunis yang membatasi arus globalisasi masuk kedalam negerinya. Kepentingan ekonomi tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari luar. Selama ini kepentingan ekonomi diartikulasikan sendiri oleh PKC dan pemerintah, sejak tahun 1950-an. Dilain hal, perkembangan ekonomi Cina setelah reformasi ekonomi tahun 1978 membawa perubahan yang signifikan. Dampak positif dari interaksi ekonomi internasional Cina berpengaruh terhadap reformasi, yaitu adanya desentralisasi. Keputusan yang diambil Cina adalah melakukan pengurangan kewenangan ekonomi dan perdagangan dimana otoritas tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah lokal.

Adanya globalisasi ekonomi telah menaikkan ongkos politik Autarki Cina hal ini memperbesar kemungkinan perubahan kebijaksanaan yang lebih mengadopsi pada kebutuhan ekonomi global. Kebijaksanaan desentralisasi sebagai respon globalisasi akhirnya dijalankan Cina. Kebijaksanaan ini tidak secara otomatis berhasil, untuk itu diperlukan dua hal yaitu : pertama, para pembuat kebijaksanaan haruslah mampu melengkapi kebijaksanaan desentralisasi ekonomi dengan tanggung jawab fiskal dan politis. Kedua, adanya desentralisasi ekonomi haruslah mampu memperkuat kemampuan perekonomian pemerintah lokal, kota dan daerah.<sup>46</sup> Berkenaan dengan transformasi itu, ada sejumlah pembaharuan dalam sistem perdagangan dan perekonomian Cina yang dilakukan untuk mengurangi pengawasan dan lebih menerapkan mekanisme pasar.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Asian Development Bank, *Loc. Cit*,

<sup>47</sup> Luo Zhaohung, "China's Economic Reform and Prospect for Economic Interaction: an East Asia Perspective" dalam Sueo Sekiguchi, *Economic Interactions and Interdependence in East Asia*, Ushiba Memorial Fund – Japan Center for International Exchange, Tokyo, 1994, halaman 93



para pemimpin atau pegawai pada tingkatan yang lebih rendah.<sup>51</sup> *Kedua*, kebijaksanaan desentralisasi baik administratif maupun ekonomi, dipicu adanya kebijakan modernisasi yang dikeluarkan Zhu Enlai (1973).<sup>52</sup> *Ketiga*, kebijaksanaan pintu terbuka dan empat modernisasi Deng yang mencantumkan desentralisasi administrasi dan pengelolaan perusahaan pemerintah. Keterbukaan tersebut telah memperluas tuntutan desentralisasi.<sup>53</sup>

Globalisme ekonomi menuntut pengurangan atas hambatan-hambatan dalam perdagangan atau perekonomian internasional yang akan mengorbankan otonomi domestik. Untuk itu diperlukan ruang dan pengorganisasian politik dalam negeri secara mendasar, dengan jalan melakukan reformasi ekonomi-politik. Dengan demikian, pengaruh globalisasi dalam sistem ekonomi internasional telah semakin jauh mencapai efek dalam politik dalam negeri.

Terdapat beberapa indikator yang merujuk adanya perubahan sebagai akibat dari pengaruh globalisasi ekonomi pada kebijaksanaan desentralisasi administrasi dan ekonomi yang dijalankan oleh Cina, yaitu :

1. penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan Cina
2. desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat-daerah
3. perubahan status struktur kepemilikan *State Owned Enterprise's (SOE's)*
4. otonomi kebijaksanaan perdagangan dan investasi luar negeri

Dari apa yang terangkum dalam pernyataan-pernyataan diatas, merujuk pada suatu preposisi dimana globalisasi ekonomi berpengaruh terhadap struktur ekonomi politik Cina, yaitu: *Pertama*, Kegagalan Mao dalam membangun ekonomi Cina menjadi latar belakang munculnya reformasi ekonomi politik yang menghasilkan perubahan konstitusi, desentralisasi dan terintegrasinya perekonomian Cina dalam ekonomi internasional. *Kedua*, Proses globalisasi ekonomi telah menciptakan

<sup>51</sup> Dalam hal ini penulis merujuk pada apa yang dikatakan oleh Jhu Wong dalam *Understanding China Society*, Times Accociated Press, halaman 13 bahwa kebijaksanaan desentralisasi pada era mao lebih menitikberatkan pada pembangunan desa dan sebagai insentif buruh industri yang bertujuan agar perekonomian Cina berkembang.

<sup>52</sup> Baca Charless Huss,Op, Cit, halaman 290-291



lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. *Ketiga*, globalisasi ekonomi memaksa suatu pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan global dan mengurangi otonomi dalam ekonomi makro.

Berdasarkan perumusan masalah yang dikaitkan dengan indikator-indikator yang digunakan untuk mengkaji pembahasan masalah dalam tulisan ini, maka penulis menarik suatu hipotesa sebagai berikut :

“ Adanya globalisasi ekonomi dan kegagalan Mao Zedong berpengaruh terhadap perubahan struktur politik domestik Republik Rakyat Cina yang menghasilkan kebijaksanaan desentralisasi administrasi dan ekonomi”.

### 1.6 Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, maka diperlukan suatu cara atau metode baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisa permasalahan untuk memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran suatu pernyataan disertai dengan dasar-dasar pemikiran terhadap obyek yang diteliti. Penerapan metode penelitian yang meliputi teknik pengumpulan data dan teknik penganalisaan data. Dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka berpikir dan data-data yang diperlukan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistematis, dan kronologis. The Liang Gie menyatakan :

“ Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data sedangkan pada akhirnya merupakan cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan yang dibuat gejala-gejala tersebut”.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Jhu Wong, *Op. Cit*, halaman 21-23

<sup>54</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984. halaman 49



Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian diskriptif analisis, yaitu pendekatan yang menuturkan dan menafsirkan gejala, peristiwa masa lampau untuk menentukan generalisasi dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan dimasa sekarang.

### 1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Baik buruknya hasil suatu penelitian tergantung kepada teknik-teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan reliabel.<sup>55</sup> Dalam kebanyakan penelitian dengan model deskriptif seperti ini, topik yang ada tidak mungkin bisa dikaji dengan metode survai. Oleh karena itu, data empiris yang berkaitan dengan persolalan tersebut diatas perlu diperoleh dari sumber-sumber sekunder. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, surat kabar, majalah<sup>56</sup> dan penelusuran data pada data base di internet yang sekiranya mendukung penulisan skripsi ini.

Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan studi perpustakaan pada lembaga-lembaga antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember, Jember
3. Perpustakaan Kedutaan Besar Cina di Jakarta
4. Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies di Jakarta
5. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia di Jakarta
6. Pusat Studi Cina pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Jakarta.

<sup>55</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reseach untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1995, halaman 89

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research, Jilid I*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1973, halaman 74



### 1.6.2 Metode Analisa Data

Analisa merupakan segenap rangkaian pembuatan pemikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat.<sup>57</sup> Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dalam usaha untuk menelaah permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan metode ini Winarso Surachmad berpendapat :

“ Pada umumnya persamaan sifat dari segala bentuk penyelidikan deskriptif ialah menuturkan dan menafsirkan data, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan yang nampak dan lain sebagainya. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu”.<sup>58</sup>

Untuk memperoleh hasil penelitian dan analisa yang baik, penulis menggunakan cara berfikir reflektif. Menurut Marzuki, metode reflektif adalah :

“ Proses berfikir yang dimulai dengan induktif untuk menunjukkan persoalan atau penetapan hipotesa kemudian diikuti dengan deduktif guna meletakkan kerangka atau jalan untuk membuktikan hipotesa yang dibuat itu. Selanjutnya hipotesa perlu diuji kebenarannya dengan induktif sehingga diperoleh pemecahan yang ko-inklusif”.<sup>59</sup>

Sedangkan cara berfikir induktif yaitu:

“ Aliran pemikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa (khusus) dan dari yang istimewa menetapkan yang umum”.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> The Liang Gie, *Op.Cit*, halaman 106

<sup>58</sup> Winarso Surachmad, *Pengantar Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1980, halaman 15

<sup>59</sup> Marzuki, *Metodelogi Riset*, Bagian Penerbitan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, halaman 7

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 22



Sedangkan cara berfikir deduktif menurut Mas' oed adalah :

“ Menarik dari prinsip yang umum dan menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah”<sup>61</sup>.

### 1.7 Pendekatan

Dalam usaha mempertajam analisa diperlukan suatu usaha pendekatan yang membuat penulisan lebih spesifik yang akan semakin memperjelas dari sudut mana suatu permasalahan ditelaah. Pendekatan merupakan kriteria untuk menyeleksi masalah data yang relevan, dengan kata lain pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang dikesampingkan<sup>62</sup>. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan *Scientific*, Pendekatan Induksionis, Pendekatan Ekonomi Politik, dan Pendekatan Desentralisasi. Pendekatan Induksionis dan Ekonomi Politik merupakan pendekatan operasional dalam menganalisa permasalahan yang ada.

#### 1.7.1 Pendekatan *Scientifik*

Penggunaan pendekatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa teori mengenai hubungan internasional haruslah merupakan upaya yang bersifat *scientific*, yaitu mempunyai pengertian yang bersifat konsisten, pasti, dan secara terpadu merupakan keterkaitan materi dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern. Dimana hal itu memberikan konsistensi pemikiran yang berlandaskan pada dasar-dasar filosofi ilmu pengetahuan.<sup>63</sup>

Penggunaan pendekatan *scientific approach* melalui tiga prosedur yang saling berkaitan, yaitu : pembentukan hipotesa yang bisa diuji kembali, pengujian hipotesa berdasarkan data-data yang dikumpulkan serta melakukan perbandingan dan

<sup>61</sup> Mochtar Mas' oed, *Op.Cit*, halaman 93

<sup>62</sup> Miriam Budiardjo, “Pendekatan Ilmu-ilmu Politik Bagian II”, dalam *Jurnal Ilmu Politik I*, 1992, halaman. 4

<sup>63</sup> Zainuddin Djafar, “Relevansi Perdebatan antar Pendekatan dalam Studi Hubungan Internasional”, dalam *Global, Jurnal Ilmu Politik*, No. 1, 1990, halaman 9



didunia dalam hal ekonomi, dimana masing-masing negara bertindak dengan memperhatikan negara lain.

### 1.7.2 Pendekatan Ekonomi Politik

Pendekatan ekonomi politik ini digunakan untuk menganalisis serangkaian interaksi internasional karena ketidakmampuan ilmu hubungan internasional dan ilmu ekonomi internasional sebagai suatu disiplin untuk menelaah kejadian-kejadian global secara parsial. Sebagaimana menurut Sudarsono,

“ Pendekatan ekonomi politik adalah suatu sintesa yang memadukan ilmu politik dan ilmu ekonomi kedalam suatu kerangka analisa yang menyeluruh”.<sup>65</sup>

Penggunaan pendekatan ini lebih cenderung pada usaha untuk memadukan antara “*rasionalisme ekonomi*” dengan “*kelayakan politik*”. Pendekatan ekonomi politik bukan untuk menunjukkan suatu teori tertentu, melainkan lebih pada penggolongan berbagai pendekatan yang secara tegas meneliti hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat dari Staniland, bahwa kita sebaiknya menggunakan istilah pendekatan ekonomi politik bukan untuk menunjukkan suatu pendekatan atau teori tertentu, melainkan untuk menggolongkan segala pendekatan yang secara tegas pula meneliti hubungan timbal balik antara ekonomi dengan politik.<sup>66</sup> Dilain pihak pendekatan ekonomi politik dapat dipandang sebagai kerangka konseptual, bahkan suatu teori, yang dapat berguna dalam upaya menganalisa tiap keadaan atau gejala sosial apapun dengan segala keistimewanya.<sup>67</sup>

Dalam pengertian umum, ekonomi politik internasional merupakan studi tentang hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional, bagaimana persoalan ekonomi seperti inflasi, defisit neraca perdagangan, penanaman modal

<sup>65</sup> Juwono Sudarsono, *Teori Pembangunan: Sebuah HimLauan untuk Pendekatan Ekonomi Politik*, dalam Prisma, No 1, Januari 1980, halaman 87

<sup>66</sup> Dwight Y. King, *Penelitian Empiris dan Pendekatan-pendekatan Ekonomi Politik*, dalam Prisma, No 3, tahun 1989, halaman 36

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 35



#### a. Liberalism

Dalam prespektif ini terdapat banyak aktor termasuk negara, pemilik perusahaan, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, yayasan pribadi dan lembaga swadaya masyarakat. Aktor-aktor tersebut bersikap rasional dan kalkulatif dengan obyek yang dituju misalnya eksekutif perusahaan menginginkan keuntungan, penguasa negara menginginkan keamanan dan pertumbuhan, kelompok pecinta lingkungan hidup ingin kelestarian lingkungan.<sup>70</sup>

#### b. Politik Dalam Negeri

Dalam prespektif ini, fokus ekonomi politik internasional adalah hubungan politik dalam negeri dengan sistem internasional. Di dalam ekonomi politik internasional terdapat hubungan-hubungan internasional yang menyatu dan berdampak pada struktur politik domestik dan kelompok-kelompok didalamnya.<sup>71</sup>

#### c. Reformism

Prespektif ini memandang bahwa aktor utama dalam perekonomian internasional adalah negara dan unit-unit transnasional, yang mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan global. Hubungan antara kepentingan ekonomi dan politik bersifat timbal balik. Bagi kaum reformis, perubahan dapat terjadi kearah perubahan struktur secara damai. Dalam hal ini mereka akan memanfaatkan kekuatan organisasi internasional untuk menekan munculnya perubahan, sehingga tiap negara berusaha memperjuangkan kepentingan kelompok negara-negara ekonomi lemah dalam forum internasional.<sup>72</sup>

Dari prespektif tersebut diatas maka dalam melihat hubungan antara sistem ekonomi internasional dengan struktur politik dalam negeri Cina, maka penulis menggunakan bauran antar berbagai prespektif guna mendukung pernyataan bahwa

---

<sup>70</sup> Steve Smith, Ken Booh, Marybis Zalewski ( eds.), *International Theory : Positivism and Beyond*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, halaman 110.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Mochtar Mas' oed, *Ekonomi Politik Internasional*, PAUS – UGM, Yogyakarta, 1990, halaman 25-39. dan Mochtar Mas' oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, halaman 19-30, dan *Majalah Prisma Fisip Unej*, No. x tahun 1994.



itu juga dapat melalui pembentukan administrasi pada tingkatan lokal atau daerah dengan kapasitas di bawah pengawasan kementerian pusat.

#### b. Delegasi

Delegasi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih luas dimana pemerintah pusat memindahkan tanggungjawab pembentukan keputusan administrasi fungsi-fungsi publik kepada organisasi-organisasi semi otonomi yang tidak sepenuhnya diawasi oleh pusat. Tanggung jawab yang diberikan kepada agen lokal dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat, pendelegasian tanggung jawab ini dilakukan saat mereka membentuk perusahaan-perusahaan publik atau badan-badan otoritas pelayanan distrik khusus, seperti badan pembangunan daerah. Pada umumnya, badan-badan atau organisasi-organisasi tersebut memiliki perjanjian khusus berkenaan dengan proses pembuatan kebijaksanaan yang dikeluarkan.

#### c. Devolusi

Devolusi merupakan bentuk desentralisasi dimana pemerintah pusat mengurangi fungsi-fungsinya. Pemerintah memindahkan otoritas pembuatan kebijaksanaan, keuangan, dan pengelolaannya kepada kuasa otonom yaitu pemerintah lokal, pada umumnya dengan status perusahaan. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan independensi otoritas membuat keputusan investasi.<sup>74</sup>

Kekurangan pendekatan desentralisasi yaitu :

- (a) Konsep ini masih mengandung ambiguitas dalam memanifestasikan keanekaragaman tema-tema, seperti *decontretation*, *devolution*, *delegation*,
- (b) Pendekatan desentralisasi selalu berlebihan dalam berasumsi pada satu sistematis atau menyimpang sehingga suatu perubahan yang berasal dari luar dan menghasilkan generalisasi yang salah akan berdampak salah pula. Sebagai contoh adalah hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kekhawatiran

---

<sup>73</sup> Joe Ho Chung, "Studies of Central-Provincial Relations in the People's Republic of China: a Mid Terms Appraisal" dalam *The China Quarterly*, no 142, 1995, halaman 492

<sup>74</sup> "Decentralization," dalam [www1.worldbank.org](http://www1.worldbank.org) didownload pada 31 Desember 2001



pemerintah lokal dalam mengimplentasikan kebijaksanaan yang seharusnya didasarkan pada empirisme dan bukan dari suatu asumsi yang sederhana.

- (c) Pendekatan ini pada umumnya cenderung menitikberatkan pada dinamisme fiskal jika anggaran belanja dan pendapatan menunjukkan setiap aspek dari hubungan antara pemerintah lokal dengan pusat. Bentuk anggaran belanja masih menjadi indikator yang kurang sempurna dalam melihat relativitas kekuasaan pusat dan daerah, sehingga akhirnya memerlukan perhatian yang terperinci pada bentuk-bentuk material informasi pusat dan kenyataan isu-isu yang ada.
- (d) Dalam mengadopsi pendekatan desentralisasi diperlukan bukti-bukti dan figur-figur pengaturan struktur khusus antar pemerintah pusat dan daerah, misalnya pengaturan dalam hal pembagian pendapatan, dan mencari dampak yang ditimbulkan dari beberapa pengaturan yang aktual dari interaksi kebijaksanaan pusat-daerah.<sup>75</sup>

Walaupun ada pendekatan struktural yang muncul untuk mengkonseptualisasikan hubungan pemerintah pusat-lokal sebagai suatu fungsi kelembagaan yang saling interaksi, namun demikian pengaturan hubungan pusat-lokal beserta persepsi daerah atas kepentingan daerah, memerlukan pendekatan baru. Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan pendekatan desentralisasi sebagai pilihan untuk mengurangi keragaman kepentingan yang ada. Selain itu, pendekatan desentralisasi ditujukan untuk menghindari kebijaksanaan yang keliru bagi pemerintah lokal dan untuk mengatur kebutuhan pemerintah lokal sendiri dengan berdasar pada situasi yang ada. Pendekatan desentralisasi juga meminimalkan konflik antar pemerintah pusat-daerah.

---

<sup>75</sup> Joe Ho Chung, *Ibid*, halaman 491



Desentralisasi mengubah hubungan antara pemerintah lokal-pusat karena,

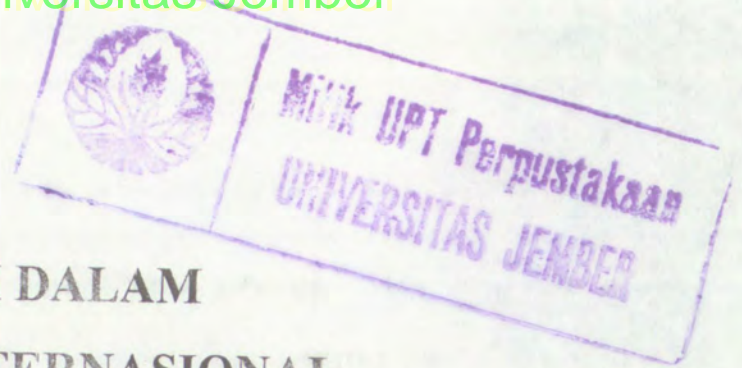
- (a) lemahnya pengawasan keuangan dari pusat kepada pemerintah lokal akibat berkurangnya ketergantungan terhadap pendapatan dan dana investasi;
- (b) semakin meningkatnya arti penting investasi lokal dan pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pendapatan;
- (c) munculnya orientasi lokal dari partai ataupun negara atas implementasi aktifitas ekonomi yang semakin meningkatkan pendapatan.<sup>76</sup>

Dengan demikian, melalui pendekatan-pendekatan ini dapat dilihat bagaimana globalisasi ekonomi berpengaruh terhadap reformasi ekonomi politik di Cina. Proses reformasi yang berkembang kemudian berusaha beradaptasi dengan lingkungan internasional, dalam kaitannya dengan hal itu Cina mengeluarkan kebijaksanaan desentralisasi sebagai *output* dari proses reformasi. Cina khususnya setelah tahun 1978, memiliki sejarah tentang bagaimana kekuatan ekonomi internasional telah memaksa mereka melakukan reformasi ekonomi politik sesuai dengan semangat globalisasi.

---

<sup>76</sup> Reitaku Jurnal halaman 108





## II. GLOBALISASI DALAM SISTEM EKONOMI INTERNASIONAL

### 2.1 Globalisasi

Globalisasi sangat populer didiskripsikan sebagai hilangnya batas-batas negara dan hambatan-hambatan dalam perdagangan antar negara (Kenichi Ohmae, 1995), namun juga dipandang sebagai berubahnya pola-pola tradisional dari produksi, investasi dan perdagangan internasional (Peter Dicken, 1995) dan terhubungkannya kepentingan-kepentingan bisnis dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang luas (Lester Brown, 1995; John Renesh, 1992). Globalisasi merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan multi lapis dan multi dimensi proses dan fenomena hidup yang sebagian besar didorong oleh Barat, dan khususnya oleh kapitalisme beserta nilai-nilai hidup dan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Globalisasi berarti saling terhubungkannya peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dilihat dari keluasan, kedalaman dan kecepatannya. Dengan demikian globalisasi merupakan gambaran dari proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Bumi dikatakan sebagai perkampungan global dalam arti hanya sebagian kecil saja penghuni planet ini yang mampu memelihara nilai-nilai tradisi, kebudayaan, kelembagaan, ritual dan simbol-simbol mereka, sedangkan yang lain terhanyut dalam arus global. Globalisasi dalam pengertian diatas membawa konsekuensi yang cukup rumit bagi setiap negara, terutama negara-negara berkembang sehingga perlu menjadi kajian yang komprehensif. Kajian tersebut meliputi beberapa sudut pandang kepentingan dan keilmuan sehingga diperoleh manfaat yang maksimal dan meminimalis kerugian, segi-segi positif bagi kepentingan global maupun kepentingan nasional dan memperkecil resiko.

<sup>1</sup> Dochak Latief, *Op. Cit*, halaman.21



Globalisasi ekonomi dimaksudkan sebagai proses terintegrasinya perekonomian negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, tergantung, dan pengaruh mempengaruhi sebagaimana menurut Hill,

“Globalisasi adalah proses semakin terinterdependensinya sistem ekonomi global dimana sebelumnya ekonomi nasional suatu negara masih terisolasi secara relatif, antara satu negara dengan negara lainnya dengan adanya berbagai macam hambatan dalam investasi dan perdagangan, jarak, ruang dan waktu, bahasa, dan perbedaan nasionalitas dalam regulasi pemerintahan, budaya, dan sistem bisnis”.<sup>2</sup>

Globalisasi ekonomi yang intensif berlangsung selama satu dekade terakhir ini berdampak pada munculnya kecenderungan globalisasi pasar dunia. Dengan terbentuknya pasar dunia ini, setiap negara atau perusahaan nasional tidak bisa menganggap pasar domestiknya sebagai captive market-nya. Terbentuknya pasar global ini telah memungkinkan para pemain dari seluruh dunia bebas bermain di pasar domestik dimana-mana.<sup>3</sup>

Globalisasi pasar hanyalah satu komponen dari globalisasi ekonomi selain globalisasi produksi. Globalisasi pasar adalah menyatunya perbedaan historis dan jarak diantara pasar-pasar nasional kedalam suatu pasar global yang sangat besar.<sup>4</sup> Globalisasi produksi diartikan sebagai pencarian sumber-sumber produksi baik untuk barang maupun jasa dari berbagai lokasi yang berbeda di seluruh dunia untuk mencapai keuntungan dari perbedaan nasional dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi,<sup>5</sup> atau menurut Kertawijaya pembentukan pasar global dapat memicu munculnya *global sourcing*.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah memungkinkan perusahaan dalam industri apapun untuk melakukan sourcing kepada pihak lain diseluruh dunia. *Global sourcing* ini mencakup semua aspek dalam *value chain*,

<sup>2</sup> Charles W.L. Hill, *Global Business Today, Second Edition* Mc Graw Hill Companies, Inc, New York, 2001, halaman 4.

<sup>3</sup> *Gamma* No 26 / II, 16-22 Agustus 2000

<sup>4</sup> Charles W. L. Hill, *Op cit*, halaman 6

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 7

<sup>6</sup> Kertawijaya, dalam *Gamma* No. 26 / II, 16-22 Agustus 2000



mulai dari sumber-sumber untuk mendapatkan bahan baku, menjalankan proses produksi, hingga pelepasan output ke pasar. Dalam kondisi semacam ini, negara yang tidak memiliki kekayaan ataupun fasilitas pabrikasi untuk suatu produk belum tentu tidak akan mempunyai posisi yang menentukan. Apabila mereka mempunyai keleluasan jaringan dan penguasaan teknologi, terutama teknologi informasi, mereka akan berperan aktif dalam *global sourcing* dan pasar global.

Perkembangan lain, perekonomian nasional setiap negara juga menghadapi kecenderungan bergesernya pasar dari pasar produk kepada pasar tenaga kerja dan akhirnya pasar finansial. Semula, para pelaku ekonomi di setiap negara melihat pasar secara sempit hanya sebagai pasar produk saja. Dengan semakin ketatnya persaingan, setiap negara juga merasa perlu memperebutkan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas di pasar tenaga kerja global. Pada tahapan selanjutnya manajemen juga perlu memperebutkan para investor guna mendapatkan modal yang semakin strategis fungsinya bagi kelangsungan perusahaan di negara tersebut maupun kestabilan makroekonomi.

Globalisasi mampu meningkatkan integrasi antara pasar domestik dengan pasar internasional. Banyak negara telah berjanji membuat pasar domestiknya memiliki keunggulan komparatif tersendiri dengan pasar domestik negara lain. Walaupun demikian, masih tetap dibutuhkannya harmonisasi menyangkut kebijaksanaan perdagangan dan investasi, termasuk dalam hal *legal system* yang terkait dengan transparansi dan *fairness*, lembaga keuangan, serta infrastruktur dan sumber daya manusianya. Tanpa adanya perhatian yang tepat atas hal-hal tersebut diatas, nantinya bisa menimbulkan hambatan bagi perkembangan dinamis sebuah perekonomian.



### 2.1.1 Faktor-faktor yang mendorong globalisasi

Kenichi Ohmae, merumuskan faktor-faktor yang mengaburkan batas-batas negara yang mendorong globalisasi, disebutkan sebagai 4 "I". Pertama, *Investasi*, adanya perkembangan pasar modal yang menjadikan negara-negara maju memiliki kelebihan modal untuk kemudian melakukan investasi secara meluas tanpa mengenal batas geografis. Sebagai akibatnya, pasar modal telah mengembangkan berbagai macam mekanisme untuk mentransfer melalui batas-batas negara. Kedua, *Industri*, dewasa ini orientasi industri telah menglobal sehingga strategi perusahaan multinasional modern tidak lagi dibentuk dan dikondisikan oleh alasan kenegaraan, melainkan dengan alasan keinginan dan kebutuhan pasar yang atraktif dimana saja dan untuk mencari sumber daya dimanapun. Ketiga, *Informasi*, bergerak masuknya investasi maupun industri sangatlah dipengaruhi oleh kemajuan dalam bidang informasi. Keempat, *Individual*, para konsumen secara individual juga mengalami perubahan orientasi kearah global, dengan akses yang lebih baik pada informasi dan atas gaya hidup yang ada diseluruh dunia.<sup>7</sup>

Secara garis besar, faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya globalisasi ekonomi adalah adanya penurunan hambatan perdagangan dan investasi internasional dan kemajuan teknologi yang begitu pesat.

#### a. Menurunnya hambatan-hambatan dalam perdagangan dan investasi

Perdagangan Internasional terjadi ketika perusahaan mengekspor barang atau jasa kepada pelanggan di negara lain, sedangkan investasi asing secara langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* terjadi ketika suatu perusahaan melakukan investasi dalam aktifitas bisnis yang berada diluar wilayah negaranya. Begitu banyak hambatan perdagangan internasional berupa penerapan tariff yang tinggi terhadap barang-barang manufaktur import. Tarif semacam ini ditujukan untuk melindungi perindustrian dalam negeri dari "persaingan asing", akan tetapi hal ini menimbulkan

---

<sup>7</sup> Kenichi Ohmae, "Berakhirnya Negara Bangsa, terjemahan Sunarto nDaru Mursito", dalam Jurnal Analisis CSIS tahun XXV No 2, 1996



fenomena “*beggary neighbour*”,<sup>8</sup> hal yang menyebabkan *great depression malaise* tahun 1930-an. Dari pengalaman ini beberapa negara industri Barat, memelopori terbentuknya GATT untuk menghilangkan hambatan demi kelancaran arus barang, jasa, dan modal. Kecenderungan ini sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1: Angka Rata-rata Tariff pada Barang Manufaktur dalam Bentuk Prosentasi dari Nilai

	1913	1950	1990	2000*
Perancis	21	18	5.9	3.9
Jerman	20	26	5.9	3.9
Itali	18	25	5.9	3.9
Jepang	30	-	5.3	3.9
Belanda	5	11	5.9	3.9
Swedia	20	9	4.4	3.9
Inggris	-	23	5.9	3.9
Amerika Serikat	44	14	4.8	3.9

Sumber: “Who Want to Be Giant?”, *The Economist*, June 24, 1995 halaman 3-4, dalam Charles W.L. Hill, *Global Business Today*, Second Edition, Mc Graw Hill, New York, 2001, halaman 9

Tabel 2.1 merangkum dampak dari persetujuan GATT sampai WTO terhadap angka tarif yang diterapkan pada barang-barang manufaktur. Sebagaimana yang terlihat ditabel tersebut, bahwa angka tarif mengalami penurunan yang cukup berarti semenjak tahun 1950-an dan berdasarkan perjanjian Uruguay, maka angka tersebut berhasil diturunkan hingga 3,9% pada tahun 2000.<sup>9</sup> Secara teoritis terdapat kemungkinan yang dapat menyebabkan naiknya perdagangan dan investasi internasional karena adanya kenaikan ketidakseimbangan produksi dalam suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan proses produksi yang signifikan dalam skala ekonomi dan pertumbuhan keseimbangan antar berbagai negara dalam hal produksi. Faktor produksi merupakan faktor internal yang dapat meningkatkan keuntungan dan investasi dalam perdagangan internasional.

<sup>8</sup> Suatu kebijakan dagang yang saling bermusuhan antar negara. Dimana negara-negara secara progressif saling menaikkan hambatan perdagangan anatara satu dengan yang lainnya, Charles W.L. Hill, *Op Cit*,

<sup>9</sup> Charles W. L. Hill, *Op cit*, halaman 8



## b. Kemajuan Teknologi

Meskipun sulit diukur, tempo perubahan sosial-ekonomi dan teknologi telah menjadi sangat pesat ini terbukti dengan perekonomian global berbasis pada teknologi tinggi dan informasi. Efektifitas ekonomi dan politik dipengaruhi aliran informasi, bagaimana menganalisisnya, memilah data-data yang penting dan berguna hanya untuk tujuan-tujuan yang telah didefinisikan dengan jelas. Sementara itu inovasi teknologi menjadi faktor kunci atau setidaknya-tidaknya merupakan faktor enzimatic atas aktifitas perekonomian yang solid. John Naisbit dalam “*Global Paradox*” (1994) menyatakan bahwa telekomunikasi merupakan kekuatan pendorong globalisasi ekonomi. Telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya menjadikan hubungan antar masyarakat dunia semakin dekat dan seakan-akan dunia ini mengecil dalam logika waktu. Kemajuan teknologi, khususnya perkembangan evolusioner dari komputer dengan adanya mikroprosesor, modem, dan jaringan telepon serta faksimil menjadikan kegiatan ekonomi semakin global. Peningkatan akses atas informasi, meningkatkan peluang bisnis, produksi, dan pasar yang mendasari globalisasi merupakan produk dari revolusi teknologi pada akhir abad XX.

Berpijak pada keunggulan produk dan manufaktur terhadap gaya hidup manusia, perkembangan inovasi adalah ditemukannya mikroprosesor yang memungkinkan pertumbuhan teknologi komputer dengan teknologi murah dan berenergi tinggi yang mampu meningkatkan penyerapan informasi.<sup>10</sup> Mikroprosesor menjadi pelopor kemajuan modern dibidang teknologi telekomunikasi. Komunikasi global telah berubah oleh pengembangan teknologi satelit, serat optik, dan teknologi tanpa kabel dengan munculnya *wide world web* (www) atau internet. Teknologi ini bergantung kepada mikroprosesor untuk mengirimkan informasi yang mengalir melalui arus elektronik. Sementara itu mengikuti Hukum Moore, yang meramalkan bahwa kekuatan dari teknologi mikroprosesor akan selalu bertambah dua kali lipat, setiap delapan bulan sekali sementara ongkos produksi akan semakin murah.

---

<sup>10</sup> C.Corsi, S.Kudrya, C.Cordone (ed), *From Control State to Free Global Market Economy*, Kluwer Academy Publisher, Dordrecht Nedtherland, 1997, halaman IX



#### d. Berubahnya Tata Ekonomi Internasional

Pada saat konferensi Bretton Woods diselenggarakan, para delegasi dari semua negara-negara Industri yang hadir, belum memikirkan kepentingan-kepentingan negara-negara miskin. Kondisi ini menjadikan kepentingan-kepentingan negara miskin tidak terakomodasi. Negara-negara miskin kemudian mengajukan perombakan tatanan ekonomi internasional yang baru. Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) diajukan pertama kali pada sidang khusus Majelis Umum PBB tanggal 9 April sampai dengan 3 Mei 1974.<sup>11</sup> Asas TEIB adalah keadilan, persamaan hak dan kedaulatan, dan saling adanya ketergantungan antar negara (interdependensi), kepentingan bersama dan kerjasama antar negara terlepas dari sistem ekonomi sosial yang berbeda.

Tujuan TEIB adalah untuk membetulkan keadaan yang tidak seimbang dan menghilangkan ketidakadilan yang masih berlaku, menghilangkan jurang pemisah antara negara maju dengan negara miskin. Untuk mewujudkan tujuan itu dilakukan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Perdagangan Internasional
2. Pemindahan dana yang riil untuk membiayai pembangunan di negara yang sedang berkembang dan pembaharuan Sistem Moneter Internasional
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Industrialisasi
5. Perombakan struktur sektor ekonomi-sosial sistem PBB.<sup>12</sup>

Sebelum TEIB dapat dilaksanakan, terdapat permasalahan ketidakadilan dalam perdagangan antar negara. Oleh karena itu, maka diperlukan pengaturan kembali kerangka kerja aturan main internasional, baik dibidang ekonomi maupun non ekonomi. Pada tahun 1976 sebuah tim yang diketuai Jan Tinbergen, ketua

---

<sup>11</sup> Dochak Latief, *Op Cit*, halaman 118

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 118-119



Kelompok Roma (*The Club of Rome*)<sup>13</sup> merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan Tatanan Internasional Baru (*Reshaping International Order, RIO*). RIO mempunyai cakupan lebih luas dibanding TEIB dan dilaksanakan untuk jangka menengah (1976-1985) dan untuk jangka panjang sampai akhir abad XX. RIO yang diusulkan tersebut meliputi hal-hal berikut ini:

1. Harus diadakan usaha yang intensif, terkoordinir, khususnya oleh negara-negara industri yang dapat meyakinkan pendapat umum dan dunia politik bahwa terwujudnya tata ekonomi dan sosial yang baru akan membawa keadilan bagi semua manusia.
2. Perombakan dalam sistem PBB agar PBB mampu menjadi instrumen internasional dibidang ekonomi politik yang mampu menjamin untuk semua pihak, diantaranya melalui demokratisasi dalam kinerja Dewan Keamanan PBB.
3. Agar keamanan dunia lebih meyakinkan, terutama menghindari resiko kehancuran akibat nuklir.
4. Agar dapat meletakkan dasar-dasar strukturisasi hubungan ekonomi antara negara dan dasar-dasar berbagai macam perjanjian internasional yang dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan dunia baru.
5. Agar setiap negara dapat berkuasa secara penuh atas sumber-sumber alam yang diwarisinya sehingga setiap negara dapat memberikan andil bagi terciptanya tatanan internasional yang lebih adil.<sup>14</sup>

*The regulatory framework* telah mengalami perubahan sebagai hasil dari berhasilnya putaran Uruguay yang pada akhirnya menciptakan WTO. Dalam *regulatory framework* yang baru tersebut terlihat semakin liberalnya aturan main yang ada. Hal ini merupakan adopsi dari jasa dan investasi langsung swasta.

---

<sup>13</sup> Kelompok Roma adalah suatu kelompok ahli dari berbagai bidang yang diambil dari banyak negara dan bersifat non government. Tim ini yang dipimpin oleh Jan Tinbergen di tahun 1976 membuat rumusan langkah-langkah untuk mewujudkan Tatanan Internasional Baru (*Reshaping International Order*) yang mempunyai cakupan lebih luas dari TEIB dan dilaksanakan berjangka menengah, 1976-1985, dan jangka panjang sampai akhir abad XX. Dochak Latief, *Op.Cit*, h121



skema perdagangan internasional. Keempat, terdapat lebih dari setengah wilayah belahan bumi ini dimana perekonomiannya adalah sistem perekonomian terpusat oleh Komunis, dan perdagangan internasional Barat tidak mampu menjangkau wilayah tersebut.<sup>15</sup>

Terdapat bukti yang menunjukkan adanya globalisasi ekonomi dalam sistem ekonomi internasional, yaitu Output dan perdagangan dunia dan meningkatnya arus investasi dunia.

a. Meningkatnya output dan perdagangan dunia.

Pada awal tahun 1960-an, AS menjadi kekuatan hegemon industri dunia. Pada tahun 1963 AS mampu menyumbang 40,3% dari output dunia namun pada tahun 1997, hanya menyumbang 20,8% (lihat tabel 2.2). Negara maju yang juga mengalami penurunan adalah Jerman, Perancis dan Inggris. Penurunan posisi AS, Jerman, Perancis, dan Inggris ini bukanlah merupakan penurunan absolut, hal ini karena negara-negara Asia mengalami pertumbuhan yang lebih cepat pada periode yang sama. *Output* dunia dari Jepang meningkat dari 5,5% menjadi 8,3%, sementara negara Asia lainnya juga mengalami peningkatan yaitu Cina, Thailand, Taiwan, Malaysia, dan Korea Selatan. Dari semua negara itu, Cina memiliki pertumbuhan industrialisasi yang tinggi. Pada akhir tahun 1980-an, posisi AS sebagai eksportir dunia terancam dengan munculnya Jepang, Jerman dan negara-negara NIC's seperti Korea Selatan dan Cina. Selama tahun 1960-an AS secara rutin mengisi 20% ekspor produk manufaktur dunia. Pada tabel 2.2 menunjukkan ekspor AS menurun 12% pada tahun 1998, walau menurun AS masih menjadi eksportir terbesar.

---

<sup>15</sup> Charles W. L. Hill, *Op Cit*, halaman 16



Tabel 2.2 Perubahan Output dan Perdagangan Dunia

Negara	Share Output Dunia, 1963	Share Output Dunia, 1997 <sup>⊗</sup>	Share Ekspor Dunia, 1998
Amerika Serikat	40,3 %	20,8 %	12,7 %
Jepang	5,5 %	8,3 %	7,26 %
Jerman *	9,7 %	4,8 %	10,0 %
Perancis	6,3 %	3,5 %	5,7 %
Inggris	6,5 %	3,2 %	5,1 %
Italia	3,4 %	3,2 %	4,5 %
Kanada	3 %	1,7 %	4,0 %
China <sup>⊗</sup>	N.A	11,3 %	3,4 %
Korea Selatan	N.A	1,7 %	2,45 %

Catatan : \* Figur Jerman 1963 dalam hal ini adalah Jerman Barat dahulu. <sup>⊗</sup> output dalam hal ini ditunjukkan dengan GNP. Perkiraan untuk tahun 1997 berdasar pada data statistik PIP ditambah dengan GNP untuk keanekaragaman harga (termasuk biaya hidup) antar negara. <sup>⊗</sup> Figur Cina dalam beberapa hal berbeda. Pada saat dihitung dengan menggunakan data GNP, share output dunia Cina hanya mencapai 3,1 % namun berdasarkan hitungan dengan dasar PPP, maka Cina memiliki share output dunia yang besar.

Sumber: Export data dari WTO, Annual Report, 1999 and statistics, 1996 (Geneva:WTO). World output data from CIA factbook, 1999, dalam Charles W. L. Hill, *Global Business Today, Second Edition*, Mc Graw Hill, New York, 2001 halaman 17

Pada tahun 1997 dan 1998, perekonomian Asia Pasifik dihantam krisis finansial dan memperlambat pertumbuhan dikawasan itu. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi yang besar masih bisa berkembang lagi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan penurunan secara relatif *output* AS dan negara-negara industri maju pada ekspor dunia, sementara pertumbuhan GDP dunia mencapai kira-kira \$ 29 trilyun pada tahun 1997, dan diperkirakan akan mencapai \$ 48 trilyun pada tahun 2010. Pertumbuhan di Asia mencapai kisaran antara 5,7% - 11,3% pada tahun 1995.<sup>16</sup> Negara-negara industri baru, seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Singapura memberikan kontribusi sebesar 25% dari GDP dunia pada dekade 1990-an, sementara pada dekade tahun

<sup>16</sup> Barbara parker, *Globalization and Business Practice; Managing Across Boundaries*, Sage Publication, London, 1998, halaman 13



1960-an hanya menyumbangkan 4% dari GDP dunia (Cristhoper Farrell, 1994). Pada tabel 2.3 dapat dilihat perkembangan ekonomi Asia, dimana pendapatan perkapita meningkat sebesar dua kali lipat selama sepuluh tahun bagi Cina dan sebelas tahun untuk Korea Selatan.<sup>17</sup>

Tabel 2.3 Pertumbuhan GDP Asia (persen per tahun)

Nation	1970-1979	1980-1989	1990-1996	1997	1998
Hongkong	9.2	7.5	5.0	5.4	2.1
Singapore	9.4	7.2	8.3	7.4	3.0
Taiwan	10.2	8.1	6.3	6.6	4.0
South Korea	9.3	8.0	7.7	5.8	1.0
Malaysia	8.0	5.7	8.8	7.4	0.2
Thailand	7.3	7.2	8.6	0.9	-4.1
Indonesia	7.8	5.7	7.2	6.3	-7.5
China	7.5	9.3	10.1	9.3	8.7
Phippines	6.1	1.3	2.8	4.9	2.0
Industrial Coutries	3.4	2.6	2.0	2.9	3.2-4.0

Sumber: Barbara Parker, *Globalization and Business Practice; Managing Across Boundaries*, Sage Publication, London, 1998, halaman 14

*Gross Domestic Product* dunia diperkirakan berjumlah sekitar \$29 milyar pada tahun 1997 dan berkembang sebesar 2-4% sampai tahun 2000. Pada tahun 1993, tiga kekuatan ekonomi dunia yaitu Jepang, Eropa barat, dan Amerika Utara menyumbangkan 65% dari GDP dunia. Walaupun demikian pada tahun 2010 diperkirakan kontribusi mereka terhadap GDP dunia akan berkurang hingga mencapai 55%. Hal ini karena pertumbuhan industri yang relatif stabil di negara-negara tersebut. Pada tahun 1994, perekonomian dari ketiga wilayah tersebut akan berkurang sebesar 3%, dimana Jepang akan mengalami penurunan sebesar 8%, dan Kanada 4,3%. Hal yang berlawanan terjadi di Asia yang justru memiliki pertumbuhan GDP tinggi antara 5-11% pada tahun 1994-1996. Sejak tahun 1997 beberapa negara di

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 14

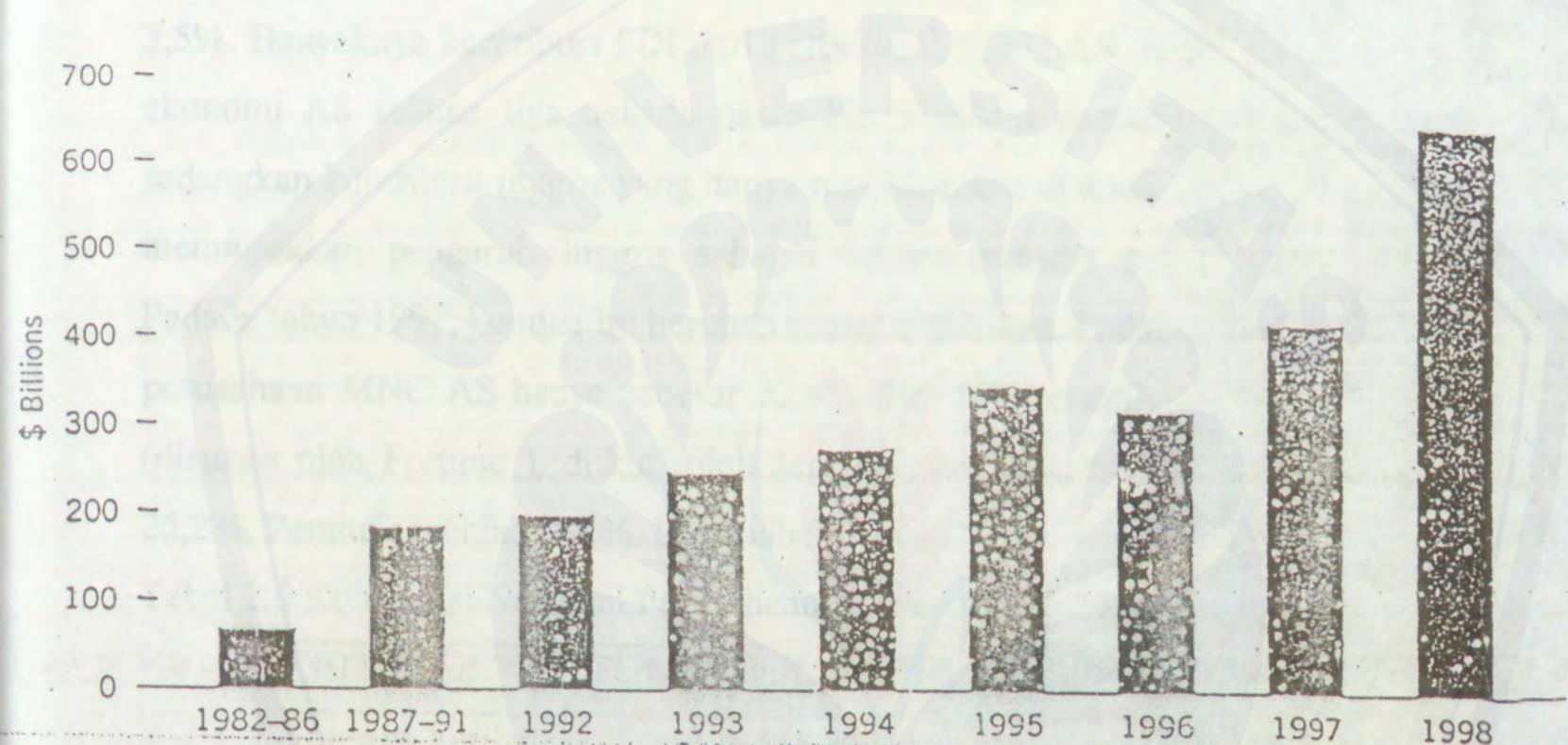


wilayah tersebut pertumbuhannya menurun, seiring krisis ekonomi yang menghantam kawasan tersebut seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

#### b. Meningkatnya Investasi Langsung Luar Negeri

Pasar modal selama 20 tahun terakhir juga berkembang secara global. Tiga hal yang menjadi faktor revolusi pasar modal dunia sehingga mengalami perluasan adalah: deregulasi pasar modal dan finansial oleh pemerintah; meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan dunia; inovasi teknologi.<sup>18</sup>

Bagan 2.2 Aliran Keluar FDI, 1982-1998 (dalam \$ Milyar)



Sumber: Charles W. L. Hill, *Global Business Today, Second Edition*, Mc Graw Hill, New York, 2001 halaman 194

Aliran FDI mengalami pertumbuhan rata-rata yang meningkat dari \$25 milyar pada tahun 1975 menjadi \$ 644 milyar pada tahun 1998 (lihat Bagan 2.2 berikut ini).<sup>19</sup> Pada akhir tahun 1980-an, rata-rata aliran modal internasional meningkat sampai \$ 600 juta per tahun.<sup>20</sup> Pada tahun 1997 stok global meningkat sebesar \$ 3,5

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 12

<sup>19</sup> Charles W.L. Hill, *Op Cit*, halaman 193,

<sup>20</sup> Helen V. Milner dan Robert O. Keohane, *Op.Cit*, halaman 13



Trilyun.<sup>21</sup> Pada tahun 1979 transaksi internasional tahunan mencapai kira-kira \$ 75 juta, sedangkan pada tahun 1990 menjadi \$ 1500 juta.<sup>22</sup>

Dominasi AS terlihat dari besarnya FDI yang masuk dari AS selama periode tahun 1970-an, Perusahaan AS begitu mendominasi dalam aktifitas ekonomi global dan pertumbuhan FDI dunia pada tahun 1960-an - tahun 1970-an tercatat bahwa 178 perusahaan MNC dunia dari 382 adalah perusahaan yang berbasis di AS sementara Inggris hanya menyumbang 40 perusahaan.<sup>23</sup> Pada tahun 1973 kontribusi perusahaan MNC AS memberikan kontribusi sebesar 48,5 %, Inggris 18,8% dan Jepang hanya 3,5%. Banyaknya kontribusi FDI dari perusahaan MNC AS menunjukkan dominasi ekonomi AS selama tiga dekade pasca PD II dalam perekonomian internasional, sedangkan kontribusi Inggris yang hanya mendominasi di awal dekade tahun 1920-an menunjukkan pengaruh Inggris sebagai negara industri pasca revolusi industri. Pada tahun 1997, kondisi ini berubah secara signifikan. Pada tahun tersebut, jumlah perusahaan MNC AS hanya sebesar 32,4% dari 500 perusahaan MNC besar dunia (disusun oleh Fortune ), diikuti oleh Jepang yang terus meningkat hingga sebesar 25,2%, Perancis menjadi 8,4%. Lihat tabel berikut :

Tabel 2.4 Komposisi Nasional Perusahaan Multinasional, 1973-1997

Asal Negara	Terbesar dari 260 (1973)	Terbesar dari 500 (1997)
Amerika Serikat	126 (48,5%)	162 (32,4%)
Jepang	9 (3,5)	126 (25,2%)
Inggris	49 (18,8)	34 (6,8%)
Perancis	19 (7,3%)	42 (8,4%)
Jerman	21 (8,1%)	42 (8,2%)

Sumber : Charles W. L. Hill, *Global Business Today, Second Edition*, Mc Graw Hill, New York, 2001 halaman 194 ,hal 20

<sup>21</sup> Charles W.L. Hill, *Op Cit*, halaman 193

<sup>22</sup> Helen V. Milner dan Robert O. Keohane, *Loc. Cit*,

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 198



Selama tahun 1985-1990 kontribusi FDI AS menurun ke posisi tiga dibawah Jepang dan Inggris setelah kontribusinya menurun hingga tinggal 27% dari total sumber FDI dunia atau hanya sekitar \$ 114,5 milyar pada tahun 1997. Naiknya share FDI dari Jepang selama dekade tahun 1980-an dan dekade 1990-an menunjukkan kekuatan perekonomian Jepang selama periode tersebut.<sup>24</sup>

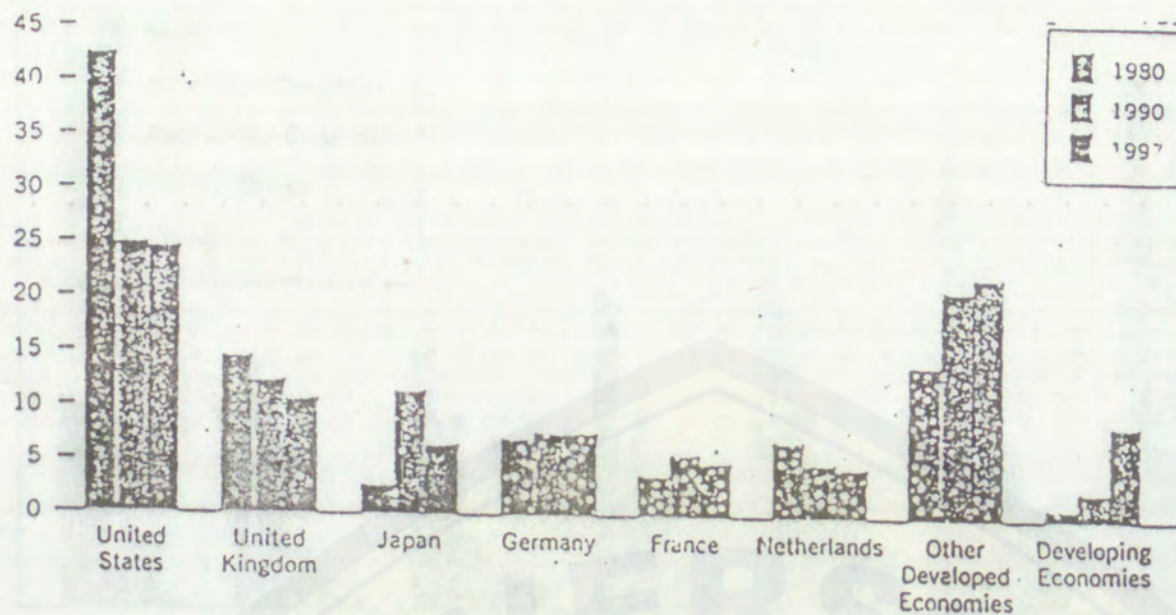
Berdasarkan pada bagan 2.3 adanya perubahan FDI dari tahun 1980-1997 dalam prosentase pada perusahaan-perusahaan AS, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis dan Belanda yang merupakan enam sumber investasi utama dari FDI dunia. Jumlah keseluruhan dari FDI yang mengacu pada nilai kumulatif dari nilai investasi asing atau yang disebut sebagai *Stock of FDI*. Bagan 2.4 menunjukkan jumlah *stock of FDI* dari perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang, dan sebagaimana terlihat dari bagan bahwa nilai total yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan AS mengalami penurunan dari sekitar 44% pada tahun 1980-an menjadi 25% pada tahun 1997. Sebaliknya terjadi peningkatan oleh perusahaan-perusahaan dari Jepang, Perancis, beberapa negara maju lainnya dan beberapa negara berkembang. Peningkatan yang dicapai oleh negara-negara berkembang mencerminkan adanya perkembangan perusahaan di negara tersebut. Pada tahun 1997 perusahaan yang ada di negara-negara berkembang mengisi sekitar 9,7% dari *stock of FDI* atau naik sebesar 1,2% dari tahun 1980.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 20



Bagan 2.3 Presentase dari Total Stok FDI, 1980-1997

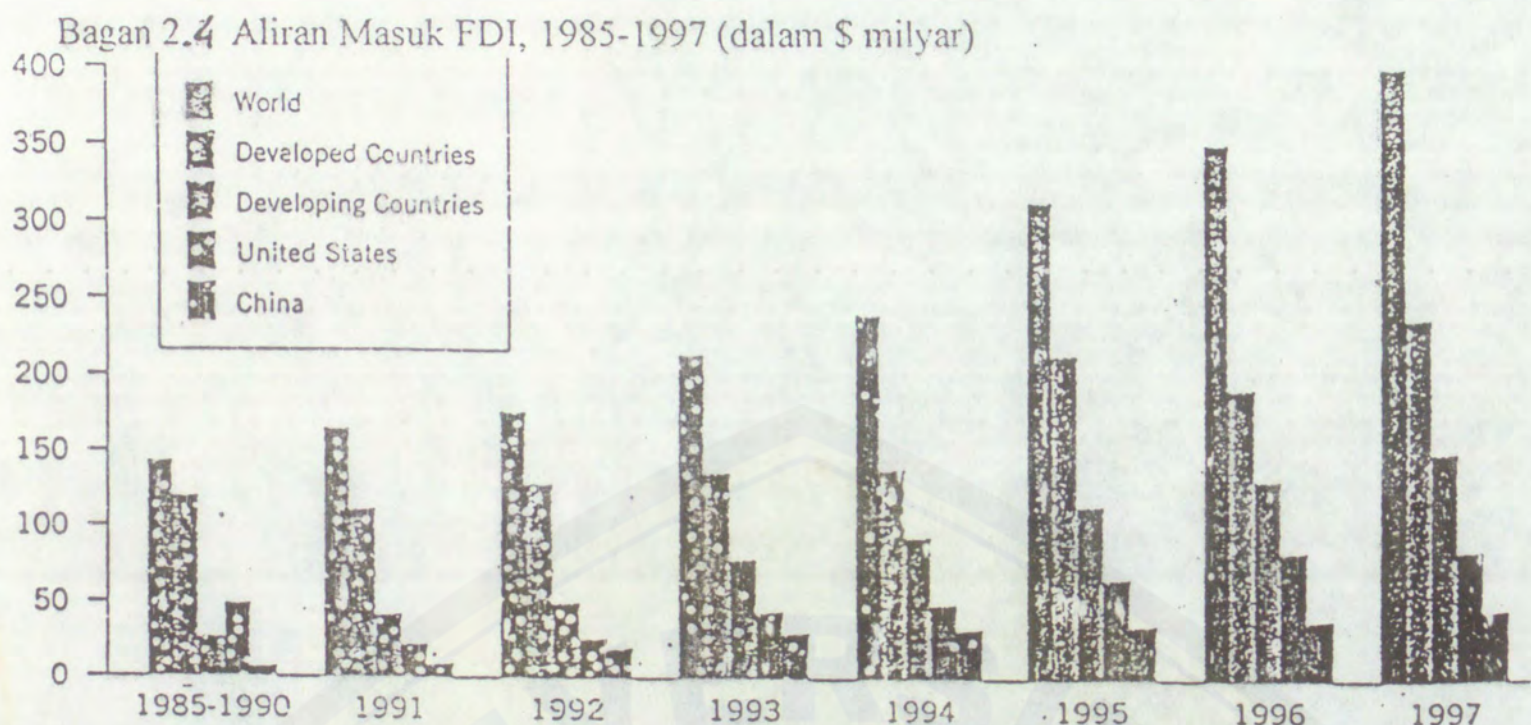


Sumber: World Investment Report, 1998 (New York: United Nations, 1998) dalam Charles W. L. Hill, *Global Business Today, Second Edition*, Mc Graw Hill, New York, 2001 halaman 19

Globalisasi ekonomi (juga) memberikan dampak positif terhadap volume penerimaan FDI, bukan hanya membuat aliran masuk FDI meningkat dengan cepat namun juga menjadikan arus masuk FDI sebagai hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pada umumnya, arus masuk FDI berasal dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang di dunia dengan tingkat investasi yang menguntungkan dalam bentuk firma-firma. Amerika Serikat sendiri selalu menjadi tempat favorit bagi masuknya arus FDI, kecenderungan ini terus berlangsung sampai tahun 1997 dimana tercatat sekitar \$ 90, 7 milyar telah di investasikan di negara tersebut (lihat tabel 2.4). Besarnya negara dan pasar domestik AS yang sehat, dinamis dan stabilitas ekonomi merupakan lingkungan yang menarik bagi investasi asing. Para investor pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis di Inggris, Jepang, Jerman, Belanda dan Perancis. Sementara negara-negara yang sedang berkembang juga mencatat arus masuk FDI dengan share yang besar pula, sejak tahun 1981 hingga tahun 1990 tercatat arus masuk FDI sebesar \$ 27,4 milyar pertahun.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 19





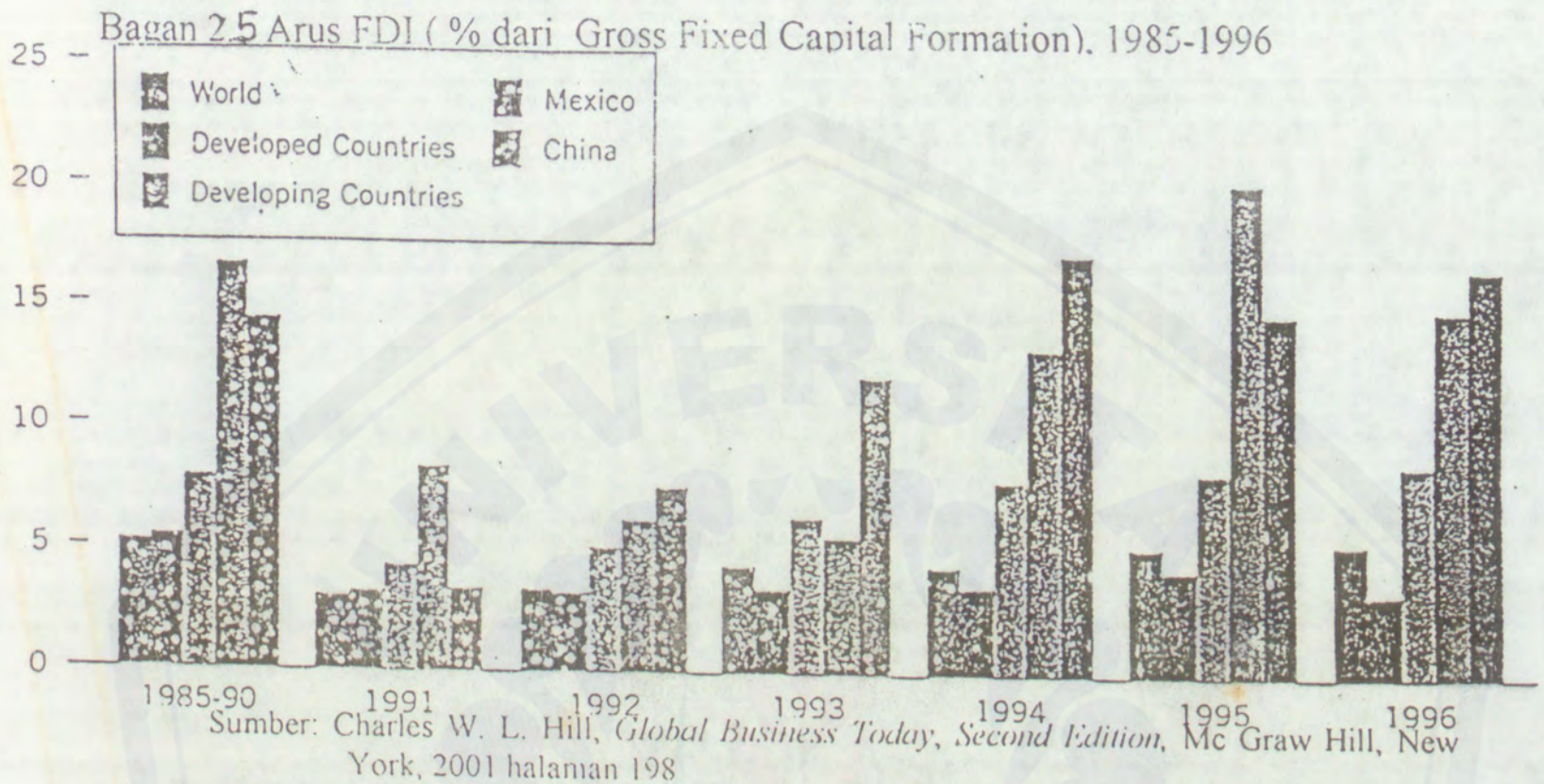
Sumber: United Nations, *World Investment Report 1997*, (New York: United Nations, 1997). United Press Release, November 8, 1998 untuk data tahun 1997. dalam Charles W. L. Hill, *Global Business Today, Second Edition*, Mc Graw Hill, New York, 2001 halaman 20

Diantara negara-negara berkembang, negara-negara di kawasan Asia Selatan, Timur, dan Tenggara merupakan negara-negara yang paling menarik untuk investasi. Cina merupakan penerima terbesar arus masuk FDI dalam beberapa tahun terakhir. Sementara prioritas berikutnya adalah negara-negara di kawasan Karibia dan Amerika latin, dan kawasan Afrika masih jauh sebagai tempat yang baik untuk investasi. Jumlah seluruh investasi dikawasan Afrika adalah \$ 3 milyar atau sejumlah investasi yang diperoleh Malaysia pertahunnya pada tahun 1990-an.

Negara-negara berkembang menerima kurang lebih 40% dari total aliran masuk FDI antara tahun 1992-1994, terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan perolehan kawasan tersebut pada tahun 1980-an yang hanya mencapai 23% dari total FDI dunia. Peningkatan ini terjadi karena FDI yang masuk di kawasan itu pada tahun 1991 sampai 1994 meningkat rata-rata sebesar 21%, sementara FDI yang masuk ke AS dan enam negara industri lainnya hanya mencapai 8%. Dengan peningkatan FDI tersebut, menunjukkan bahwasanya negara-negara berkembang mengalami kegiatan perekonomian yang aktif. Berdasarkan pada Bagan 2.5 berikut ini akan terlihat bahwasanya sampai akhir tahun 1996 pertumbuhannya hanya mencapai 5,6%. Pada



tahun 1996 aliran masuk FDI ke Cina mencapai 17 % dari semua *Gross Fixed Capital Formation*, dibandingkan dengan AS yang hanya 7%. Hal ini menunjukkan bahwa FDI lebih penting sebagai sumber investasi modal di Cina daripada di AS, meskipun AS mencatatkan arus masuk FDI yang terbesar.<sup>26</sup>



## 2.2 Republik Rakyat Cina dalam Perekonomian Global

### 2.2.1 Cina sebagai Negara Berkembang di Asia Pasifik

Untuk tujuan operasional dan analisa, Bank Dunia membuat kriteria pengklasifikasian status ekonomi berdasarkan *Gross National Income, GNI*. Berdasarkan GNI perkapita, ekonomi suatu negara dimasukkan dalam kelas-kelas perekonomian berpendapatan rendah, menengah yang disubklasifikasi menjadi menengah kebawah dan menengah keatas, serta perekonomian berpendapatan tinggi. Suatu negara yang dimasukkan dalam kelas berpendapatan rendah atau menengah biasanya berasal dari negara berkembang, walaupun tidak semua negara berkembang

<sup>26</sup> Gross Fixed Formation, merupakan jumlah modal yang diinvestasikan ke dalam pabrik-pabrik, bangunan-bangunan kantor, dan sebagiannya yang dapat digunakan untuk melihat betapa pentingnya aliran masuk FDI dalam perekonomian. Ibid, halaman 197



masuk dalam kelas ini seperti Korea Selatan, dan Taiwan. Ukuran bagi pengklasifikasian ini adalah sebagai berikut, status negara berpendapatan rendah apabila GNI perkapita pertahunnya pada tahun 2000 lebih rendah dari \$ 755 atau kurang dari itu, status menengah kebawah antara \$ 756 - \$ 2.995, status menengah keatas antara \$ 2.996 sampai \$ 9.265, sementara klasifikasi untuk status berpendapatan tinggi apabila lebih dari \$ 9.266. Berdasarkan pembagian tersebut, status ekonomi Cina termasuk ke dalam negara-negara berkembang yang terletak di Asia Timur Pasifik.

Tabel 2.5 Negara-negara Berkembang di Kawasan Asia Timur dan Pasifik.

American Samoa	Korea, Dem. Rep.	Mongolia	Solomon Islands
Cambodia	Korea, Rep	Myanmar	Thailand
China	Lao PDR	Palau	Tonga
Fiji	Malaysia	Papua New Guinea	Vanuatu
Indonesia	Marshall Islands	Philippines	Vietnam
Kiribati	Micronesia, Fed. Sts	Samoa	

Sumber : [www1.worldbank.org](http://www1.worldbank.org) data didownload pada 31 Desember 2001

Tabel 2.6 Negara-negara Berpendapatan Rendah Kebawah

Albania	Egypt, Arab Rep.	Lithuania	Sri Langka
Algeria	El Salvador	Macedonia, FYR	St. Vincent and the Grenadines
Belarus	Equatorial Guinea	Maldives	Suriname
Belize	Fiji	Marshall Islands	Swaziland
Bolivia	Guatemala	Micronesia, Fed. Sts.	Syrian Arab Republic
Bosnia-Herzegovina	Guyana	Marocco	Thailand
Bulgaria	Honduras	Namibia	Tonga
Cape Verde	Iran, Islamic Rep.	Papua New Guinea	Tunisia
China	Iraq	Paraguay	Turkmenistan
Colombia	Jamaica	Peru	Vanuatu
Cuba	Jordan	Philippines	West Bank and Gaza
Djibuti	Kazakhstan	Romania	Yugoslavia,
Dominican Republic	Kiribati	Russian Federation	
Ecuador	Latvia	Samoa	

Sumber : [www1.worldbank.org](http://www1.worldbank.org) data didownload pada 31 Desember 2001



Partisipasi Cina dalam perdagangan internasional mengalami perkembangan. Selama periode tersebut, proporsi perdagangan Cina mengalami peningkatan dari 0,6% pada tahun 1977 menjadi 2,5 % pada tahun 1993 dari seluruh perdagangan dunia. Hal ini menempatkan Cina pada posisi ke-11 dari negara-negara yang melakukan perdagangan dunia. Pada tahun 1999, Cina menempati ranking ke-9 perdagangan dunia (tabel 2.8 berikut).

Pada tahun 1995, pendapatan atau GDP Cina menempati ranking ke-9. Berdasarkan data yang disusun oleh majalah Forbes, pada tahun 1996 (tabel 2.5).

Tabel 2.8 Nilai Impor dan Ekspor Cina dalam Ranking 9 Perdagangan Dunia, 1999 (dalam \$100 Juta)

Country(region)	Import and Export			Export			Import		
	No.	1999	Growth Rate%	No.	1999	Growth Rate%	No.	1999	Growth Rate%
U.S.A	1	17,549	8.0	1	6,950	1.8	1	10,599	12.5
Germany	2	10,131	0.0	2	5,405	-0.4	2	4,726	0.4
Japan	3	7,271	8.8	3	4,175	7.6	4	3,096	10.4
U.K.	4	5,891	0.2	5	2,684	-1.6	3	3,207	1.7
France	5	5,850	-1.6	4	2,990	-2.1	5	2,860	-1.2
Canada	6	4,588	8.6	6	2,386	11.3	7	2,202	5.8
Italy	7	4,468	-2.5	7	2,308	-4.7	6	2,160	0.1
Netherlands	8	3,931	6.7	8	2,041	1.5	8	1,890	12.9
P.R.C.	9	3,607	11.3	9	1,949	6.1	11	1,658	18.3
Hongkong	10	3,543	-1.4	11	1,748	0.0	9	1,795	-2.8
Belgium-Luxemburg	11	3,535	2.4	10	1,841	3.0	10	1,694	1.7
Mexico	12	2,849	14.8	13	1,367	16.3	12	1,482	13.5

Sumber : [www.moftec.gov.cn](http://www.moftec.gov.cn) data didownload pada 28 November 2001



Tabel 2.9 Daftar 10 Besar Dunia Pendapatan Ekonomi, 1995.

	Negara	GDP (\$ Milyar)
1.	Amerika Serikat	6.648.013
2.	Jepang	4.590.971
3.	Jerman	2.045.991
4.	Perancis	1.330.381
5.	Italia	1.024.634
6.	Inggris	1.017.306
7.	Brazil	554.587
8.	Kanada	542.954
9.	Cina	522.172
10.	Spanyol	482.841

Sumber: Barbara Parker, *Globalization and Business Practice; Managing Across Boundaries*, Sage Publication, London, 1998, halaman 14

Reformasi ekonomi Cina mengubah komposisi komoditas perdagangan. Pada Tabel 2.10 diketahui antara tahun 1980–1992, komposisi ekspor Cina berubah dimana perdagangan industri ringan meningkat dari 16% menjadi 40%. Di lain pihak, impor perlengkapan modal meningkat dari 25% menjadi 39% pada akhir periode tersebut.

Tabel 2.10 Transformasi Komposisi Komoditas Ekspor Impor Cina

COMMODITY	EXPOR		IMPOR	
	1980	1992	1980	1992
Food and live animals	0.15	0.10	0.15	0.04
Beverage and Tobacco	0.00	0.01	0.00	0.01
Crude material, inedible, except fuels	0.09	0.04	0.18	0.06
Minerals fuels, Lubricant, and related materials	0.21	0.06	0.01	0.04
Animal and Vegetables Oils, Fat, and Waxes	0.00	0.00	0.01	0.01
Chemical and related products	0.06	0.05	0.10	0.13
Manufactured goods	0.20	0.19	0.25	0.25
Machinery and Transport Equipment	0.03	0.15	0.25	0.39
Miscellaneous manufactured articles (include Textile and apparel)	0.16	0.40	0.03	0.08
Others	0.09	0.01	0.01	0.01
TOTAL	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: Statistic Canada, World Trade Database, 1980 – 1992, dalam Marcus Noland, *China and The International Economics System, Working Paper 95-96*, pada *The International Conference on Sino-American Economic Relation, Centre for Asian Pacific Studies*, Lingnan College, Hongkong, 21-23 Juni 1995. Didownload dari www. Pada 31 Desember 2001



Neraca perdagangan Cina-AS mengalami surplus, lihat tabel 2.11 berikut. Pertumbuhan surplus perdagangan Cina-AS dapat dijelaskan sebagai fungsi dari relokasi produksi, dari Hongkong dan Taiwan yang terjadi beberapa tahun lalu.

Tabel 2.11 Neraca Perdagangan AS-Cina, berdasarkan daerah ekonomi (dalam US\$ Milyar)

Tahun	Total	Cina	Hongkong	Taiwan
1987	-25.9	-2.8	-5.9	-17.2
1988	-20.6	-3.5	-4.6	-12.6
1989	-22.6	-6.2	-3.4	-13.0
1990	-24.4	-10.4	-2.8	-11.2
1991	-23.7	-12.7	-1.1	-9.8
1992	-28.4	-18.3	-0.7	-9.3
1993	-31.4	-22.8	0.3	-8.9
1994	-37.4	-29.5	1.7	-9.6

Note : *Customs Valuation*

Sumber: Marcus Noland, " Implication of Asian Economic Growth", *Asia Pasific Economic Cooperation Working Paper Series, Number 94-95*, Washington : Institute for International Economics. Dalam Marcus Noland, *China and The International Economics System, Working Paper 95-96*, pada *The International Conference on Sino-American Economic Relation, Centre for Asian Pasific Studies, Lingnan College, Hongkong, 21-23 Juni 1995*. Didownload dari [www](http://www). Pada 31 Desember 2001

Total perdagangan antara Cina dengan AS meningkat dari \$4,8 milyar pada tahun 1980 menjadi \$ 75,4 milyar pada tahun 1997 dan pada tahun 1999 menjadi \$ 94,9 milyar. Hubungan perdagangan yang demikian itu menempatkan Cina sebagai rekan dagang terbesar AS ke 4. Cina bertindak sebagai suplayer pasar AS melalui keragaman barang-barang konsumen dengan ongkos yang rendah, sementara Cina merupakan pembeli produk industri teknologi berat AS seperti pesawat terbang, pupuk dan mesin-mesin berat.

Pada tahun 1997 impor AS dari Cina senilai \$ 62,6 milyar sementara ekspornya hanya senilai \$ 12,8 milyar. Pada tahun 1999 impornya meningkat menjadi \$ 81,8 milyar dan ekspor AS ke Cina hanya naik menjadi \$ 13,1 milyar. Neraca perdagangan defisit bagi AS terhadap Cina sebesar \$ 50 milyar pada tahun 1997 dan \$ 69 milyar pada tahun 1999. Para pejabat AS berusaha memfokuskan pertumbuhan ekspornya pada tingkat mendatar sebagaimana pada beberapa tahun sebelumnya,



yaitu sebesar 20% pada tahun 1995, 1996 dan 6,7 % pada tahun 1997; selain itu pemerintah AS juga mengklaim bahwa Cina meningkatkan hambatan-hambatan dan restriksi-restriksinya dalam perdagangan sehingga menghambat pertumbuhan ekspor AS ke Cina, dilain pihak pemerintah Cina juga menyalahkan AS karena adanya pengawasan ekspor yang dilakukan AS sebagai sumber utama menurunnya nilai ekspor AS ke Cina<sup>27</sup>.

Pada tabel 2.12 di bawah ini terlihat neraca perdagangan bilateral AS-Cina, dimana pada tabel tersebut ditunjukkan perbedaan hitungan besarnya neraca perdagangan antara kedua negara tersebut. Berdasarkan angka neraca perdagangan yang dikeluarkan oleh AS, defisit perdagangan AS dengan Cina adalah sebesar \$ 56,9 milyar, sementara berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Cina, defisit perdagangan AS terhadap Cina hanya sebesar \$ 21,1 milyar. Menurut Profesor Lawrence Lau dari Universitas Stanford, menyatakan bahwa kedua angka tersebut sama-sama tidak akurat. Hal ini karena angka-angka dalam figur impor memasukkan ongkos pengangkutan kapal dan juga biaya asuransi, sementara dalam figur ekspor tidak memasukkan ongkos-ongkos tersebut. Di sisi lainnya, angka-angka tersebut tidak mencatatkan kenyataan dari besarnya porsi perdagangan AS-Cina atas biaya pengkapalan yang melewati Hongkong sebagai sumber terjadinya penambahan ongkos dan juga tidak mencakup catatan berkenaan kegiatan penyelundupan di Cina sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka defisit perdagangan antara AS-Cina diperkirakan hanya mencapai \$ 36 milyar, dengan demikian disimpulkan bahwa defisit yang ada sekitar \$ 30 milyar.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wayne Morrison, *Op Cit.*

<sup>28</sup> PM. Zhu Rongzi, *speech on MIT.*



Tabel 2.12 Neraca Perdagangan AS – Cina, data dari AS. (dalam US\$ Milyar )

Tahun	Ekspor	Impor	Defisit
2001*	13.998,10	75.174,60	- 61.176,50
2000	16.185,30	100.018,40	- 83.833,10
1999	13.111,00	81.788,20	- 68.677,20
1998	14.241,30	71.168,70	- 56.927,40
1997	12.862,30	62.557,60	- 49.695,30
1996	11.992,60	51.512,60	- 39.520,00
1995	11.753,60	45.543,20	- 33.789,60
1994	9.281,80	38.786,70	- 29.504,90
1993	8.762,80	31.539,90	- 22.777,10
1992	7.418,40	25.727,60	- 18.309,20
1991	6.278,30	18.969,00	- 12.690,70
1990	4.806,40	15.237,30	- 10.430,90
1989	5.755,40	11.989,90	- 6.234,50
1988	5.021,40	8.510,90	- 3.489,50
1987	3.497,30	6.293,50	- 2.796,20
1986	3.106,20	4.771,90	- 1.664,70
1985	3.855,70	3.681,70	-6.00

Sumber : [www.census.gov/foreign-trade/www/source.html](http://www.census.gov/foreign-trade/www/source.html) didownload pada 23 November 2001

Tabel 2.13 Selisih angka dalam Neraca Perdagangan AS – Cina, (dalam US\$ Milyar )

Tahun	US Data	Chinese Data	Adjusted US Data	Adjusted Chinese Data
1989	6.18	-3.5	2.27	1.78
1990	10.43	-1.4	6.49	5.38
1991	12.68	-1.8	8.87	6.75
1992	18.26	-0.3	11.39	11.28
1993	22.76	6.3	14.59	19.85

Sumber: Marcus Noland, *China and The International Economics System, Working Paper 95-96*, pada *The International Conference on Sino-American Economic Relation, Centre for Asian Pasific Studies, Lingnan College, Hongkong, 21-23 Juni 1995*.

Potensi konflik antara Cina dan AS semakin memburuk, berdasarkan pada Tabel 2.13 berikut, terlihat bagaimana proporsi perdagangan AS dengan beberapa rekan dagangnya. Perubahan proporsi perdagangan AS, sebagaimana pada Tabel 2.6, berhubungan dengan pendapatan perkapita, jarak antara negara-negara itu, dan faktor-



faktor yang berpengaruh terhadap perdagangan bilateral antara AS dengan masing-masing rekannya. Pada tabel tersebut, terlihat bagaimana posisi Cina dalam perdagangan bilateral dengan AS yang meningkat dan menempatkan Cina sebagai partner dagang no 5 bagi AS, setelah Kanada, Meksiko, Jepang dan Uni Eropa.

Tabel 2.14 Proporsi Perdagangan Bilateral Amerika Serikat

	<u>Share of US Trade</u>			
	1993	<u>LOW</u>	<u>MEDIUM</u>	<u>HIGH</u>
<b>North America</b>	28.3	27.5	30.3	31.5
Canada	20.5	16.5	18.2	19.2
Mexico	7.8	10.3	12.1	12.5
<b>Asia Pasific</b>	35.2	34.7	37.6	41.1
Japan	14.7	12.2	13.2	15.0
China	3.8	4.2	5.3	5.7
<b>Rest of Asia Pasific</b>	16.6	16.4	19.1	21.6
Korea	3.0	2.5	3.4	4.1
Taiwan	3.9	3.7	4.5	5.3
Hongkong	1.9	1.6	2.1	2.6
Singapore	2.3	2.3	2.6	3.0
Malaysia	1.6	1.8	2.1	2.4
Thailand	1.2	1.2	1.5	1.9
Philippines	0.8	0.8	0.9	1.0
Indonesia	0.8	0.8	1.0	1.1
Australia	1.1	0.9	1.0	1.1
New Zealand	0.2	0.2	0.2	0.2
<b>Western Europe</b>	22.2	17.4	18.5	20.2
<b>Latin America</b>	6.8	5.9	6.3	7.0
<b>Rest of World</b>	7.5	6.9	7.3	8.1

Sumber: Marcus Noland, "Implication of Asian Economic Growth", *Asia Pasific Economic Cooperation Working Paper Series, Number 94-95*, Washington : Institute for International Economics. Dalam Marcus Noland, *China and The International Economics System, Working Paper 95-96*, pada *The International Conference on Sino American Economic Relation, Centre for Asian Pasific Studies, Lingman College, Hongkong, 21-23 Juni 1995*. Didownload dari www. Pada 31 Desember 2001

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat disimpulkan dua hal berkenaan dengan analisa perekonomian Cina dalam ekonomi internasional. Pertama, proses reformasi ekonomi politik yang dijalankan oleh Cina sejak tahun 1979 belum sepenuhnya lengkap. Kedua, adanya kenyataan bahwa Cina sebagai suatu negara yang "besar" merupakan aktor ekonomi yang berarti, dimana aktifitas impor yang dilakukannya atas sejumlah komoditas akan berakibat pada harga pasar internasional.



Besar kecilnya perekonomian Cina dimata negara lain, dapat dilihat dengan membandingkan besarnya GDP Cina dengan negara adidaya ekonomi lainnya. Terdapat beberapa cara untuk mengukur besarnya GDP suatu negara dan dengan menggunakan besarnya nominal nilai mata uang Cina, Yuan terhadap Dolar AS maka dapatlah diketahui GDP Cina pada tahun 1997 sebesar \$ 956 milyar, sementara GDP perkapita (yaitu besarnya GDP berbanding dengan jumlah penduduk) diketahui sebesar \$ 769. Pada tahun 1999 GDP Cina meningkat menjadi \$ 997 milyar, sementara GDP perkapita-nya menjadi \$790. Dengan metode yang sama, diketahui GDP Cina pada tahun 1997 hanya sebesar 45% dari GDP Jerman, 23% dari GDP Jepang dan 12% dari GDP AS. GDP Cina pada tahun 1999 dibandingkan dengan GDP Jerman telah meningkat menjadi 47%, dengan GDP Jepang tetap stabil berkisar pada 23% , sementara dibandingkan dengan GDP AS tahun 1999 terjadi penurunan 11%. GDP perkapita Cina pada tahun 1997 sebesar 2,6% dari GDP perkapita AS menurun menjadi 2,3% pada tahun 1999.

Dilain pihak, penggunaan nominal nilai mata uang untuk membandingkan data perekonomian Cina dan AS adalah kurang tepat. Hal ini karena harga barang dan jasa di Cina secara signifikan memang lebih rendah dibanding di AS untuk barang dan jasa yang sejenis. Oleh karena itu digunakan metode kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity, PPP*). Metode ini digunakan IMF dan Bank Dunia untuk membandingkan nilai mata uang asing dengan Dolar AS berdasarkan kemampuan daya beli sebenarnya. Berdasarkan alat ukur PPP ini, GDP Cina pada tahun 1997 mencapai \$ 4,4 milyar lebih tinggi dibandingkan dengan GDP Jepang yang hanya \$ 3,0 milyar dan Jerman sebesar \$ 1,6 milyar, sementara apabila dibandingkan dengan GDP AS pada tahun 1997 hanya setengahnya. Pada tahun 1999, GDP Cina mencapai \$ 5,6 milyar, lebih tinggi dari GDP Jepang yang hanya \$ 2,9 milyar atau Jerman yang hanya \$ 1, milyar, sementara dibandingkan dengan GDP AS sebesar \$ 9,2 milyar maka GDP Cina lebih sedikit. GDP perkapita Cina sebesar \$ 3, 560 naik menjadi \$ 4,228 pada tahun 1999. Perubahan nilai ini karena adanya harga barang yang lebih rendah di Cina dibandingkan dengan harga produk yang sama di AS,



sementara harga barang tersebut di Jepang dan Jerman justru lebih tinggi lagi dibandingkan dengan di AS. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Perbandingan GDP Cina dengan Amerika Serikat, Jepang dan Jerman 1997 dan 1999

Negara	Nominal GDP (\$ Milyar)		GDP dengan menggunakan PPP (\$ Milyar)		Nominal GP perkapita		GDP perkapita dengan menggunakan PPP	
	1997	1999	1997	1999	1997	1999	1997	1999
AS	8.081	9.234	8.081	9.234	30.136	33.835	30.136	33.835
Jepang	4.190	4.370	2.969	2.935	33.214	34.519	23.542	23.465
Jerman	2.109	2.111	1.637	1.748	25.692	25.694	20.890	21.841
Cina	957	997	4.429	5.201	769	790	3.560	4.228

Note : Data PPP bagi Cina haruslah dicermati bahwasanya Cina tidak sepenuhnya mengembangkan perekonomiannya, mengingat banyak harga barang dan jasa yang masih menimbulkan distorsi berkenaan dengan pengawasan harga dan subsidi pemerintah pusat.

Sumber : Wayne M. Morrison, *CRS Report on China's Economic Conditions*, July 15, 1998 dan September 21, 2000, didownload dari [www.cnje.org](http://www.cnje.org) pada 31 Desember 2000

Data yang ditunjukkan dengan menggunakan ukuran PPP mengisyaratkan bahwa meski perekonomian Cina tergolong besar dan menempati posisi 8 besar dunia, namun standar hidup di Cina masih tergolong rendah. Bank Dunia memperkirakan hampir 30% penduduk Cina berada dibawah garis kesejahteraan internasional, sebesar \$ 1 setiap hari (1999). IMF sendiri juga memperkirakan bahwa dengan perekonomian demikian, Cina akan mampu melampui AS pada tahun 2007.

### 2.3 Republik Rakyat Cina – GATT / WTO

*General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) diciptakan pada akhir PD II untuk menjamin kerja sama yang lebih konstruktif dibandingkan dengan yang terjadi pada periode antara kedua perang dunia yang pernah berlangsung. Pada pelaksanaannya, upaya masyarakat internasional untuk menangani masalah keuangan dan moneter internasional dapat dilakukan dengan cara yang relatif lebih cepat. Dalam konferensi Bretton Wood (1944) masyarakat internasional menyetujui



didirikannya IMF dan IBRD. Sebagai langkah awal untuk menangani masalah perdangan internasional, pada bulan Februari 1946, Badan Ekonomi dan Sosial PBB (*Economic and Social Council, ECOSOC*) pada sidang pertamanya mengambil suatu resolusi untuk mengadakan konferensi guna menyusun piagam perdagangan, moneter, dan pembangunan internasional. Dilain pihak, pemerintah AS mengeluarkan konsep mengenai piagam untuk pembentukan *Internatioanl Trade Organization* (ITO). Pada akhirnya konsep tersebut justru tidak disetujui oleh konggres AS sendiri karena pertimbangan politis, sehingga dengan demikian ITO tidak berhasil didirikan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ITO tidak berhasil didirikan, maka terdapat suatu kekosongan institusional pada tingkat internasional dalam bidang perdagangan maka hal-hal yang dapat dilakukan sebagai kerangka tujuan agar sistem perdagangan internasional dapat tetap ditunjang secara institusional. Namun dalam bentuk yang lebih pragmatis dilakukanlah berbagai upaya-upaya untuk mewujudkan kelembagaan perdagangan internasional. Dengan adanya kekosongan itu, maka GATT menjadi satu-satunya instrumen di bidang perdagangan yang memperoleh konsensus untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan internasional. Pada tahun 1947 GATT menjadi satu-satunya "organisasi" internasional yang mengatur perdagangan, sekurang-kurangnya untuk negara anggota. Karena perdagangan internasional antara negara anggota GATT mencapai sekitar 80% dari seluruh perdagangan dunia,<sup>29</sup> maka secara riil GATT mengatur aturan permainan hampir keseluruhan perdagangan internasional.

Dalam perundingan Uruguay Round, berdasarkan pada *Marrakesh Accords*, dokumen yang menyimpulkan hasil perundingan selama Putaran Uruguay dan diresmikan di Marrakeash, Maroko pada 15 April 1994 memuat isu-isu yang penting dan upaya untuk lebih menyempurnakan GATT sebagai organisasi internasional yang akhirnya mengarah pada upaya pembentukan organisasi multilateral untuk perdagangan, yakni rencana untuk mendirikan *Multilateral Trade Organization*

---

<sup>29</sup> H.S., Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman. 61



institusi tersebut, menimbulkan optimisme dan pesimisme. Bagi yang optimis, persetujuan ini menjanjikan terjadinya perdagangan bebas dunia, dengan demikian komoditi yang diperdagangkan akan melalui mekanisme pasar. Cara yang demikian itu menimbulkan harapan agar perdagangan dunia meningkat dan semua negara didunia yang terlibat didalamnya dapat mengambil keuntungan yang diperoleh dari pertumbuhan, pembangunan dan peningkatan ekonomi internasional.

Pesimisme yang muncul dari golongan anti globalisme berlandaskan pada persepsi ketidakseimbangan perekonomian dunia. Sebagaimana diketahui, terdapat dikotomi ekonomi antar negara maju dengan negara miskin, antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan. Hasil dari perjanjian putaran Uruguay dipandang akan merugikan negara-negara berkembang atau negara-negara Selatan, mengingat perekonomian negara-negara berkembang jauh dibawah negara-negara Utara. Kerugian ini berasal dari perbedaan kemampuan dalam produksi, sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan modal. Disatu sisi, produk pertanian, jasa, dan industri dari negara-negara berkembang memiliki permasalahan berkenaan dengan efisiensi dan kualitas apabila dibandingkan dengan komoditi yang sama dari negara maju.

Kondisi yang timpang ini akan merugikan negara berkembang manakala diterapkannya pasar bebas secara global. Adanya kenyataan bahwa hampir semua negara didunia ini adalah anggota dari GATT, maka mau tidak mau perjanjian dari putaran Uruguay akan tetap diimplementasikan. Aturan main sebagai hasil kesepakatan tersebut haruslah ditaati oleh seluruh anggota GATT/ WTO. Komponen-komponen utama dari perjanjian Uruguay secara detil dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.16 Poin-poin Utama Perjanjian Putaran Uruguay

Up to 1993	The 1993 Agreement	Main Impact
<b>Industrial Tariff</b>		
Backbone of previous GATT round. Tariff of industrial goods average 5% in industrialized countries – down from 40% in the late 1940's.	Rich countries will cut tariffs on industrial goods by more than one-third. Tariff will be scrapped on over 40% of manufactur goods.	Easier acces to world markets for exports of industrial goods. Lower prices for consument*.
<b>Agriculture</b>		
High farm subsidies and protected markets in the United States and european community lead to over production and dumping	Subsidies and other barriers to trade in agricultural products will be cut over six years. Subsidies cut by 20%. All import barriers will be converted to tariffs and cut by 36%.	Better market oppurtunities for efficient food producers. Lower prices for consumers. Restraint of farm subsidies war.
<b>Intellectual Property</b>		
Standards of protection for patents, copyrights, and trademarks very widely. Ineffective enforcement of national lows a growing source of trade friction.	Extensive agreements on patents, copyrights and trademarks. International standards of protection and agreement for effective enforcement established.	Increased protection and reduction of intellectual property piracy will benefit producers of intellectual property (e.g., computer software firms, performing artists). Will increase technology transfer.
<b>Textiles</b>		
Rich countries have restricted imports of textiles and clothing through bilaterals quotas under Multi-Fiber Arrangement (MFA)	MFA quotas progressively dismantled over 10 years and tariff reduced. Normal GATT rules will apply at the end of 10 years.	Increased trade in textiles should benefit developing countries. Reduced prices for consumers worldwide.
<b>GATT Rules</b>		
GATT remains the same as when drafted in 1947, even though many more countries have entered the world trading community and trade patterns have shifted.	Many GATT rules revised and updated. They include codes on customs valuation and import licensing, customs unions and free trade areas, and rules dealing with waivers from GATT regulations.	Greater transparency security, and predictability in trading policies.
<b>World Trade Organization</b>		
GATT orriganally envisioned as part of an International Trade Organization. ITO never natified and GATT applied provisionally.	GATT becomes a permannet world trade body covering goods, services, and intellectual property with a common disputes procedure. WTO to implement result of Uruguay Round	More effective advocacy and policing of the international trading system.

Sumber : Charles W. Hill, *Global Business Today, Second Edition*, Mc Graw Hill, New York, 2001, halaman 10



Tabel 2.17 Perkiraan Manfaat Pendapatan yang diperoleh dari adanya Putaran Uruguay – GATT, 1995 (dalam \$ billion)

	Tarif	Hambatan-	Pertanian	Total	Prosentase (%)
	Industri	hambatan Tarif Non- industri			
Kanada	0.7	10.2	1.5	12.4	2.4
Amerika Serikat	13.7	102.3	6.3	122.4	24.0
Uni Eropa	33.8	115.1	14.6	163.5	32.1
Australia & New Zealand	3.1	0.65	2.1	5.8	1.1
Jepang	18.1	2.1	6.5	26.7	5.2
Negara Berkembang & Negara Transisi	33.4	68.4	14.3	116.1	22.8
Cina	11.6	5.4	1.7	18.7	3.7
Taiwan	7.7	2.1	0.4	10.2	2.0
Total	132.0	324.0	53.0	510.0	100.0
Prosentase (%)	25.9	63.6	10.5	100.0	

Sumber : Carunia Mulya Firdausy, " Pasca Putaran Uruguay – GATT dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional; Suatu Tinjauan Umum", dalam Mahmud Thoha (Penyunting), *Dampak Persetujuan Putaran Uruguay –GATT terhadap Industri Kecil*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, halaman 17

Bagi negara-negara yang optimis, pengurangan 36% subsidi ekspor dan penurunan 18% subsidi pertanian akan meningkatkan pendapatan negara, sebagai contoh Uni Eropa akan mendapatkan keuntungan sebesar \$ 15 milyar dari penurunan subsidi pertanian, sedangkan negara-negara berkembang mendapatkan peningkatan perdagangan dari berlakunya perdagangan bebas.<sup>34</sup> Dilain pihak, bagi negara-negara yang pesimis, menyatakan bahwa apa yang terjadi justru menimbulkan ketergantungan yang berlaku antara negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju dengan latar belakang kurangnya kemampuan dalam modal, sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, dan volume perdagangan yang rendah pula.

Persetujuan Putaran Uruguay –GATT terhadap Industri Kecil, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, halaman. 16

<sup>34</sup> Carunia Mulya Firdausy, " Pasca Putaran Uruguay -- GATT dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional; Suatu Tinjauan Umum", dalam Mahmud Thoha (Penyunting), *Dampak Persetujuan Putaran Uruguay –GATT terhadap Industri Kecil*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, halaman 18



Bertolak dari pemikiran itu maka Cina dapat memperoleh dampak yang positif dari putaran Uruguay yang kemudian diimplementasikan lewat kerangka kerja WTO, memerlukan upaya efisiensi dan peningkatan pasar yang diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah pedalaman. Perluasan pengembangan perekonomian ini menitik beratkan pada sektor industri ringan yang padat karya, mengingat dari kedua faktor produksi yaitu tenaga kerja yang murah dan modal yang ringan karena kedua faktor tersebut Cina memiliki keunggulan komparatif yang tinggi dibanding dengan negara lain.

Cina menetapkan enam tujuan pembangunan ekonomi di tahun 2001 sebagai hasil dari *The Central Economic Working Conference* pada bulan November 2000 tersebut adalah :

1. Memperluas permintaan domestik dan menjalankan pengawasan atas aktifitas ekonomi makro.
2. Memberikan prioritas peningkatan sektor pertanian dan meningkatkan pendapatan para petani.
3. Mengakselerasikan reformasi ekonomi dengan pemanfaatan sains dan teknologi, dan mendorong rencana strategis ekonomi.
4. Melanjutkan usaha peningkatan ekspor dan mengaktifkan penggunaan dana bantuan dari luar negeri.
5. Memperluas lowongan pekerjaan sebagai jalur utama meningkatkan pendapatan penduduk urban dan pedesaan yang merupakan prioritas tujuan pembangunan ekonomi.
6. Mempersiapkan penerimaan Cina sebagai anggota WTO dan menuntun tahapan baru dari keterbukaan Cina atas dunia luar.<sup>35</sup>

Keinginan Cina untuk terlibat dalam WTO dan ikut berperan aktif dalam organisasi tersebut dianggap wajar, karena keterlibatan aktif Cina akan memiliki akses yang cukup untuk selanjutnya memainkan peran yang penting dalam

---

<sup>35</sup> "China Outlines Economic Targets for 2001" dari [http: www.china.com](http://www.china.com) didownload pada 20 November 2000



termasuk didalamnya sektor-sektor khusus. Sementara itu Cina juga diberi hak untuk menikmati hubungan dengan anggota WTO lainnya. *Kedua*, status *Most Favourable Nation* (MFN) haruslah diberikan secara permanen dan berlaku secara total diantara anggota WTO. (3). Cina bermaksud untuk secara sadar mentaati kewajibannya atas liberalisasi perdagangan, namun sebagai negara berkembang, Cina mengharapkan mendapat standar sebagaimana negara berkembang yang lain. Bagi anggota WTO yang lain, pelaksanaan standar negara berkembang dalam hal liberalisasi tidak bisa sepenuhnya dapat dilakukan pada Cina mengingat perkembangan ekonomi Cina yang pesat. Dalam hal ini dituntut kesadaran Cina atas kemajuan liberalisasi yang dalam beberapa hal berhubungan dengan kondisi nasionalnya.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi tarik-ulur bagi masuknya Cina dalam WTO. Ketua Komisi Perencanaan Pusat, Chen Jinhua menyatakan posisi Cina untuk tetap berusaha agar dapat masuk kedalam WTO. Pada 31 Januari 1997 di Davos dalam pertemuan tahunan *The World Economic Forum* yang menyatakan bahwa:

*“ China is actively seeking its membership in WTO. The Chinese government will take a realistic and flexible attitude to promote the process of it accession ”.*

Lebih jauh lagi, ia menyatakan tiga posisi dasar Cina, yaitu :

*“ Pertama, WTO tidak bisa dikatakan telah komplit bila tidak ada partisipasi Cina. Kedua, Cina merupakan negara yang sedang berkembang, dan bukan negara berkecukupan sehingga tidaklah beralasan untuk terlalu banyak menuntut ongkos (*entrance fee*) atas masuknya Cina. Ketiga, hal yang penting sekali bagi Cina untuk menjalankan masa transisi dimana hal ini secara gradual akan bersinggungan dengan persyaratan bagi masuknya Cina dalam WTO”.*<sup>36</sup>

Ketiga alasan yang digunakan oleh Cina tersebut ditentang oleh beberapa negara anggota WTO. AS secara khusus menyertakan keberatan bila Cina dikatakan sebagai

---

<sup>36</sup> *China Reaffirms Positions on WTO Accession*, *China Daily*, 31 Januari 1997 pernyataan ini semakin diperkuat oleh Wu Yi, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan kerjasama Ekonomi dalam *“WTO Incomplete Without China”* yang dimuat di *China Daily*, 8 September 1998.



negara sedang berkembang, karena asumsi AS berdasar pada volume perdagangan Cina. Volume perdagangan Cina yang mencapai \$ 189,9 milyar pada tahun 1996 dengan menempati rangking 9 di dunia menjadi alasan keberatan AS menggolongkan Cina sebagai negara sedang berkembang.<sup>37</sup>

Meskipun pembicaraan mengenai masuknya Cina dalam WTO tidak bisa berjalan dengan mulus, pemerintah Cina tidak menyerah begitu saja mereka tetap aktif untuk melakukan negosiasi dan lobi-lobi. Hal ini karena persepsi bahwa masuknya Cina dalam WTO bukanlah hanya akan menguntungkan Cina saja, namun juga jalannya reformasi ekonomi yang sedang dijalankan oleh Cina. Masuknya Cina dalam WTO dapat memperjuangkan kepentingan negara-negara dunia ketiga.<sup>38</sup> Lebih jauh lagi, hal tersebut tidak hanya berlaku secara temporer atau kepentingan sebagian orang saja namun demi kepentingan jangka panjang secara keseluruhan. Tujuan akhir dari reformasi Cina adalah untuk membangun perekonomian pasar sosialis yang terintegrasi kedalam perekonomian internasional. Dengan mengingat perekonomian internasional dan peraturan perdagangan pada waktu ini yang terus berkembang, maka perdagangan luar negeri Cina tidak hanya memerlukan keanggotaan dalam WTO saja namun juga membutuhkan reformasi, keterbukaan, dan terciptanya sistem baru. Bagaimanapun cara dan waktu yang dibutuhkan, Cina harus dapat masuk dalam WTO dengan mempertimbangkan aturan main dalam ekonomi internasional dan standarisasi yang Cina lakukan adalah berdasar pada persyaratan keanggotaan WTO.

Tertundanya Cina masuk dalam WTO berhubungan erat dengan tiga aspek berikut ini.

1. Perekonomian Cina yang mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga WTO memperkirakan perekonomian Cina akan menguat.

---

<sup>37</sup> Lu Jianren, "China's Reform; Opening Up and Foreign Economic Relation: Question and Answer", makalah dalam *International Conference, China International Role: Key Issues, Common Interest, Different Approach*, Bruhl, Bonn German, 6-9 Maret 1997.

<sup>38</sup> No Compromise, *Asiaweek*, 17 Desember 1999



*“ China asked to join the multinational trade system 11 years ago because the country realized at that time that the objectives of the reform and opening ara to gradually change from planned economy to a socialist market economy, which has advocate by the late Chinese leader Deng Xiaoping. The major members of WTO should not take China’s development potential as reality and therefore make unrealistic evalution of the situation. China firmly opposes economic hegemonism and hope that major negotiating parties will raises their requirement on a legal basis and within the mechanism and scope of WTO agreements ”<sup>41</sup>*

Dalam persepsi pemimpin-pemimpin Cina, tanpa menjadi anggota WTO, Cina masih berkomitmen melakukan perdagangan dan meliberalisasi investasi sebagaimana mereka semakin aktif dalam perdagangan bebas di wilayah Asia Pasifik. Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Cina, Shen Guefang menyatakan

*“ ... Even if it is kept outside the organization, China will continue its reform drive and increase bilateral trade, and the WTO and certain countries will suffer as result ”.<sup>42</sup>*

Negara-negara anggota WTO diharapkan dapat melakukan pendekatan pragmatis dan lebih mempertimbangkan faktor-faktor perdagangan dan ekonomi daripada faktor-faktor politik dan ideologi dalam menangani permasalahan masuknya Cina dalam WTO. Hambatan yang selama ini muncul dari beberapa negara saja pada umumnya karena lebih mempertimbangkan faktor politik dan ideologi, meskipun sebenarnya lebih banyak anggota WTO yang mengharapkan Cina masuk WTO.<sup>43</sup> Hambatan utama saat ini berasal dari AS karena AS selama ini menghambat masuknya Cina ke dalam WTO dengan tidak memberikan status MFN. Hal ini tak lepas dari kepentingan ekonomi-politik AS terhadap Cina. Dukungan masuknya Cina

<sup>40</sup> President Jiang Zemin on China’s Accesion to WTO, *China Daily*, 8 September 1999

<sup>41</sup> China to Continue Its Effort of Entry into WTO, *China Daily*, 21 April 1997

<sup>42</sup> Politics Blocking China’s Entry Into WTO, *China Daily*, 13 Desember 1996

<sup>43</sup> Menurut She Guefang, Juru Bicara Kementrian Luar Negeri, WTO juga harus memperhatikan tuntutan negara-negara berkembang yang menginginkan Cina masuk dalam WTO. Lihat “ *WTO Should Consider Demend of Developing Countries*”, *China Daily*, 17 Desember 1996



dalam WTO juga berasal dari Bank Dunia.<sup>44</sup> dan juga berasal dari Sekjen PBB Kofi Annan, ia menyatakan :

*“ I think it is important that China, with the size of its economy population, should play a part in the WTO. ... I personally would want to see China as a member of the WTO ”.*<sup>45</sup>

Dengan mempertimbangkan pentingnya Cina dalam perdagangan internasional, semakin banyak anggota WTO yang mendukung masuknya Cina dalam WTO. Cina akan semakin masuk dalam perdagangan internasional sehingga produk-produk Cina akan semakin mudah masuk pasar dunia. Selain itu, potensi pasar Cina akan menggiurkan negara-negara produsen untuk masuk dalam pasar domestik Cina. Dilain pihak, saat Cina meliberalisasi pasar domestiknya, akan menimbulkan kontradiksi, dimana untuk itu Cina harus melakukan pembaharuan dalam bidang politik, yang selama ini terlihat dihentikan.<sup>46</sup>

Pembicaraan mengenai masuknya Cina dalam WTO telah memasuki babak akhir dimana Cina dan AS telah mencapai suatu kesepakatan kunci atas perkembangan isu-isu terakhir. Sebelumnya telah ada persetujuan antara Beijing dengan Washington berkenaan dengan masalah-masalah pembajakan Hak Cipta Intelektual, Hak Paten, dan Hak Merek Dagang dengan melalui penindakan yang ketat, serta membuka pasar Cina.<sup>47</sup> Dalam kesepakatan pertama yang ditandatangani antara Cina dan AS telah dicapai kesepakatan dalam bidang pertanian. Kesepakatan yang ditandatangani oleh PM. Zhu Rongji dan Presiden Bill Clinton pada 10 April 1999 mengisyaratkan bahwa masuknya Cina dalam WTO tidak memerlukan waktu lebih lama lagi.<sup>48</sup> Proses tersebut sempat terganggu dengan peristiwa pemboman

<sup>44</sup> *World Bank Supports China's Membership in WTO*, China Daily, 17 Desember 1996

<sup>45</sup> *UN Secretary-General Wants to See China in WTO*, China Daily, 1 Februari 1997

<sup>46</sup> Umar Suryadi Bakri, *Quo Vadis ? Cina pasca Deng Xiaoping*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 163

<sup>47</sup> Kompas, 25 Februari 1995, halaman 15

<sup>48</sup> Harapan Cina ini juga dinyatakan dalam *“White Paper on Foreign Trade and Economic Cooperation”* dimana sampai tahun 2000 masih terdapat hambatan-hambatan baru dalam hubungan perdangan dengan AS -seperti masalah naiknya harga minyak, namun tidak menyurutkan keinginan



mengharapkan isu-isu tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan fungsi dari WTO, seperti standar buruh, haruslah tidak dimasukkan dalam agenda.<sup>50</sup>

### 2.3.2 Kepentingan Nasional Cina dalam WTO

Setiap negara besar maupun kecil, negara maju maupun negara berkembang dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara lain mempunyai kepentingan tertentu. Kepentingan itu dapat berupa kepentingan ekonomi, politik, ideologi maupun keamanan, yang kesemuanya ditujukan untuk menjamin eksistensi bangsa serta kelangsungan hidup rakyatnya. Kepentingan setiap negara berbeda, oleh karena itu tidaklah heran jika kepentingan tersebut dapat berubah menjadi benturan-benturan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat.

Pada dasarnya perbedaan kepentingan tersebut dipengaruhi oleh rakyat atau kelompok kepentingan yang ada di negara masing-masing pihak, karena itu kepentingan-kepentingan tersebut sering diidentikkan dengan kepentingan nasional, hanya saja penekanan kepentingan atau tingginya intensitas kepentingan suatu bangsa atau negara tidaklah selalu sama. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya intensitas kepentingan negara sangat tergantung pada kebutuhan utama negara yang bersangkutan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk menganalisa kepentingan nasional Cina dengan WTO, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari Donald E. Nuechterlein. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui intensitas dan prioritas dari kepentingan nasional RRC. Dengan demikian dapat diketahui seberapa jauh pengaruh WTO sebagai rezim ekonomi internasional terhadap ekonomi-politik domestik Cina berdasarkan pada kepentingan ekonomi Cina.

Berpartisipasi sepenuhnya dalam WTO bagi Cina akan memperluas aturan main perdagangan Cina secara signifikan dengan berdasar pada sistem perdagangan multilateral. Hal ini akan memunculkan lebih banyak lagi adanya kesempatan pasar

---

<sup>50</sup> Sebagaimana yang dinyatakan oleh She Guangsheng dalam China Daily, "China Raises Five Proposals for Next Round Trade Talks", *China Daily*, 2 Desember 1999



ketergantungan Cina terhadap WTO. Dalam hal ini penulis hanya melihat dari sumber *benefits of interdependence* (Keuntungan Interdependensi).

Cina merupakan *the great power* yang tidak hanya ada di Asia Pasifik tapi juga secara internasional. Dengan kekuatannya, RRC dipastikan dapat memainkan peran penting dalam politik ekonomi internasional. Dengan penduduk lebih dari 2 milyar, Cina merupakan potensi pasar yang terbesar di dunia dan lahan investasi yang menggiurkan dunia internasional. Cina merupakan pasar utama bagi produk-produk industri asing dan dengan sumber daya manusia yang berlimpah Cina merupakan ladang investasi untuk membangun industri dengan biaya produksi yang murah, hal ini menggiurkan bagi negara-negara lain untuk membangun manufakturnya di sana.

Meskipun secara ideologis Cina merupakan negara komunis, akan tetapi semenjak Deng menerapkan kebijaksanaan pintu terbuka maka lambat laun Cina telah mengadopsi nilai-nilai liberalisme dalam perekonomiannya dengan melakukan pengurangan peran pemerintah dalam bidang ekonomi mikro. Hal ini ditambah dengan peningkatan kepercayaan terhadap mekanisme dari desentralisasi dari pusat kepada pemerintah lokal maupun manajemen perusahaan itu sendiri. Pemerintah meningkatkan usaha-usaha untuk mengintegrasikan diri dalam perekonomian internasional. Hubungan ekonomi luar negeri dilakukan lebih liberal dengan peningkatan ekspor, impor, investasi asing.<sup>53</sup>

Ketergantungan ekonomi Cina terhadap perekonomian internasional termasuk kepada negara-negara anggota WTO sebagai komunitas internasional tidak bisa dihindarkan, mengingat interaksi Cina yang berlangsung secara internasional. Hal ini merupakan bentuk ketergantungan yang saling menguntungkan (*positive sum*). Dengan demikian interdependensi akan menguntungkan Cina dan negara-negara anggota WTO disatu sisi lainnya. Cina dan negara-negara anggota WTO merupakan mitra dagang dimana masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dari aksi perdagangan yang terjadi.

---

<sup>53</sup> Andreas Koves and Marer, *Foreign Economic Liberalization : Transformation in Socialist and Market Economies*, Interview Press, Colorado, 1991, halaman 15





### III. PERUBAHAN POLITIK DOMESTIK REPUBLIK RAKYAT CINA

#### 3.1 Sekilas Republik Rakyat Cina.

Cina merupakan negara terbesar di Asia Timur, dengan berbatasan di utara dengan Mongolia; barat laut dengan Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Afghanistan; di barat daya dengan India, Nepal, dan Bhutan; di selatan berbatasan dengan Burma, Laos, dan Vietnam; di tenggara dengan laut Cina selatan; di sebelah timur dibatasi oleh laut Cina Selatan, Korea Utara, dan laut Kuning; sedangkan di bagian timur laut dibatasi oleh Rusia.

Cina merupakan negara terbesar ketiga di dunia, setelah Kanada dan Rusia, dengan memiliki luas 9.6 juta kilometer persegi atau sebesar satu seperlimabelas dari luas seluruh daratan didunia. Terbentang dari Sungai Wusuli dan Heilong pada 135, 5 BT sampai di Pamirs, barat Wuqia County di wilayah otonomi khusus Xinjiang Uygur pada 73,40 BT, terbentang sepanjang 5.200 Kilometer. Dari utara membentang ke selatan, dari Sungai Heilong di utara Nohe (53,31 LU) sampai ke wilayah yang paling selatan di Pulau Zengmu'ansha, Laut Cina Selatan (4, 15 LS) atau sepanjang 5.500 kilometer. Perbatasan Cina di daratan membentang sepanjang 22.000 KM dan sepanjang 18.000 KM di laut. Terdapat 6.536 pulau besar dengan luas lebih dari 500 meter persegi, dimana pulau terbesar adalah Taiwan, sedangkan yang kedua adalah Hainan. Kepulauan laut Cina Selatan merupakan kelompok kepulauan paling selatan Cina.<sup>1</sup>

#### 3.1.1 Pemerintahan Cina

Cina terbagi dalam 22 propinsi, 5 daerah otonomi, dan 3 kotamadia (*municipalities*) yaitu Beijing, Shanghai, dan Tianjin, setiap daerah tersebut memilih penduduk setempat duduk dalam pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh *National People's Congress* (NPC), yang terdiri dari 2.970

<sup>1</sup> An Overview of China, [www.chinatoday.com](http://www.chinatoday.com) didownload pada 31 Desember 20001



perwakilan yang dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali oleh rakyat, termasuk pemilihan bagi Kongres Rakyat Lokal. NPC yang merupakan organ pemerintahan tertinggi negara, mengadakan sidang tahunan tetap yang memilih 155 orang untuk duduk dalam Badan Pekerja yang mengerjakan tugas sehari-hari NPC. Komite ini memiliki lembaga yang terdiri dari satu ketua dan 16 wakil ketua dan NPC juga memilih Presiden yang bertugas selama lima tahun. Presiden memiliki dua fungsi, sebagai kepala negara dan sebagai pemimpin dalam upacara-upacara khusus. Sedangkan administrasi eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri beserta Kabinet yang disebut Dewan Negara, termasuk didalamnya tiga wakil utama, Menteri-menteri Departemen, Kepala-kepala Komisi Negara, Sekretaris Jenderal Audit, Sekretaris Jenderal, dan Gubernur Bank Sentral dan Dewan Negara ditunjuk berdasarkan persetujuan dari NPC.

Kekuatan pengawasan dimiliki oleh Partai Komunis Cina (PKC) yang memiliki struktur hirarkis paralel dengan anggota kongres dari tingkatan desa sampai ke atas dengan fungsi komite-komite dan kewenangannya berlaku dari atas kebawah. Kongres partai diadakan secara nasional setiap lima tahun sekali untuk memilih komite pusat yang terdiri dari 319 anggota (dimana 189 diantaranya memiliki hak voting secara penuh). Komite ini mengadakan rapat tiap dua tahun sekali untuk memilih anggota Polit Biro yang berjumlah sekitar 20 orang dan memilih 5 anggota sekretaris untuk mengawasi jalannya partai setiap hari serta untuk membimbing tujuan dan kebijakan partai dan negara. Polit Biro mengadakan pertemuan tiap mingguan di Cina, dan ini merupakan badan politik yang sangat signifikan sekali.

### 3.1.2 Landasan Ekonomi Cina

Landasan perekonomian Cina tercantum dalam konstitusi yang dibuat pada September 1959 oleh NPC I sebagai sistem ekonomi sosialis,<sup>2</sup> pada pembukaan konstitusi yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Dalam pengertian yang diberikan oleh Winardi, dikatakan bahwa ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi dimana pemerintah atau gilda-gilda pekerja memiliki serta mengelola semua alat-alat produksi, hingga dengan demikian usaha swasta dibatasi bahkan terkadang dihapuskan sama sekali. Terkadang istilah-istilah ini dipergunakan sedemikian rupa, hingga komunisme



*“After Founding the People’s Republik, China gradually achieved it’s transition from a new democratic to a socialist society. The Socialist transformation of the private ownership of the means of production has been completed, the system of exploitation of man by man abolished and the socialist system established”*<sup>3</sup>

Sedangkan artikel 6 menyatakan bahwa:

*“The Basis of Socialist economic system of People’s Republik of China is socialist public ownership of the means of production, namely, ownership by the whole people and collective ownership by the working people”.*

Pasal-pasal lain yang menjadi landasan bagi sistem perekonomian Cina dinyatakan dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18.<sup>4</sup> Konstitusi Cina mengalami 4 kali perubahan, yaitu Konstitusi tahun 1954, Konstitusi 1975, Konstitusi 1978, dan Konstitusi 1982. Konstitusi 1982 berisikan 138 pasal yang terdiri dari bab-bab tentang prinsip umum, hak dan kewajiban warga negara, struktur negara, bendera negara, lambang negara, ibu kota negara, selain pembukaan.<sup>5</sup>

### 3.2 Republik Rakyat Cina Era Mao Zedong (1949-1978)

Kebijakan industrialis ortodok Stalinis yang dijalankan Mao Zedong pada pertengahan awal dekade tahun 1950-an dengan menjalankan ekstensifikasi industri berat khususnya baja, menempatkan Cina secara relatif sangat terbelakang, dimana hal ini merupakan kebijaksanaan industrialisasi yang terlambat di era tersebut. Pada pertengahan dekade 1950-an, Mao mengeluarkan kebijakan “Lompatan Jauh Kedepan” yang ditujukan untuk mengejar ketinggalannya dari Inggris selama 15 tahun. Akan tetapi apa yang diperoleh justru merupakan kebalikannya, munculnya krisis ekonomi yang bersamaan dengan matinya ratusan juta buruh. Kebijakan agraria yang dikeluarkan kemudian, lalu dijalankan sampai

---

dianggap sebagai salah satu jenis sosialisme. Dalam percakapan sehari-hari seringkali dicampuradukkan sosialisme dengan komunisme. Winarai, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, CV. Mandar Jaya, Bandung, 1989, halaman 442-443

<sup>3</sup> Paragraf keenam dari pembukaan konstitusi Cina

<sup>4</sup> Lihat lampiran Konstitusi Republik Rakyat Cina

<sup>5</sup> “General Introduction to The Establishment of The Legal System”. Data dari: <http://inic.utexas.edu/asnic/countries/china/chinalegal.html/> didownload pada 20 November 2000



karena kondisi politik yang ada. Setelah kematian Zhu Enlai, Zhu De, dan Mao Zedong pada tahun 1976, Hu Guofeng memimpin Cina setelah sebelumnya menjadi penengah antara kelompok Maois dan reformis dalam perebutan kekuasaan yang tajam. Meskipun demikian, Hua Guofeng tidak dapat lama dalam mempertahankan kedudukannya. Banyak faktor yang menjadi sumber kejatuhannya. Pertama, pengalaman Hua dalam politik nasional yang kurang luas sehingga tidak mampu menangani masalah-masalah yang berskala nasional. Kedua, kelihaihan politik Hua tidak dapat mengalahkan Deng. Ketiga, hubungan erat Hua dengan kelompok radikal maouis yang mulai dikritik tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi. Keempat, tuduhan terhadap Hua bahwa ia ingin menciptakan kultus individu yang berbau feodalisme. Kelima, Hua dianggap bersalah dalam menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang terlalu ambisius dan tidak realistis.<sup>8</sup>

Setelah jatuhnya *The Gang Four* pada bulan Oktober 1976, pimpinan Cina mulai menilai kembali situasi ekonomi politik dalam negeri dan strategi pembangunan yang akan dijalankan. Kesimpulan yang mereka ambil bahwasanya selama tahun 1966-1976 perekonomian Cina tidak mengalami kemajuan yang berarti. Faktor utama yang menyebabkan kemunduran ekonomi Cina selama Revolusi Kebudayaan adalah adanya perebutan kekuasaan yang terjadi antar kelompok kepentingan yang berbeda dalam tubuh PKC. Selama satu dekade tersebut, Cina tidak menghasilkan pemikiran-pemikiran baru tentang strategi pembanguana ekonomi yang harus dijalankan. Perhatian yang selama ini ada adalah pengembangan suprastruktur daripada infrastruktur perekonomian sehingga ekonomi nasional tidak berjalan.

Stretegi pembangunan yang demikian ini memerlukan investasi modal yang besar. Selain menyerap dana negara, sektor pertanian juga dikorbankan untuk membiayai pembangunan. Strategi pembangunan ala Soviet yang kemudian diterapkan dengan model yang sentralistik menuntut adanya struktur birokrasi yang kuat dalam melaksanakan dan merencanakan produksi. Birokrasi yang

---

<sup>8</sup> Lihat dalam Natalia Soebagio, "Pembaharuan di Cina : Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik", dalam *Jurnal Global*, No 1, 1990, halaman 44-65



kembali. Perencanaan perekonomian pusat dilonggarkan agar tiap badan usaha dapat turut menentukan target produksi yang dapat mereka capai sesuai dengan kemampuan mereka. Peranan kaum teknokrat dan ahli kembali menjadi penting.

Perbaikan ekonomi yang dijalankan oleh Liu Shaoqi tidak bertahan lama, setelah Mao bangkit dan kembali melakukan gerakan-gerakan politik yang mencapai puncaknya pada tahun 1966 dengan meletusnya revolusi kebudayaan. Dengan demikian pertentangan antara bagaimana menciptakan masyarakat sosialis melalui penguatan landasan ekonomi atau ideologi kembali dipertautkan. Mao dalam hal ini lebih menekankan perhatiannya pada pengembangan bidang suprastruktur atau memilih jalan yang kedua dari pertentangan pencapaian sosialisme tersebut.

Secara keseluruhan, selama periode 1952-1978 struktur perekonomian Cina memiliki ciri-ciri sebagaimana berikut ini :

1. Sistem perekonomian terpusat dimana badan-badan perencanaan pemerintah pusat menentukan harga, kuota produksi, pendapatan, alokasi persediaan dan produk sesuai dengan rencana nasional.
2. Negara birokratis yang terpusat dimana semua pajak dan laba usaha dihimpun oleh negara dan dialokasikan kembali sebagai bantuan atau hibah kepada propinsi-propinsi atau perusahaan-perusahaan.
3. Sistem Kolektif sektor pertanian sehingga investasi untuk perkembangan dan kesejahteraan petani sebagian besar dihasilkan sendiri oleh petani.
4. Strategi perkembangan meluas dengan menggunakan sebagian besar pendapatan negara untuk investasi dalam industri dan pabrik-pabrik baru.
5. Usaha untuk mencapai pemerataan regional dengan membangun daerah-daerah pedalaman.
6. *Self-reliance* dengan menutup diri terhadap investasi asing dengan membatasi perdagangan luar negeri.



### 3.2.1 Permulaan Reformasi dan Rekonstruksi

Reformasi pertama yang utama dari rezim komunis adalah distribusi tanah secara umum dan melakukan reformasi agraria secara meluas di wilayah-wilayah pertanian bekas milik Kumintang (Kaum Nasionalis Cina) Hak milik dari tuan tanah dibagi-bagi kepada kaum tani dan buruh, namun golongan kaya dan buruh menengah aman dari abolisi tersebut. Reformasi sosial lainnya adalah adanya Hukum Perkawinan (1950) yang memberikan hak sederajat bagi kaum wanita dalam pernikahan, perceraian, dan kepemilikan barang gono-gini.

Saat kondisi damai telah tercipta, rekonstruksi ekonomi dan industrialisasi menjadi prioritas. Mekanisme yang diambil adalah untuk menjaga pemerintah pusat atas ekonomi, namun pada awalnya sektor kapitalis dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Model Soviet yang sentralistik diadopsi tahun 1954, dan pada Februari 1956 sekitar 99% kepemilikan bisnis swasta telah masuk dalam hubungan kerjasama dengan pemerintah (dengan kata lain mereka telah dinasionalisasi).

### 3.2.2 Kampanye "Anti"

Selama tahun 1949-1953 anggota PKC berkembang dari 4.5 sampai 6.6 juta orang. Sedangkan bagian-bagian lain dari populasi yang banyak seperti kaum buruh, wanita, dan anak-anak juga dimasukkan dalam organisasi-organisasi massa. Dua kampanye utama politik saat itu adalah "3 Anti", yaitu Anti Korupsi, Anti Birokrasi dan Anti Kebobrokan yang digulirkan tahun 1951. Pada tahun 1952 digulirkan lagi gerakan "5 Anti" yaitu Anti kebohongan, Anti penggelapan pajak, Anti kecurangan, Anti penggunaan tak resmi barang umum, dan Anti Pencurian terhadap rahasia ekonomi. Bila "3 Anti" yang pertama untuk meningkatkan kinerja birokrasi kedalam tugas-tugasnya, maka "5 Anti" selanjutnya adalah untuk menentang borjuasi yang muncul di Cina.

### 3.2.3 Kolektifisasi

Setelah tahun 1949-1953 *land Reform* dijalankan untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat kecil. Kemudian munculah bentuk-bentuk kerjasama di tingkatan masyarakat paling bawah yang disebut sebagai komune, dimana



mereka menerapkan sistem pembayaran terhadap para buruh berdasarkan pada banyaknya hasil yang mereka kerjakan atau pada seberapa banyak tanah yang telah digunakan untuk kegiatan tersebut. Kolektifisasi yang berlaku di Cina saat itu meningkatkan rasa sensitifitas masyarakat. Pada tahun selanjutnya dikembangkanlah kerjasama ditingkatan lebih lanjut dimana dikhususkan pada kaum buruh (1956).

#### **3.2.4 Kampanye Seratus Bunga dan Anti Golongan Kanan**

Pada tahun 1956 Mao berinisiatif untuk mengeluarkan kebijaksanaan yang dikenal sebagai Kampanye Seratus Bunga, yang ditujukan untuk mendorong kritisme birokrasi didalam Partai maupun administrasi pemerintahan. Pada bulan April 1957 kampanye ini dipandang tidak efektif dan gagal dalam mencapai tujuannya, dan pada bulan Juni secara resmi dihentikan. Kampanye selanjutnya yang dilancarkan oleh Mao adalah Anti Golongan Kanan yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang menentang atau mengkritiknya dengan tuduhan sebagai pihak yang anti revolusioner.

#### **3.2.5 Lompatan Besar Kedepan (Great Leap Forward)**

Langkah pertama dalam melakukan evolusi atas strategi pembangunan masyarakat asli Cina adalah kebijakan Lompatan Jauh Kedepan (1958). Kebijakan ini mempopulerkan industri kecil padat karya secara intensif selain telah dikembangkannya industri besar dengan skala ukuran modern. Diwaktu yang sama 700 000 kolektifitas pertanian bergabung menjadi 26 000 komune rakyat untuk menopang peningkatan hasil pertanian. Secara ideologis, tujuan yang ingin dicapai saat itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar komunis. Pada akhirnya kebijaksanaan ini gagal karena membuang energi sumber daya manusia dan sumber daya alam saja. Komune-komune yang ada mengalami kegagalan karena struktur mereka yang sentralistik setelah bergabung dengan kaum buruh. Krisis pertanian dan industri ini menjadi satu dan mengakibatkan penderitaan luar biasa sehingga saat itu (1959-1960) lebih dari 20 juta rakyat Cina mati akibat bencana banjir dan kelaparan yang terjadi di sana.



### 3.2.6 Perbaikan Ekonomi

Runtuhnya kebijakan Lompatan Besar Kedepan mengurangi pengaruh dari Mao pada tahun 1962-1965, dan setelah kursi kepresidenan dipegang oleh Liu Shaoqi maka program perbaikan dilakukan berhasil sukses. Pada bulan maret 1962 PM. Zhu Enlai mengumumkan strategi baru dalam upaya mengatasi krisis yang terjadi dengan memprioritaskan sektor pertanian. Pertanian swasta dan pasar diperkenalkan kembali oleh Zhu, komune-komune yang ada dikurangi jumlahnya, dan pendapatan masyarakat diberikan berdasarkan insentif materi. Periode 1961-1966 dipandang sebagai era perbaikan ekonomi, namun dengan meluasnya tujuan-tujuan Revolusi Mao, semua rencana dan program yang akan dijalankan kembali gagal dalam perdebatan pragmatisme dan profesionalisme antara "Merah dan Golongan Ahli (*Reds and Experts*)".

### 3.2.7 Revolusi Kebudayaan

Mao telah merencanakan untuk melakukan suatu revolusi pada tahun 1966, yaitu "Revolusi Budaya Kaum *Proletar*" yang ditujukan untuk menentang apa yang disebutnya sebagai golongan kanan dan kaum penunggang kapitalis yang ada di tubuh PKC, dan untuk mencari supremasi atas kekuasaan Mao secara ideologis diatas ekonomi. Kebijaksanaan Mao untuk mengeluarkan kebijaksanaan Revolusi Kebudayaan akhirnya menjadi inspirasi munculnya tuntutan-tuntutan keterbukaan dikemudian hari. Cita-cita idealis Mao adalah menolak ideologi kaum borjuis dan kaum revisionis dengan memasukkan ide-ide segar ke dalam administrasi yang sederhana, dan mengobarkan semangat revolusi bagi kaum remaja Cina. Mao didukung oleh Lin Biao, Kepala PLA, serta dengan dukungan dari kelompok *the Gang of Four* yang dipimpin oleh Jiang Qing. Hasilnya adalah lebih dari 500.000 rakyat Cina terbunuh dalam revolusi kebudayaan itu, dan berjuta-juta kaum profesional dan intelektual dikirim ke komune-komune di pedalaman (*sentdown*) untuk belajar dan bekerja sehingga pendidikan saat itu berkurang sebagai akibat kondisi yang kacau.



### 3.2.8 Meninggalnya Mao Zedong dan Zhu Enlai

Meninggalnya Mao Zedong dan Zhu Enlai pada tahun 1976 menimbulkan persaingan dalam suksesi kepemimpinan di Cina. Kompetisi yang terjadi antara kelompok *the Gang of Four* dengan kelompok kanan yang moderat diseputar wakil PM. Deng. Deng mewakili kelompok moderat menyatakan pendapatnya tentang kondisi perekonomian yang terisolasi. Dalam pandangannya, keterbelakangan perekonomian Cina akan beresiko sekali untuk mudah ditaklukan oleh Uni Soviet secara militer. Dengan argumentasi seperti itu, Deng menyatakan perlunya modernisasi melalui impor teknologi, peralatan, dan keterampilan manajerial dari Barat. Dipihak lain, Mao -sebelum mati mulai berinisiatif memperbaiki kondisi hubungan politik Cina-Jepang dan Barat, untuk menciptakan lingkungan internasional yang kondusif bagi kegiatan impor. Usulan-usulan Deng bagi perluasan perdagangan ditentang dan dihalang-halangi oleh Kelompok Radikal. Kekuatan Deng sendiri berlindung dibawah kelompok *the gang four*, pada akhirnya Hua Guefang menjadi ketua PKC dan kepala pemerintahan setelah ditunjuk Mao.

Hua Guefang, merupakan figur yang lemah dan kurang dikenal. Hua Guefang menggantikan posisi Mao dan menjalankan pemerintahn mulai tahun 1976. Hua menangkap semua anggota *the Gang of Four* dan melanjutkan rencana pembaharuan dari Zhu Enlai. Hua Guefang sendiri juga mengambil beberapa pemikiran Deng tentang peningkatan ekspor-impor dan teknologi, akan tetapi dengan menggunakan corak pemikiran ala Mao. Sementara itu, naiknya harga-harga minyak dipasaran internasional saat itu menjadikan alasan kebijaksanaan-kebijaksanaan Hua Guefang cenderung berdasarkan ekspor minyak. Hal ini terlihat dari besarnya dukungan politik terhadap Hua yang berasal dari kelompok-kelompok industri berat yang berdiam di daerah pedalaman. Pembangunan yang dijalankan oleh Hua sendiri bercorak sangat sentralistik. Kebijaksanaannya antara tahun 1976-1978 dapat diartikan sebagai respon reaksioner atas perkembangan industri berat secara internasional diwaktu itu.

Meskipun Hua Guefang wakil kelompok kiri yang telah ditunjuk untuk menjadi pengganti Mao, Deng tetap berusaha mencapai pucuk pimpinan kekuasaan



Deng Xiaoping telah membangun pengawasan perusahaan oleh pemerintah Cina, ia menekankan Teori Kekuatan Produksi dan Doktrin Epistemologi dalam mencari kebenaran atas keadaan yang ada dan melakukan revisi secara mendasar atas Teori dan Asumsi Revolusi Cina Mao Zedong.<sup>10</sup> Menurut Deng Xiaoping, motif revolusi Cina bukanlah perjuangan kelas sebagaimana yang dikatakan oleh Mao Zedong, namun kesemua elemen perkembangan manusia dan materi yang berpengaruh terhadap proses produksi dan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dapat bersifat netral dari unsur politis. Pandangan yang demikian ini menjadi kontradiktif dengan nilai Sosialisme Mao sebagaimana yang dikatakan oleh Jiang Qing bahwa *a socialist train running late was better than a capitalist train on time*.<sup>11</sup> Berdasar asumsi Deng Xiaoping tersebut, Cina mulai menerapkan perekonomian model Keynes dan Friedman yang berdasar pada determinasi kekuatan produksi untuk menelanjangi komunisme Cina dalam memahami kapitalisme. Pemerintah Cina melakukan transformasi perekonomiannya ke arah kapitalis dengan memahami kapitalisme ala Jepang, yaitu mencoba untuk menaiki kapitalisme demi kepentingan Cina dalam mencapai tujuan negara yang lebih berkekuatan dan kaya sebagaimana Jepang.

Perlahan namun pasti, reformasi yang dijalankan oleh Cina menampakkan hasil misalnya sektor pertanian secara nyata telah lama mengalami privatisasi dan dekollektivisasi dari bentuk yang masif, harga-harga di pasar telah mengalami penurunan pengawasan dan lebih mengikuti mekanisme pasar, nilai tukar mata uang Cina (*Renmimbi Yuan*) terhadap Dolar Amerika Serikat juga mengalami perbaikan. Dari semua bentuk transformasi yang ada tersebut, adanya perubahan dalam sistem perencanaan ke arah sistem yang lebih liberal dengan menekankan mekanisme pasar atau lebih cenderung ke model Keynes daripada model Marxist

---

<sup>10</sup> Revolusi Cina menurut Mao Zedong adalah Sosialisme dan Komunisme, bukan Kapitalisme. Walaupun demikian, perekonomian kapitalis akan meluas dengan batas-batas tertentu dalam masyarakat tanpa terkecuali masyarakat Cina setelah terlebih dahulu menghilangkan hambatan-hambatan pembangunan kapitalisme melalui kemenangan revolusi (Cina) dan didorong dengan lingkungan internasional yang akan menunjang Revolusi Cina dalam mencapai masa depan Sosialis. Mao Tse Tung, *The Chinese Communist Party, from selected works of Mao Tse Tung*, Foreign Language Press, Peking, 1967 online working paper dalam [www.rojasdatabank.org](http://www.rojasdatabank.org) data didownload pada 21 November 2000

<sup>11</sup> Bruce Cummings,



Untuk memperlancar modernisasi, Deng Xiaoping menjalankan kebijaksanaan Pintu Terbuka dengan tujuan untuk menarik teknologi dan dana dari dunia. Dampak dari kebijaksanaan ini yang justru meluas pada perkembangan pemikiran-pemikiran Cina yang semakin terbuka dan maju. Adanya kebijaksanaan ini memungkinkan Cina menerapkan sistem perekonomian kapitalis dalam sistem sosialis Cina, atau dengan kata Deng sebagai penggunaan kapitalisme untuk membangun sosialisme. Langkah ini dimulai sejak tahun 1976, diresmikan dalam sidang pleno ke-3 Komite Pusat PKC XI pada bulan Desember 1978. Hasil sidang tersebut dipandang sebagai titik tolak demistifikasi Mao (*demaosisasi*). Dimana perjuangan kelas dinyatakan selesai dan perjuangan baru PKC yang harus ditempuh adalah menjalankan Empat Modernisasi. Chen Yun, Bo Yibo, dan Yao Yilin adalah para ekonom yang membantu Deng Xiaoping untuk menjalankan proses penyesuaian kembali demi stabilitas perekonomian serta merumuskan kembali pola pembangunan Cina yang berbeda dengan pola Soviet ataupun Mao.

Pada Desember 1981, Deng Xiaoping berhasil menyingkirkan para penentang kebijaksanaan-kebijaksanaan barunya, antara lain Hua Guofeng. Saat itu Cina dipandang telah memasuki tahap kedua pembangunan ekonomi negara berdasarkan garis kebijaksanaan dari Zhu Enlai, yaitu permulaan pelaksanaan Empat Modernisasi. Dalam proses reformasi, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil pada masa penyesuaian dikembangkan. Masalah peranan kekuatan pasar dalam struktur perekonomian terpusat menjadi persoalan. Dalam hal ini Chen Yun menganut bahwa pasar merupakan suatu pilihan alternatif cara-cara administratif untuk pengelolaan bagi rencana pusat. Sebaliknya bagi kelompok Maois seperti Li Xiannian, Hua Guofeng, dan Ye Jianying tetap memegang pada prinsip sentralisasi dan keunggulan rencana pusat. Sedangkan Deng Xiaoping, Zhao Ziyang dan Hu Yaobang berada ditengah walaupun cenderung mengikuti pendapat Chen Yun.

Meskipun demikian, semua kelompok tersebut menyepakati bahwa pembangunan ekonomi adalah tujuan utama pimpinan Cina dewasa ini. Mereka setuju untuk membuktikan bahwa sosialisme tidak sinonim dengan kemiskinan. Untuk itu, sejak tahun 1981 para pemimpin Cina yang pragmatis berkompromi



dengan memungkinkan sistem perekonomian Cina yang sentralistik disusupi dengan pengelolaan selazimnya yang berlaku dalam sistem kapitalis. Perkembangan ini pada awalnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Chen Yun bahwa sistem perekonomian sentralistik dapat berjalan seiring diterapkannya sistem pasar, asalkan terdapat perencanaan pusat tetrap menentukan sedangkan pasar merupakan komplementer saja. Agar dapat dilaksanakan maka dijalankannya kebijaksanaan desentralisasi baik secara administratif maupun ekonomi dimana badan-badan usaha diberi wewenang yang besar dalam menentukan sendiri cara kerja dan produksinya.

Konsensus awal yang dicapai adalah tentang perlunya pengadaan reformasi sementara yang belum tercapai adalah konsensus tentang sejauh mana melaksanakan reformasi dan kecepatannya tersebut. Kaum moderat yang dipimpin oleh Chen Yun lebih bersikap hati-hati sementara kaum radikal lebih berani menjauhkan diri dari perencanaan pusat. Mereka menginginkan keterbukaan Cina yang lebih luas agar kekuatan pasar menjadi dominan. Anggota kelompok radikal ini adalah Hu Yaobang, Zhao Ziyang, Hu Qili, Tian Jiyun dan Wang Zhaoguo. Sementara kelompok reformis moderat ingin mempertahankan kekuasaan administratif dan perencanaan pusat untuk menjag stabilitas perekonomian. Mereka beranggapan bahwa bila kelonggaran kekuasaan dibiarkan berkembang maka akan terjadi ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran ekspor-impor negara dan antara persediaan dan permintaan komoditi-komoditi utama yang akan menyebabkan defisit anggaran negara dan valuta asing. Pendekatan kaum moderat lebih bersifat revolusioner dengan menekankan pada proses reformasi struktural yang berlaku secara gradual dengan waktu penyesuaian yang lama terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi akibat proses reformasi tersebut.

Pembaharuan ekonomi Cina sulit untuk dijalankan bukan hanya karena pemimpin-pemimpin tingkat atas dalam struktur politik Cina terpecah dalam dua kelompok tersebut, namun juga karena perpecahan itu terjadi pula diantara para pelaksana reformasi. Secara historis hal itu merupakan warisan dari sejarah sebelumnya.



Sebelum reformasi diadakan, dimana sistem sentralistik masih dijalankan amat kuat maka sektor-sektor industri yang bergerak dalam industri berat dan badan-badan perencanaan serta departemen-departemen perindustrian pemerintah pusat bergabung dalam kelompok kepentingan “Koalisi Komunis”

Sejak reformasi dijalankan, kekuasaan koalisi komunis semakin berkurang. Konflik sektoral terjadi karena industri berat kini harus bersaing dengan industri ringan dan reformasi tersebut ternyata lebih menguntungkan bagi sektor industri ringan. Dalam hal ini sektor industri ringan cepat menyesuaikan diri dengan permintaan konsumen. Kelugasan sektor ini dipicu oleh karena sektor industri ringan lebih mengedepankan untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen (*Consumer oriented*) daripada sektor industri berat. Perkembangan selanjutnya adalah pengawasan harga dan produksi yang longgar dari kendali pusat dimana peranan kolektif lokal meningkat. Faktor lain yang memungkinkan fleksibilitas sektor industri ringan adalah sifat padat karya dan bukan padat modal sebagaimana industri berat. Sektor industri ringan juga dapat lebih aktif dalam kancah perdagangan internasional karena memang ada pasaran untuk produk-produknya seperti kerajinan tangan, barang konsumen, dan tekstil. Karena harga untuk produk tersebut lebih tinggi, dengan begitu laba bisa lebih besar, sehingga kebijaksanaan baru tentang penahanan laba dapat benar-benar dimanfaatkan.

Ketegangan lain yang terjadi adalah munculnya konflik regional karena tidak adanya propinsi-propinsi pedalaman yang mendapat prioritas bagi pengembangan modal luar negeri dibanding dengan propinsi-propinsi didaerah pesisir. Dengan Kebijakan Pintu Terbuka, daerah pertama yang dibuka bagi penanaman modal luar negeri adalah empat daerah zona ekonomi khusus (*jingji tequ*) yaitu propinsi Guandong dan Fujian. Kedua propinsi tersebut telah lebih dahulu dikembangkan dan mulai dibebaskan dari kekuasaan pemerintah pusat karena diharapkan dapat menarik modal asing, khususnya untuk orang Cina perantauan yang banyak berasal dari dua propinsi tersebut. Propinsi-propinsi Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, dan kotapraja-kotapraja Beijing dan Shanghai kemudian menyusul.







Dalam perekonomian kapitalis dimana efisiensi produksi dipandang penting, maka perlu diadakan sistem ganjaran untuk mendorong prestasi produsen. Selain itu, perlu juga diperhitungkan untung rugi perusahaan dan efisiensi perusahaan harus ditingkatkan. Untuk mempertahankan daya saing, badan-badan usaha harus mampu mengikuti idan menyesuaikan diri dengan trend pasar. Kewiraswastaan individu harus dikembangkan dimana setiap individu yang terlibat dalam perekonomian harus memiliki tanggung jawab yang besar atas perbuatannya, dimana hal ini tentu lebih mudah dilakukan dalam perekonomian yang terbuka.

Dengan demikian, Cina sebagai negara agraris kemudian menjatuhkan pilihannya untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai sektor pertama yang ditangani pimpinan Cina setelah Deng Xiaoping mengambil alih kekuasaan. Alasan lain adalah adanya perubahan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping akan lebih mudah dapat dijalankan oleh para petani. Pada bulan Desember 1978, dinyatakan bahwa untuk meningkatkan produktifitas para petani, maka perlu diadakan desentralisasi pengelolaan dalam produksi serta tata cara pemberian insentif dan *equalitarianisme* harus ditiadakan.

Desentralisasi dan perubahan tidak dapat dihindari lagi karena dengan sistem kolektifisasi yang berlaku selama strategi pembangunan masih menggunakan model Maois yang lebih mengedepankan insentif moral. Untuk memotivasi produksi pertanian haruslah ditingkatkan pendapatan materi mereka. Ciri-ciri strategi pembangunan kolektivisasi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap perencanaan terpusat dimana setiap produksi bawahan menerima alokasi dana atau modal dari unit di atasnya dan untuk modal ini maka unit tersebut harus memenuhi kuota produksi tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pusat atau atasnya juga sebelumnya.
- b. Sistem pemilikan kolektif pada tingkat tim produksi atas alat-alat produksi, termasuk tanah, mesin, dan hewan sedangkan industri pedesaan merupakan milik tingkat brigade atau komune.
- c. Pelaksanaan proyek-proyek berskala besar berdasarkan rencana produksi tahunan atau musiman. Rencana produksi tersebut menentukan cara



- pemanfaatan sumber daya tim produksi dan pada umumnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok besar dan menyangkut luas tanah yang besar pula.
- d. Sistem distribusi terpadu dimana pendapatan anggota tim tergantung kepada pendapatan non seluruh tim. Pembagian pendapatan disesuaikan dengan jumlah jam kerja yang dikumpulkan oleh setiap anggota tim.
  - e. Integrasi ekonomi, politik dan sosial agar setiap anggota komune menjadi suatu unit yang lengkap, yang produktif secara ekonomis serta mampu menangani masalah-masalah kesejahteraan anggota, mengatur kehidupan dan meningkatkan kesadaran politik anggota dan menyediakan kebutuhan konsumsi anggota.
  - f. Jaminan kesejahteraan bagi semua anggota komune yang tidak mampu membiayai hidupnya atau penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
  - g. Pengasingan teritorial karena semua keperluan individu disediakan oleh unit keanggotaannya. Penduduk desa terasing karena tidak dapat pindah ke unit lain

Menurut rasionalisme kelompok Maois, kehidupan kolektif pedesaan dengan ciri-ciri tersebut mempunyai berbagai keuntungan. Antara lain diharapkan bahwa dengan cara ini, petani dapat lebih efisien memanfaatkan tanah, sistem irigasi, modal, dan tenaga kerja. Selain itu diharapkan bahwa taraf kehidupan para petani dapat meningkat dan kebutuhan primer mereka dapat dijamin. Melalui sistem kolektif pemerintah Cina dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap penduduk dengan berbagai programnya, seperti urbanisasi, penekanan tingkat kelahiran, dan penyediaan pangan.

Dengan kondisi geografis Cina yang memiliki wilayah yang luas, kolektivisasi membawa harapan baru setelah Kebijakan *Land Reform* selesai pada tahun 1952. Hal tersebut dipandang logis, mengingat petani Cina saat itu tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola pertanian mereka selain modal tanah dari *Land Reform*. Karena keterbatasan modal tersebut, para petani Cina tidak efisien dalam mengolah tanah secara optimal. Kemudian dengan terbentuk



komune-komune yang sederhana ini sehingga dapat berkembang menjadi koperasi-koperasi produksi pertanian yang lebih kompleks, sehingga sumber daya yang pada awalnya tidak efisien menjadi lebih efisien.

Ketika Kebijakan Lompatan Jauh Kedepan dicanangkan, proses kolektivisasi mencapai puncaknya dengan terbentuknya komune-komune rakyat. Perkembangan pedesaan bergerak dinamis dimana sektor pertanian diharapkan dapat menopang sektor industri dengan meningkatkan penyediaan barang baku dan pangan untuk industri kota. Selain itu, komune juga diharapkan dapat membangun industri berskala kecil. Diawal Kebijakan Lompatan Jauh Kedepan dijalankan, terdapat 25.000 komune didirikan dengan anggota rata-rata 10.000 anggota, akan tetapi dalam waktu beberapa bulan saja terbukti bahwa meski dengan anggota yang banyak komune-komune tersebut tidak dapat mengelola dengan baik unit-unit sosial yang begitu besar dan para petani juga tidak dapat menerima kehidupan yang begitu dipaksakan.

Pada tahun 1978, pembangunan ekonomi kembali menjadi pusat perhatian pemimpin-pemimpin Cina. Perkembangan sektor pertanian setelah dianalisis, disimpulkan bahwa perkembangan sektor pertanian kurang memuaskan. Sejak tahun 1949 hingga tahun 1978, nilai total produksi pertanian naik 3,63 kali. Prestasi tersebut masih dibawah tingkat kemajuan negara-negara lain dan juga tidak dapat mengimbangi kenaikan jumlah penduduk Cina. Sementara dilain hal gerakan-gerakan politis dimasa Revolusi Kebudayaan mengganggu produksi pertanian, sehingga produksi pertanian perkapita pada tahun 1976 hanya sedikit berbeda dengan produksi tahun 1956.

Oleh karena itu, dilakukan perubahan berkenaan dengan target yang ingin dicapai dimana sektor pertanian ditargetkan mencapai laju pertumbuhan sebesar 5,7% pertahun. Keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari langkah-langkah yang diambil oleh Liu Shaoqi pada awal tahun 1960-an. Tanah yang dapat diolah secara pribadi oleh petani akan diperluas. Untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah akan menaikkan harga beli dari hasil sektor pertanian. Keputusan penting adalah diberlakukannya kembali sistem insentif dimana pendapatan petani



akan ditentukan oleh jenis dan mutu pekerjaan yang dilakukannya, sesuai dengan prinsip sosialis “bekerja sesuai kemampuan, menerima sesuai dengan kerja”.

Sistem insentif moral yang menggunakan sistem *chi daguofan* atau makan dari periuk bersama dan sistem *tie fanwan* atau periuk nasi besi yang menjamin pekerjaan dan pendapatan individu tanpa memperdulikan prestasi kerjanya ditiadakan. Digantikan dengan sistem tanggung jawab produksi atau *zerenzhi*. Suatu sistem yang pada dasarnya merupakan aplikasi dari sistem desentralisasi dimana sistem tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar pada individu untuk menentukan sendiri produksi mereka dan mengaitkan imbalan dengan hasil kerja. Sistem *zerenzhi* juga memberikan kelugasan dalam pelaksanaan rencana dari pemerintah pusat karena kewenangan pengambilan keputusan mulai beralih dari pemerintah ke petani sendiri dan pelaksanaan pusat juga harus memperhitungkan faktor-faktor pasar, suatu bentuk transformasi sosialis ke arah kapitalisme yang melihat kekuatan pasar sebagai faktor penting pengambilan keputusan yang mengarah pada pelaksanaan desentralisasi ekonomi.

Dengan sendirinya kehidupan kolektif di pedesaan mulai pudar semenjak sistem tanggung jawab diterapkan. Walaupun tidak diakui secara resmi, penerapan sistem ini berarti bahwa telah terjadi privatisasi tanah, penggunaan harga-harga pasar oleh pihak-pihak yang menandatangani kontrak untuk menentukan volume, jenis dan pengelolaan produksi, serta terjadi devolusi wewenang pengambilan keputusan walaupun terbatas namun tetap meluas. Dengan kata lain, penerapan sistem tanggung jawab berakibat pada pelaksanaan desentralisasi administrasi dalam struktur pemerintahan Cina.

Pola kehidupan di pedesaan Cina mengalami transformasi dari sistem kolektif menjadi sistem petani penyewa dengan negara sebagai tuan tanah. Negara yang diwakili oleh kolektif adalah pemilik tanah, sementara para petani dapat mengolah tanah tersebut asalkan mereka menyerahkan kewajiban-kewajibannya pada negara. Dengan demikian, sebenarnya sistem tanggung jawab tidak memudarkan kehidupan sosialis di desa karena selama tanah sebagai alat produksi paling dasar masih tetap milik kolektif atau negara, sosialis tetap bertahan dan berbeda dari perekonomian perorangan berdasarkan milik pribadi.



Walaupun peranan pasar kini lebih besar, kebebasannya masih tetap dibatasi oleh intervensi administratif aparat negara. Akibatnya adalah terciptanya suatu sistem harga yang rumit dengan berbagai tingkat, yaitu harga pasar, harga istimewa, harga quota, harga diatas quota dan harga yang dirundingkan. Keterlibatan pemerintah tidak dapat dihindari terutama untuk menjaga agar target pembangunan ekonomi dan target penerimaan negara tercapai, agar produksi pertanian dapat memenuhi kebutuhan industrialisasi, dan agar pemerataan antar desa dapat dijaga. Pemerintah Cina melakukan intervensi dengan penguasaan perusahaan-perusahaan negara atas distribusi barang modal yang diperlukan untuk produksi, termasuk alokasi tenaga kerja.

Hal yang demikian ini memberikan dampak politis sebagai akibat usaha untuk memadukan sistem perekonomian sentralistik dengan sistem pasar. Dampak tersebut berupa perebutan kekuasaan antar kelompok kepentingan tertentu atas sumber daya ekonomi yang terbatas. Kelompok kepentingan yang paling merasakan dampak devolusi kekuasaan sejak diterapkan sistem tanggung jawab adalah para kader partai yang berada di desa. Tugas mereka sebagai pengawas pelaksanaan garis partai semakin sulit dan tidak jelas kedudukan dan pengaruh politis mereka pun berkurang. Secara lebih luas, peranan PKC dalam situasi ini menjadi kabur. Rasionalitas ekonomi yang menuntut adanya efisiensi, persaingan, kemampuan berwiraswasta seseorang lebih dominan daripada angan-angan ideologi dan moralisme sosialis yang menitikberatkan pada nilai-nilai persamaan, pemerataan, kolektivisme, dan altruisme. Oleh karena itu, pada bulan September 1986 komite Pusat PKC ke-12 mengumumkan bahwa pengelolaan perekonomian dan politik harus dipisahkan. Walaupun pelaksanaannya masih kurang jelas, langkah awal telah diambil dengan membubarkan sistem komune dan mendirikan kembali aparat pemerintah berupa xiang pada tingkat komune dan mendirikan komite-komite pudesas pada tingkat brigade yang terpisah dari pengeola usaha-usaha ekonomi yang berada dibawah naungannya.

Dengan sistem administrasi baru tersebut, Hu Yaobang, Zhao Ziyang, dan Deng Xiaoping memformulasikan strategi jangka panjang modernisasi perekonomian Cina. Program Empat Modernisasi Deng, dimaksudkan untuk



membuat perekonomian Cina menjadi modern, dengan sektor-sektor industri, pertanian, iptek dan pertahanan sebagai subyek utama pembangunan, dan diproyeksikan untuk meningkatkan pendapatan perkapita.<sup>14</sup>

#### a. Industri

Modernisasi industri dipusatkan pada pengembangan sumber-sumber energi, batubara, minyak bumi, tenaga air dan panas bumi. Secara nasional prestasi Cina mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan. Penataan ulang kebijakan nasional yang memfokuskan industri menengah dan besar, diperkirakan dapat meningkatkan industri nasional Cina. Selain itu, investasi modal yang diinjeksikan akan membuka peluang untuk mengatasi ketimpangan distribusi hasil industri di propinsi-propinsi Cina.

Sektor perekonomian non-agraris atau industri di Cina terpusat di kota-kota dan terdiri terutama dari perusahaan-perusahaan milik negara diberbagai bidang usaha. Ciri dari sektor perekonomian ini adalah sentralisasi pengelolaan yang merupakan warisan dari zaman pre-Repelita I karena ketika Partai Komunis Cina mulai berkuasa, sentralisasi memang dianggap oleh pimpinan Marxis sebagai anarki perekonomian kapitalis. Perekonomian yang sentralis juga dapat dianggap lebih mudah mengatasi blokade-blokade kaum imperialis pada waktu itu dan untuk menangani inflasi yang terjadi.

Selama Repelita I, Cina mengikuti pola pembangunan Uni Soviet yang mengandalkan sentralisasi. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan negara langsung membawahi kementerian-kementerian pemerintahan pusat dan segala kegiatan ekonomi daerah dipantau oleh cabang-cabang daerah aparat pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat menentukan harga, pendapatan, quota produksi, dan alokasi persediaan barang dan produk berdasarkan rencana nasional. Pajak dan laba perusahaan-perusahaan diakumulasi di tingkat pusat dan dialokasikan kembali kepada perusahaan-perusahaan daerah. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1957, sebanyak 9.300 perusahaan lebih dibawah kekuasaan pengelolaan pemerintah pusat dibandingkan dengan 2.800 pada tahun 1953.

---

<sup>14</sup> *Op Cit.*



Ketika Kebijakan Lompatan Jauh Kedepan berlangsung, terjadi desentralisasi administrasi dimana aparat pemerintah daerah diberi wewenang lebih besar. Akan tetapi, setelah Kebijakan itu ditinjau kembali, perekonomian Cina kembali dikontrol oleh pusat karena ternyata desentralisasi yang terjadi selama kebijakan tersebut diterapkan berlangsung tanpa kendali dan koordinasi. Keraguan mengenai efektifitas sentralisasi dan desentralisasi menjadi dilema yang dihadapi oleh para pemimpin Cina selama Repelita I pada tahun 1957.

Berdasarkan pada pengalaman tersebut, muncul kesadaran bahwa bila ingin mencapai efisiensi kerja dan produktivitas yang tinggi, perlu diadakan desentralisasi berdasarkan asas-asas ekonomi dan pemberian otoritas yang lebih besar langsung kepada perusahaan-perusahaan milik negara, terutama bidang perencanaan, pemasaran, pembiayaan, dan ketenagakerjaan. Hal yang demikian itu berbeda dengan pelaksanaan desentralisasi dimasa lalu yang sekedar terbatas pada pemberian otoritas kepada pemerintah daerah, desentralisasi yang bergulir pasca tahun 1978 lebih luas lagi menjangkau otoritas pada masing-masing perusahaan. Dengan demikian, sebelum reformasi Cina dijalankan, desentralisasi sudah pernah dijalankan dalam cakupan yang terbatas, hanya menyentuh administratif dan bersifat sederhana sedangkan setelah reformasi Cina tahun 1978 desentralisasi diperluas menjangkau aspek-aspek administratif dan ekonomi.

Desentralisasi tersebut diusulkan dalam sidang Komite Pusat Ke-11 PKC pada bulan Desember 1978. Semenjak itu mulai dijalankan perekonomian yang lebih liberal, meskipun di sektor industri tidak mengalami reformasi sebagaimana sektor pertanian yang lebih mudah melakukan reformasi. Hal ini dikarenakan dalam sektor industri terdapat berbagai hambatan sebagaimana berikut:

1. Sektor industri sebenarnya merupakan perekonomian negara, artinya sektor ini dikuasai dan dijalankan oleh negara dengan sistem administratif yang kaku dan dikuasai oleh para birokrat.
2. Ketidaksiapan perusahaan-perusahaan dan para birokrat untuk menggunakan wewenang baru mereka demi kepentingan ekonomi.



3. Sektor perekonomian negara terbiasa dengan campur tangan administratif dan sistem harga yang telah ditentukan oleh negara dan bukan oleh mekanisme pasar.<sup>15</sup>

Awal dari desentralisasi ekonomi, khususnya yang berlangsung di kota-kota di Cina adalah pada sistem pendanaan karena langkah desentralisasi yang pertama adalah pemberian ijin pada perusahaan untuk menahan sebagian dari laba perusahaan. Besar kecilnya laba yang dapat ditahan dihitung berdasarkan laba riil dan dana pengembangan perusahaan di tahun sebelumnya. Pertama kali formula ini dijalankan di Propinsi Sincuan dan baru kemudian dijalankan secara nasional pada bulan Juli 1979. Pada tahun 1980 sistem ini diubah menjadi sistem kontrak, dimana perusahaan-perusahaan menentukan kuota keuntungan tahunan yang harus diserahkan ke negara dan kelebihanannya bisa ditahan untuk perusahaan sendiri. Pada akhir tahun 1981, 80% dari semua perusahaan negara mengikuti sistem ini. Dikarenakan adanya kesulitan untuk menentukan target keuntungan akhirnya diciptakan sistem perpajakan sekitar tahun 1982-1983 yang dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghitungan pengeluaran dan pendapatannya secara tepat. Dengan demikian sistem kontrak digeser dengan sistem pajak, dimana perusahaan-perusahaan dikenakan pajak penghasilan dan pajak penjualan. Selain ini ada pula pajak atas aktiva tetap seperti tanah dan peralatan.

Untuk menunjang desentralisasi administratif, dilakukan debirokratisasi agar tercipta efisiensi birokratis. Untuk itu dilakukan pembaharuan keuangan terkait seperti menggantikan dana negara dengan pinjaman bank yang harus dikembalikan. Mengingat bahwa perusahaan-perusahaan kini dapat menahan sebagian dari keuntungan mereka, mereka dapat menguasai lebih banyak lagi dana untuk investasi. Akibatnya muncul proyek-proyek baru yang tidak sesuai dengan anggaran pemerintah atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan persediaan sumber daya nasional, seperti investasi untuk produksi barang konsumen dan perumahan.

---

<sup>15</sup> Natalia Soebagio, "Pembaharuan di Cina: Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik", dalam *Global Jurnal Politik Internasional*, No 1, 1990, halaman 61



permintaan dan penawaran. Reformasi harga yang dijalankan ini bukan berarti jual tidak memiliki dilema. Akibat pembaharuan sistem harga dan kelonggaran kendali harga adalah munculnya inflasi. Untuk mengendalikan laju inflasi pemerintah memberikan subsidi yang besar dan mengembalikan kendali harga-harga produk tertentu.

#### b. Pertanian

Berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun V yang dimulai tahun 1976-1980, investasi dibidang pertanian mencapai 24,6 milyar Yuan, atau sekitar 10 % dari investasi total. Pada Pelita VI (1981-1985), investasi sektor pertanian menurun sebesar 28 % atau menjadi 17,8 milyar Yuan yang sama dengan 5,2 % dari investasi total. Sedangkan pada Pelita VII (1986-1990), sektor pertanian hanya diperkirakan menerima 14,7 milyar Yuan atau sekitar 3 % dari investasi total sebesar 375 milyar Yuan.<sup>16</sup>

Modernisasi pertanian yang ditata kembali melalui sistem sentralisasi ini dapat mengembalikan surplus pertanian yang pernah dialami pada awal-awal modernisasi dahulu. Surplus ini sebagian besar didorong oleh semakin luasnya kaum petani dalam mengolah sawahnya, menyewa lahan untuk jangka panjang, dan tersedianya pasar-pasar terbuka. Mengingat sektor-sektor dipedesaan telah mampu menampung 400 juta warga, modernisasi pertanian lebih dititikberatkan pada pengembangan industrialisasi pedesaan yang akan membuka peluang bagi warga pedesaan Cina. Industrialisasi pedesaan bukan saja untuk meningkatkan penghasilannya melainkan juga akan menciptakan pemerataan pembangunan pertanian antar propinsi.

#### c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Modernisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan utama keberhasilan modernisasi dibidang-bidang lainnya, dengan meningkatkan peranan kaum intelektual, terutama kaum ahli dan mahasiswanya. Peningkatan ini dilakukan dengan mengembangkan program-program riset nasional, yang difokuskan pada sektor pertanian, sinar laser, fisika nuklir, dan rekayasa genetika.

---

<sup>16</sup> Linda E. Handayani, *Pengaruh Kebangkitan Ekonomi RRC terhadap Perekonomian ASEAN Tahun 1980-1990an*, FISIP Universitas Jayabaya, Jakarta, 1997. Halaman 27



oleh Deng asalkan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya tercapai, maka ia tidak akan mempermasalahkan bentuk ekonominya. Dengan pernyataan ini, Deng yakin bahwa apabila rakyat hidup berkecukupan, maka stabilitas politik dapat dipelihara.

Pada tanggal 20 Oktober 1984, Komite Pusat PKC mengesahkan keputusan mereka mengenai pembaharuan struktur ekonomi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pengelolaan perusahaan-perusahaan negara dan perekonomian kota, terutama terhadap aspek perencanaan dan pengelolaan produksi dan investasi serta pendapatan dan kesejahteraan pekerja. Secara garis besar keputusan tersebut berisi hal berikut:

1. Semua perusahaan kota harus bertanggung jawab atas untung rugi mereka dan para manajer akan diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengambil keputusan.
2. Pemerintah pusat maupun daerah tidak lagi terlibat dalam manajemen perusahaan-perusahaan akan tetapi hanya akan berperan sebagai pengawas.
3. Sistem pembayaran akan diberikan berdasarkan prinsip “ kepada masing-masing menurut kerjanya”.
4. Perekonomian pribadi dan kolektif akan dibiarkan berkembang.<sup>18</sup>

Dalam situasi dimana perekonomian diliberalisasi, peran negara berkurang. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dan persaingan dibiarkan secara terbuka. Sebagai ilustrasi bahwa sejak tahun 1984 pimpinan pabrik mempunyai otoritas lebih besar atas penentuan produksi, harga, dan distribusi hasil produksinya, atas pengangkatan, pemecatan dan pembayaran gaji karyawannya walaupun masih terbatas. Hal yang demikian ini membawa suasana baru dalam masyarakat Cina, khususnya di kota-kota. Dampak negatif dari liberalisasi ekonomi Cina adalah korupsi berupa penyalahgunaan pengaruh dan jabatan para pejabat. Liberalisasi membuka kesempatan bagi kaum birokrat Cina untuk memanfaatkan kekuasaan mereka yang dapat diperjual belikan berdasarkan kelebihan mereka mendapatkan akses informasi dan barang. Sebenarnya mereka tidak memiliki kapabilitas dan

---

<sup>18</sup> Ibid, halaman 62



### 3.3.3 Peristiwa Tiananmen

Tak dapat disangkal lagi bahwa kejadian politik yang dramatis di akhir tahun 1980-an dalam reformasi Cina adalah saat demonstrasi massa pro demokrasi di Beijing pada tahun 1989. Demonstrasi ini merupakan dampak reformasi struktur politik Cina di akhir tahun 1970-an. Setelah itu, hasil perekonomian dan ekspor Cina mengalami peningkatan yang cepat dibanding dengan India, Uni Soviet, Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Hongkong. Reformasi ekonomi yang dijalankan di Cina diikuti dengan reformasi politik.

Peristiwa Tiananmen 1989 merupakan momentum munculnya kembali perbedaan pendapat tentang negara sosialis Cina yang hendak dibangun. Pada tanggal 17 April 1989 di Beijing, puluhan ribu mahasiswa mengadakan pawai untuk memperingati kematian Hu Yaobang. Pawai ini kemudian berubah menjadi gerakan yang berdimensi politik setelah mereka menuntut perbaikan kehidupan demokrasi dan kebebasan politik, mereka juga menuntut mundurnya Deng dan PM. Li Peng dari aktifitas politik, karena kedua tokoh ini dianggap sebagai penghalang pelaksanaan modernisasi politik. Gerakan mahasiswa menuntut demokrasi merupakan anti klimaks terhadap proses modernisasi Deng sendiri.

Munculnya Deng Xiaoping sebagai pemimpin terkuat di Cina menandakan kuatnya posisi dan pengaruh kaum reformis atas kaum konservatif. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perlawanan politik dari lawan-lawan politik Deng. Hal ini dilihat dari dicopotnya Sekjen PKC Hu Yaobang pada Januari 1987 dari kedudukannya karena dianggap bertanggung jawab atas meluasnya aksi demonstrasi mahasiswa yang dimulai sejak akhir tahun 1986. Kemudian adanya kampanye antiliberalisasi borjuasi yang dilakukan pertengahan tahun 1987. Setelah Kongres Nasional PKC ke-13, Oktober 1987 dan Kongres Rakyat Nasional, Maret-April 1988, kedudukan kaum reformis semakin kuat. Hal ini terlihat dari menguatnya komitmen untuk melakukan pembangunan ekonomi modern dan menjalankan Empat Modernisasi.

Meskipun kedudukan kaum reformis kuat, namun hal ini tidak memberikan jaminan bahwa dalam diri kaum reformis terdapat kesamaan pandangan tentang pembaharuan. Ketidak sepakatan ini dilandasi masalah ruang



lingkup dan penentuan waktu reformasi yang dijalankan. Bagi kaum reformis moderat, pembaharuan cenderung dilakukan secara gradual dan terbatas sementara bagi kaum reformis radikal maka pembaharuan dilakukan secara menyeluruh dan membuka perekonomian Cina lebih luas lagi terhadap dunia internasional dengan mengurangi peran serta partai dalam politiknya.

Tarik menarik antara reformis radikal dan moderat terlihat dari penanganan masalah penentuan harga pada tahun 1986. Pada akhir dari rapat pleno komite sentral PKC pada akhir September 1988 diputuskan sebuah rencana baru untuk dua tahun kedepan. Rencana ini tidak mencerminkan adanya reformasi harga namun justru menonjolkan aspek dan peran negara dalam sektor ekonomi yang menguat. Rektifikasi atau penyesuaian ini berdampak pada resentralisasi ekonomi dan beberapa bidang-bidang lainnya. Zhao Ziyang dianggap sebagai orang yang bersalah atas terjadinya inflasi dan naiknya harga pada tahun 1988 yang berakibat buruk pada perekonomian nasional. Akhirnya masalah perekonomian diserahkan pada PM. Li Peng.

Menghadapi perkembangan politik internasional, posisi kaum reformis membuat Cina lebih terbuka terhadap dunia luar, tanpa terkecuali gelombang globalisasi. Pandangan Deng Xiaoping yang reformis menganggap bahwa Cina memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan taraf hidup rakyat untuk memperkuat negaranya. Dalam hal ini Deng menjalankan kebijaksanaan pemberian wewenang yang besar terhadap tenaga spesialis atau ahli sementara *material reward* dianggap sebagai hal yang tabu.

Kondisi yang demikian itu memunculkan kontroversi dalam pemikiran para pemimpin Cina antara semangat untuk melaksanakan reformasi dengan komitmen untuk memenuhi estetika sosialisme. Berpijak pada hal itu maka modernisasi yang terjadi di Cina tidak bisa berjalan dengan cepat, meski hampir semua pemimpin Cina memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan Empat Modernisasi. Perbedaan antara pemimpin-pemimpinnya membuat mereka saling curiga dan mengawasi untuk saling memberikan kritik dan menyerang kelemahan masing-masing pemimpin saingan politiknya.



tidak didevaluasi, meskipun ada ancaman krisis ekonomi dibelakangnya. Untuk itu Cina berusaha membangun hubungan dengan AS, meskipun saat itu AS melakukan tekanan politis terhadap Cina.

Tindakan Cina terhadap aksi demonstrasi pada waktu itu diisikapi oleh AS dengan ancaman pencabutan status dagang istimewa Cina. Keretakan hubungan dagang kedua negara ini dimulai dari kecurigaan AS terhadap Cina yang telah melanggar hak cipta intelektual (*intellectual property rights*).<sup>20</sup> Atas kecurigaan dalam praktek dagang ini, AS mengalami defisit perdagangan yang makin melebar di Cina. Data perdagangan kedua belah pihak menunjukkan, AS mengekspor barang senilai US\$ 8,8 milyar ke Cina tahun 1993, dan mengimpor barang senilai US\$ 31,5 milyar. Pada sembilan bulan pertama di tahun 1994, AS mengekspor barang senilai US\$ 8,5 milyar ke Cina, dan mengimpor barang senilai US\$ 35,9 milyar dari Cina.<sup>21</sup>

Masalah ketimpangan perdagangan ini membuat AS risau, dalam bertindak menghadapi Cina bagi AS bukanlah perkara mudah. Betapa tidak, Cina sendiri tahu bahwa AS sangat tergiur dengan pasar domestiknya yang sangat potensial. Kehilangan pasar Cina dapat menjadikan bencana bagi pengusaha AS. Adapun bidang yang memiliki prospek bagus di Cina seperti telekomunikasi, pesawat terbang, elektronik, juga industri kimia. Namun dalam kaitan perdagangan yang diisukan dengan masalah hak cipta, paten, serta hak asasi manusia dan demokrasi sangat peka bagi AS. Cina sendiri yang dihadapkan pada masalah ini seakan tidak bergeming, walaupun perekonomian Cina sekarang telah bergerak ke sistem ekonomi pasar, namun Cina tidak sesekali ingin melonggarkan masalah demokrasi di negeri itu. Ini merupakan alasan Cina yang nampaknya tidak akan mengikuti jejak Gorbachev, yang menderegulasi politik dan demokrasi, baru setelah itu deregulasi ekonomi. Formula itu diyakini betul oleh pemimpin Cina sebagai salah resep.

---

<sup>20</sup> Terdapat lebih dari 30 perusahaan yang melakukan pemalsuan barang-barang produksi AS, seperti software komputer, obat-obatan, produk pertanian, karya audio visual, produk kimia, serta buku dan majalah. Selengkapnya pada R.L. Tobing, "Perang Dingin Perdagangan AS-Jepang: Prinsip-prinsip Perdagangan Bebas", dalam Buletin Ekonomi Bapindo, Mei-Juni 1995, hal 51.

<sup>21</sup> Kompas, 5 Februari 1995.



Masalah penciptaan suatu masyarakat Cina yang demokrasi, antara keinginan AS dan Cina sendiri memiliki persepsi yang sangat berbeda. AS menghendaki demokrasi politik sebagai syarat bagi kemajuan ekonomi, namun secara faktual dengan rumus kebalikan ini Cina telah membuktikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negerinya, sampai diatas dua digit. Upaya perundingan yang ditempuh untuk menyelamatkan pecahnya perang dagang AS-Cina kearah yang lebih serius, telah ditempuh dengan perundingan wakil perdagangan kedua belah pihak. Dari tanggal 18 Januari, hingga tanggal 28 sampai batas waktu yang ditetapkan AS untuk mengancam Cina yaitu 4 februari 1995 berakhir, masih menemui jalan buntu. Sehingga wakil perdagangan AS, merasa perlu untuk mengenakan sanksi proteksi tarif (*tariff barrier*) sampai 100% bagi barang impor Cina. Ini sebagai sikap klimaks AS, yang melihat ketidakpedulian Cina berani menentang AS.<sup>22</sup>

Sanksi perdagangan yang akan efektif diterapkan AS mulai tanggal 26 Februari, terhadap impor Cina yang senilai US\$ 1,08 milyar. Kendatipun pengenaan terhadap 35 produk Cina dengan tarif 100%, tidak akan sangat mengganggu perdagangan Cina terhadap perdagangan dunia pada umumnya. Malahan sebaliknya Cina balik mengancam AS, dengan akan mengenakan sanksi serupa pada barang AS yang masuk ke Cina., antara lain produk kimia, obat-obatan, mainan elektronik, rokok, minuman keras, compact disk, serta tv dan film buatan AS. Tindakan ini akan dilakukan Cina bila AS memproteksi impor barang Cina, seperti alat penjawab telepon, peralatan olah raga, lukisan serta sepeda.

Upaya penyelesaian yang konstruktif antara AS-Cina masih terbuka, kendatipun AS sendiri telah memberi batasan waktu akhir tanggal 5 Februari lalu, namun efektifitas sanksi yang akan diterapkan berlaku mulai 26 Februari 1995.<sup>23</sup> Ada beberapa perbedaan mendasar mengenai versi perang dagang antar negara raksasa ekonomi ini. Sengketa dagang AS dengan Cina, dimana meletakkan AS sebagai *center of analysis*. AS berada dipihak yang mempunyai "*bargaining*

---

<sup>22</sup> Rene L. Pattiradjwane, "Perundingan Cina-AS Berakhir Tanpa Hasil Kesepakatan", Kompas, 30 Januari 1995.

<sup>23</sup> Rene L. Pattiradjwane, "Kesalahpahaman dan Upaya Kompromi Cina-AS", Kompas, 7 Februari 1995



*position*” lemah. Dalam hal ini Cina menjadi kuat, disebabkan berpegang pada empat anggapan, yaitu : *pertama*, Cina menganggap akses pasar (*market access*) nya ke AS masih kecil apalagi minus ekspor dari Hongkong. Dari itu Cina dapat mengalihkan akses pasarnya ke mitra dagang lain, selain dengan AS. *Kedua*, Cina tahu bahwa AS sangat berkepentingan atas pasar Cina, terutama bila melihat prospek calon konsumen yang mencapai 1 milyar jiwa, adalah peluang pasar paling gemuk dengan hanya pada satu negara. *Ketiga*, Cina adalah salah satu negara yang tidak ikut meratifikasi Perjanjian GATT, yang kini telah menjadi WTO. Kaitannya dengan ini, bila efektivitas fungsi WTO berjalan nanti, dalam hal kasus penyelesaian sengketa dagang AS-Cina WTO tidak dapat berperan sebab Cina bukan anggota WTO. Lagi pula AS juga tidak dapat memakai media WTO untuk memaksakan kehendaknya kepada Cina, seperti halnya AS menyetir PBB. Kendatipun keduanya adalah anggota penting forum APEC (*Asian Pasific Economic Cooperation*). *Keempat*, Cina merasa tidak dapat didikte AS, yang berbeda dengan Jepang baik dari segi politik maupun segi militer. Cina merasa mampu berdikari dengan kemampuannya. Ini dibuktikan Cina, dimana AS akhirnya memperpanjang status MFN-nya yang bernilai milyaran dollar AS bagi keuntungan Cina, yang tadinya ingin digunakan AS sebagai alat untuk menghukum Cina atas Tragedi Tiananmen.<sup>24</sup>

Secara spesifik dalam perdagangan internasional, yang lebih “oriented profit center” maka latar belakang tindakan AS bermuara pada gap antara ekspor yang lebih kecil dibandingkan dengan impor. Ironisnya bagi AS defisit perdagangan ini cenderung terus meningkat dalam arus perdagangannya dengan Cina. AS berpendapat bahwa Cina telah jelas-jelas melanggar prinsip perdagangan sehat dan jujur (*fair trade*) yang berlaku universal. Terutama yang menyangkut tindakan Cina, yang tidak melindungi hak cipta intelektual. Pemerintah Cina telah membiarkan perusahaan-perusahaan di Cina untuk melakukan plagiator terhadap produk-produk AS, yang diproduksi di propinsi

---

<sup>24</sup> Rene L. Pattirajdawane, “AS Umumkan Sanksi Perdagangan pada Cina”, Kompas, 5 Februari 1995.



Guangdong. Secara tidak langsung aktivitas ini telah mendongkrak ekspor Cina, hingga termasuk dalam kategori 10 besar negara pengekspor di dunia.

Bila kita melihat ke belakang, maka tindakan Cina ini adalah bagian dari contoh masalah yang banyak ditemui di negara-negara yang sedang membangun. Dimana mereka alpa pada asumsi-asumsi yang belaku dalam menerapkan strategi kebijaksanaan "*inward looking*" (substitusi impor), berhubungan dengan batas waktu hingga dapat beralih ke strategi "*out ward looking policy*" (promosi ekspor). Kesalahan dalam menerapkan strategi ini dapat dimungkinkan dengan tingginya semangat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sementara.<sup>25</sup>

Pada akhirnya, Jiang menghendaki agar Cina segera mungkin dapat diterima menjadi anggota dari GATT/WTO sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan perekonomiannya. Cina dalam posisi disimpang jalan, hal ini berkenaan dengan tekanan yang diberikan Barat berupa sanksi ekonomi dan politik isolasi. Diwaktu yang bersamaan, rakyat Cina menarik kepercayaannya pada para pemimpinnya.

#### 3.3.4 Reformasi Ekonomi

Dalam hal reformasi ekonomi, pengaruh reformasi politik juga sangat terasa dampaknya. PM Li Peng, sebelumnya dengan kebijaksanaan sentralisasinya sangat menentukan sejauh mana reformasi ekonomi boleh dilaksanakan, dan ini nampak dalam bentuk diperkenalkannya liberalisasi terbatas, dengan tetap mempertahankan pola-pola pembatasan dan pengawasan yang ketat. Misalnya dengan adanya larangan swastanisasi di sektor-sektor keuangan dan pembiayaan, perdagangan luar negeri, real estate, perkereta apian, perkapalan sampai sektor-sektor manufaktur produk kimia, obat-obatan dan bahan baku penting.

Pemerintah Cina dibawah pimpinan Deng memutuskan reformasi ekonomi, dengan mengganti ekonomi terimpin dengan ekonomi pasar. Komite Pusat PKC merespon hal ini dengan memberikan ijin dilakukannya desentralisasi (yang pertama kali dilakukan di dua propinsi, Guangdong dan Fujian untuk mengadopsi hal-hal dan kebijakan khusus berkenaan dengan pemberian status

---

<sup>25</sup> Tobing, "UU Section 301 dan kebijaksanaan Perdagangan AS", Kompas, 13 Mei 1995



SEZ's). Pertumbuhan ekonomi pertahun. Semenjak Deng mengimplementasikan ekonomi dan politik pintu terbuka di Cina sangat pesat. Dalam menjalankan reformasinya, Deng merasa sebagaimana yang dikatakan olehnya " *If the reforms in the countryside work out very well in three years...* ". Pertumbuhan ekonomi itu terjadi tidak hanya di daerah kota saja, perekonomian pedesaan juga bergerak tumbuh menuju spesialisasi. Dengan insentif yang diterapkan, para petani berlomba-lomba meningkatkan dengan harapan hasil penjualan juga meningkatkan dan dapat menjual pasar bebas.

Reformasi yang diawali dari kebijakan Pintu Terbuka ini, memberikan hasil positif, pendapatan penduduk di pedesaan meningkat sebelumnya mengalami stagnasi, hasil rata-rata pertanian naik berkisar 10% pertahun. Jumlah perusahaan swasta meningkat dari 150.000 menjadi 1.100.000. Dengan naiknya produksi pertanian, produksi industri pun ikut berkembang. Ekonomi Cina mengalami peningkatan, selama periode tahun 1979-1988 pertumbuhan rata-rata GNP mencapai 9,5%.

Keberhasilan sektor ekonomi di pedesaan itu bisa tercapai dengan kebijakan pendukung, seperti desentralisasi pengambilan keputusan memberikan kesempatan bagi para manajer untuk meningkatkan produksi tanggung jawab, dan efisiensi kerja. Deng berhasil merekonstruksi hegemoni dengan membangun sosialisme yang berkarakter Cina didukung oleh dua kebijakan yaitu: *pertama*, Kebijakan Pintu Terbuka. *Kedua*, telah dilakukan kembali praktik kapitalis-sosialis dalam kehidupan di Cina. *Ketiga*, tuntutan terhadap hal-hal khusus atau fleksibel bagi terciptanya bentuk ruang dan waktu geo-ekonomi baru untuk menghubungkan kembali Cina dengan sistem regional maupun global.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Lee J. Alston, Thrain Eggertsson, Douglass C. North (ed.), *Empirical Studies in Institutional Change*, Cambridge University Press, New York, 1996, halaman 87

<sup>27</sup> Ngai Ling Sum, "The Re-articulation of Spatial Scales and Temporal Horizons", *Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies*, Volume 7 No 2, Autumn 1999, halaman 1-12

SEZ's). Pertumbuhan ekonomi pertahun. Semenjak Deng mengimplementasikan ekonomi dan politik pintu terbuka di Cina sangat pesat. Dalam menjalankan reformasinya, Deng merasa sebagaimana yang dikatakan olehnya " *If the reforms in the countryside work out very well in three years... it will take five years for the reforms in the cities...* ". Pertumbuhan ekonomi itu terjadi tidak hanya di daerah kota saja, perekonomian pedesaan juga bergerak tumbuh menuju spesialisasi. Dengan insentif yang diterapkan, para petani berlomba-lomba meningkatkan dengan harapan hasil penjualan juga meningkatkan dan dapat menjual pasar bebas.

Reformasi yang diawali dari kebijakan Pintu Terbuka ini, memberikan hasil positif, pendapatan penduduk di pedesaan meningkat sebelumnya mengalami stagnasi, hasil rata-rata pertanian naik berkisar 10% pertahun. Jumlah perusahaan swasta meningkat dari 150.000 menjadi 1.100.000. Dengan naiknya produksi pertanian, produksi industri pun ikut berkembang. Ekonomi Cina mengalami peningkatan, selama periode tahun 1979-1988 pertumbuhan rata-rata GNP mencapai 9,5%.

Keberhasilan sektor ekonomi di pedesaan itu bisa tercapai dengan kebijakan pendukung, seperti desentralisasi pengambilan keputusan memberikan kesempatan bagi para manajer untuk meningkatkan produksi tanggung jawab, dan efisiensi kerja. Deng berhasil merekonstruksi hegemoni dengan membangun sosialisme yang berkarakter Cina didukung oleh dua kebijakan yaitu: *pertama*, Kebijakan Pintu Terbuka. *Kedua*, telah dilakukan kembali praktik kapitalis-sosialis dalam kehidupan di Cina. *Ketiga*, tuntutan terhadap hal-hal khusus atau fleksibel bagi terciptanya bentuk ruang dan waktu geo-ekonomi baru untuk menghubungkan kembali Cina dengan sistem regional maupun global.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Lee J. Alston, Thrain Eggertsson, Douglass C. North (ed.), *Empirical Studies in Institutional Change*, Cambridge University Press, New York, 1996, halaman 87

<sup>27</sup> Ngai Ling Sum, "The Re-articulation of Spatial Scales and Temporal Horizons", *Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies*, Volume 7 No 2, Autumn 1999, halaman 1-12



Dalam praktek kenegaraan, sejak tahun 1987 mulai dirintis pemisahan kekuasaan antara partai (PKC,*red*) dan pemerintah. Zhao Ziyang yang mencetuskan gagasan ini pada kongres PKC ke-13. Perubahan-perubahan yang berlangsung cepat ini mau tidak mau juga menimbulkan keresahan dikalangan elite Partai. Untuk mengamankan jalannya modernisasi dari protes, kecaman dan lontaran ketidak setujuan pada kelompok Deng (kaum pragmatis realis) dari pengikut fanatik radikal revolusioner Maois, disepakati usul Hua Guefang untuk tetap memegang empat prinsip pokok negara, yaitu:

1. Cina tetap sosialis
2. Keunggulan Cina
3. Diktator demokrasi rakyat
4. Maoisme tetap merupakan ideologi negara

Sejak dicanangkannya reformasi ekonomi oleh Deng terjadi beberapa pembaharuan dalam struktur ekonomi dalam negeri Cina, yaitu: *Pertama*, Perubahan dalam jumlah kepemilikan negara. Dalam hal ini terjadi transformasi bentuk kepemilikan, dimana sebelumnya hanya ada kepemilikan negara, namun sekarang terdapat kepemilikan pribadi, *Joint venture* dan lain-lain. Antara tahun 1978 dan 1992 sumbangan perusahaan negara dalam pembentukan struktur GNP menurun dari 56% menjadi 40%, sumbangan perusahaan gabungan swasta dan pemerintah meningkat dari 42% menjadi 50%, sementara sumbangan perusahaan swasta dan joint venture meningkat dari 2% menjadi 10%. Menurut perkiraan, kontribusi sektor perdagangan hanya sekitar sepertiga dari GNP, sementara sisanya adalah kontribusi dari sektor non negara.<sup>28</sup>

*Kedua*, besarnya peran pasar dalam alokasi sumber daya. Jumlah barang-barang modal yang dialokasikan oleh pemerintah selama 1979-1993 menurun dari 256 item menjadi 19 item untuk barang-barang konsumsi, alat-alat pertanian dan pendukung sektor pertanian lainnya, juga menurun dari 65 item menjadi 15 item. Sekitar 70% dari semua transaksi komoditi sudah beralih ke pasar. Pada akhir

---

<sup>28</sup> Jialin Dzang, "Guiding Chinese China's market Economy" dalam *Current History*, Volume 1993, No 584, September 1994, halaman 227



tahun 1992, telah ada sekitar 79300 pasar eceran, 2500 pasar grosir dan lebih dari 3000 pasar barang-barang modal.<sup>29</sup>

*Ketiga*, Reformasi harga. Sistem harga di Cina terdiri atas tiga kategori yaitu harga yang ditetapkan oleh negara, harga yang ditetapkan berdasarkan anjuran pemerintah, dan harga yang didasarkan pada regulasi pasar. Pada tahun 1991, statistik Cina menunjukkan bahwa proporsi harga berdasarkan pasar meningkat lebih dari 70%, hal ini berarti pemerintah hanya menetapkan 30% dari keseluruhan harga barang yang beredar di Cina. Saat ini hampir semua barang konsumsi (kecuali beberapa barang seperti garam dan minuman keras) harganya sudah bebas dari regulasi pemerintah.<sup>30</sup>

*Keempat*, Pertumbuhan pasar modal dan kerja. Sampai saat ini sudah ada dua pasar modal nasional yaitu yang ada di Shanghai dan Shenzhen, juga terdapat sekitar 700 lembaga pialang saham.<sup>31</sup>

Selain perubahan dalam ekonomi domestik Cina, penerapan sistem ekonomi pasar sosialis juga merubah profil ekonomi eksternal Cina, hal ini disebabkan oleh diterapkannya kebijakan pintu terbuka yang mengarah pada terintegrasinya Cina pada sistem ekonomi internasional. Kebijakan ini menandakan sebuah perubahan dramatis dari pola *inward looking* di era Mao, menjadi pola partisipasi aktif dalam perekonomian dunia. Untuk itu pemerintah Cina menetapkan beberapa kebijakan dengan membuat daerah pesisir pantai selatan (berhadapan dengan Taiwan, Hongkong dan Makau) menjadi kawasan industri yang kemudian disebut sebagai Special Economic Zone's (SEZ's). Di antaranya adalah Shenzhen, Zuhai, dan Shantaoung di propinsi Guandong.

Wilayah SEZ's tersebut diberikan keistimewaan untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi tanpa harus melalui pemerintah pusat.<sup>32</sup> Secara teoritis, tujuan pembentukan adalah menjadi pintu gerbang Cina dalam melakukan transfer teknologi, penanaman modal asing, pembangunan regional, penyediaan lapangan

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Jude Howell, *China Opens it Doors, The politics of economic transitions*, Liner Publisher, Colorado 1993, Hal 55



kerja, promosi ekspor dan peningkatan kemampuan manajerial bagi para pelaku ekonomi. Bila melihat tujuan itu, berarti berlakunya SEZ's tidak hanya merupakan sarana untuk memanfaatkan sistem ekonomi kapitalis dan pasar dunia, namun juga merupakan alat untuk menguji kompetensi reformasi ekonomi domestik Cina.<sup>33</sup> Tetapi kemudian ide reformasi tersebut meluas, seiring munculnya tuntutan pelonggaran pengawasan pemerintah terhadap BUMN, diberlakukannya kepemilikan saham perusahaan, diperkenalkannya sistem persaingan antar bank, dibentuknya pasar saham, pelonggaran atas pengendalian harga, dibukanya bank-bank swasta.<sup>34</sup>

Kemudian ide-ide reformasi ekonomi dituangkan dalam bentuk keputusan pemerintah Cina yang diimplementasikan dengan mengijeksikan dana sebesar \$ 21 juta ke kawasan industri Shanghai. Tahap lanjutan kebijaksanaan pintu terbuka Cina ditetapkan dengan mengubah kawasan Pudong menjadi suatu SEZ's dengan sasaran utamanya menciptakan daerah ini sebagai pusat investasi dan teknologi tinggi di Cina.

Komponen utama dari kebijakan pintu terbuka Deng adalah:

1. Memperkuat ekspor, khususnya produk manufaktur industri ringan dengan jalan desentralisasi dan melakukan penyesuaian cara kerja administrasi dengan standar masyarakat internasional secara intensif.
2. Menghapuskan monopoli yang dijalankan Kementerian Perdagangan dan Kerjasama Luar Negeri, melalui desentralisasi kewenangan perdagangan kepada sub kementerian yang ada di propinsi-propinsi.
3. Mendorong perusahaan-perusahaan yang berlokasi di pinggiran atau pedesaan agar berorientasi ekspor.
4. Melakukan akuisisi terhadap teknologi luar atau asing, dan investasi,
5. Memperbaiki sistem manajerial dan pemasaran internasional dimana termasuk didalamnya dilakukan kerjasama *Joint Ventura*. Untuk lebih menarik perhatian investasi asing, dilakukan desentralisasi ekonomi dimana otoritas persetujuan investasi diserahkan kepada departemen dan propinsi yang berkepentingan. Diciptakannya SEZ's dibawah propinsi-propinsi pesisir di Guandong dan Fujian adalah untuk menarik minat investor asing.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Yun Wing Sun, *The China-Hongkong Connection, The Key to China open Door Policy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, halaman 11

<sup>34</sup> Normalisasi Hubungan Diplomatik Antara RI dan RRC; Kerjasama dan Tantangannya : Departemen Luar Negeri dan USU, 1990

<sup>35</sup> Susan Shirk, *op. cit*, halaman 195



Pada masa itu, Deng melakukan restrukturisasi administrasi untuk merencanakan pembangunan ekonomi. Berdasarkan struktur baru tersebut, badan-badan dan pimpinan industri di daerah mendapat hak otonomi yang lebih luas dari sebelumnya.<sup>25</sup> Kemudian prioritas perekonomian Cina dialihkan dari industri berat ke pertanian dan industri ringan. Adanya kebijaksanaan tersebut, memungkinkan juga penerapan unsur-unsur sistem perekonomian kapitalis dalam sistem sosialis Cina. Setelah adanya kebijaksanaan desentralisasi, para pejabat pemerintahan propinsi akhirnya memegang peran penting dan mendapat keuntungan dari kebijakan ini.

Kebijaksanaan ekonomi Cina dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan global untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pasar tersebut membawa dampak yang besar terhadap kondisi politik dalam negeri Cina. Konstelasi politik dalam negeri Cina mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Hubungan antara reformasi dalam bidang ekonomi dengan politik, akan memunculkan perombakan-perombakan ke arah desentralisasi sebagaimana menurut Attali bahwa perombakan dalam bidang ekonomi yang berlangsung secara terus menerus akan memunculkan desentralisasi.<sup>26</sup> Sebelum adanya kebijaksanaan desentralisasi, kewenangan ekonomi hanya menyentuh sektor-sektor perencanaan industri ringan yang berlokasi di daerah beserta masalah finansialnya. Meskipun beberapa industri berat dan padat modal ada di sana, namun secara administratif masih dibawah pengawasan dan perencanaan pusat.

### 3.3.5 Reformasi Legal System

Deng menjadi tokoh sentral dalam memodernisasi Cina dimana ia terkenal dengan gagasan pragmatismenya, yang berbeda dengan gagasan-gagasan Mao yang bercirikan Ideologisme. Deng memiliki keprihatinan yang luar biasa terhadap keterbelakangan Cina, ia kemudian bertekad untuk memodernisasikan Cina. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang dibuat Mao, yang hanya mengandalkan

---

<sup>25</sup> Natalia Soebagio, *Ibid*, h.48

<sup>26</sup> Jacques Attali, *Milenium Ketiga*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997, halaman 61



2. Paragraf keempat dari pasal 10 konstitusi Cina memuat kata-kata seperti berikut ini:

*"No organization or individual may appropriate, buy, sell or lease land, or unlawfully transfer land in other ways "*,

diamandemen menjadi :

*"No organization or individual may appropriate, buy, sell, or unlawfully transfer land in other ways. The right to the use of the land may be transferred in accordance with the law"*.

Amandemen atas 2 pasal ini menunjukkan bahwa Cina menganut sistem ekonomi sosialis, mulai membuka diri atas praktek-praktek privatisasi disektor-sektor ekonomi yang sebelumnya di era Mao sempat dilarang. Bila selama ini tanah sebagai modal dimiliki oleh negara, maka berdasarkan amandemen pasal 10 dinyatakan bahwa pemanfaatan tanah dapat dilakukan olen pihak swasta atau publik dibawah pengawasan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil dari sesi pertama Konggres Rakyat Nasional Ke-7 pada 29 Maret 1993, dilakukan amandemen terhadap Konstitusi Cina adalah sebagai berikut :

#### 1. Artikel 3

Dua kalimat terakhir dari paragraf ketujuh pembukaan konstitusi RRC yang berbunyi :

*"The basic task of the nation in the years to come is to concentrate its efforts on socialist modernization. Under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people's democratic dictatorship and the socialist road, steadily improve socialist institutions, develop socialist democracy, improve the socialist legal system, and work hard and self-reliantly to improve the socialist legal system, and work hard and self-reliantly to modernize the country's industry, agriculture, national defense and science and technology step by step to turn China into a socialist country with a high level of culture and democracy"*.

Diamandemen, sehingga berbunyi sebagai berikut :

*"Our country is in the primary stage of socialism. The basic task before the nation is the concentration of efforts of socialist modernization construction in accordance with the theory of building socialism with Chinese characteristics. Under the*



*leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people's democratic dictatorship and the socialist road and to uphold reform and opening to the outside world, steadily improve socialist institutions, develop socialist democracy, improve the socialist legal system, and work hard and self-reliantly to modernize the country's industry, agriculture, national defense and science and technology step by step to build China into a strong, prosperous culturally advances, democratic socialist nation".*

## 2. Artikel 4

Pada paragraf sepuluh dari pembukaan konstitusi RRC ditambahkan dengan kalimat seperti berikut ini :

*"Multi-party cooperation and the political consultation system under the leadership of the Communist Party of China shall continue and develop for the extended future."*

## 3. Artikel 5

Pasal 7 dari Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut :

*"The state economy is the sector of socialist economy under ownership by the whole people; it is the leading force in the national economy. The state ensures the consolidation and growth of the state economy."*

Diamandemen sehingga menjadi sebagai berikut ini :

*"The state-owned economy, i.e. the socialist economy with ownership by the people as a whole, is the leading force in the national economy. The state will ensure the consolidation and development to the state-owned economy."*

## 4. Artikel 6

Paragraf pertama Pasal 8 Konstitusi Cina yang berbunyi sebagai berikut :

*"Rural people's communes, agricultural producers' cooperatives and other forms of cooperative economy, such as producers', supply and marketing, credit and consumers' cooperatives, belong to the sector of the socialist economy under collective ownership by the working people. Working people who are members of rural economic collectives have the right, within the limits prescribed by law, to farm plots of cropland and hilly land allotted for their use, engage in household sideline production and raise privately owned livestock."*



## 9. Artikel 9

Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Collective economic organizations have decision-making power in conducting independent economic activities, on condition that they accept the guidance of the state plan and abide by the relevant laws. Collective economic organizations practice democratic management in accordance with the law. The entire body of their workers elects or removes their managerial personnel and decides on major issues concerning operation and management."*

Diamandemen sehingga berbunyi sebagai berikut :

*"Collective economic organizations have decision-making power in conduction independent economic activities, on condition that they abide by the relevant laws. Collective economic organizations practice democratic management, elect and remove their managerial personnel in accordance with the law and decide major issues concerning operation and management."*

## 10. Artikel 10

Paragraf ketiga dari pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Work is a matter of honor for every citizen who is able to work. All working people in state enterprises and in urban and rural economic collective, should approach their work as the masters of the country that they are. The state promotes socialist labor emulation, and commends and rewards model and advanced workers. The state encourages citizens to take part in voluntary labor."*

Diamandemen sehingga berbunyi sebagai berikut ini :

*"Work is a matter of honor for every citizen who is able to work. All working people in state-owned enterprises and in urban and rural economic collectives should approach their work as the masters of the country that they are. The state promotes socialist labor emulation, and commends and rewards model and advanced workers. The state encourages citizens to take part in voluntary labor."*

## 11. Artikel 11

Pasal 98 yang berbunyi sebagai berikut:

*"The term of office of the people's congresses of provinces, municipalities directly under the Central Government and cities divided into districts is five years. The term of office of the people's*



*congresses of counties, cities not divided into districts, municipal districts, townships, nationality townships, and towns is three years."*

Diamandemen sehingga berbunyi sebagai berikut :

*"The term of office of the people's congresses of provinces, municipalities directly under the Central Government, counties, cities and districts under the jurisdiction of the municipal government is five years. The term of office of the people's congresses of townships, nationality townships and towns is three years."*

Berdasarkan konstitusi tahun 1954, konstitusi yang dipergunakan saat ini lebih banyak memperhatikan pengalaman dari perkembangan sosialisme, dengan lebih banyak menyerap pengalaman dari dunia internasional. Mempertimbangkan kondisi dewasa ini dan prospek bagi pembangunannya, Konstitusi Cina tahun 1982 menghadapi tuntutan-tuntutan yang lebih bersifat politik-ekonomi dan perkembangan budaya untuk lebih berkarakter Cina dalam periode sejarah baru yang dimulai dengan mengadopsi kebijaksanaan reformasi dan pintu terbuka sejak tahun 1979. Secara jelas disebutkan dalam konstitusi 1982 bahwa tugas utama dari bangsa ini dimasa yang akan datang adalah untuk lebih memperhatikan usaha-usaha dalam memodernisasi mesyarakat sosialisnya.

### 3.3.6 Matinya Deng

Deng Xiaoping meninggal pada Februari 1997. Dia menjadi kepala negara semenjak tahun 1978 dan memperkenalkan reformasi ekonomi pasar dan membuka diri terhadap Barat, yang meningkatkan pendapatan perkapita rakyat Cina dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai diatas 9% pertahun. Semasa kekuasaanya efektif dulu, ia telah menunjuk calon pengganti kepemimpinannya. Ia telah menunjuk Jiang Zemin sebagai Presiden dan pemimpin PKC, Li Peng sebagai perdana menteri, Qiao Shi sebagai ketua NPC dan kepala keamanan serta Zhu Rongji sebagai deputy perdana menteri yang memiliki komitmen untuk memodernisasi ekonomi Cina. Perubahan kecil terjadi secara langsung, dimana terdapat paduan antara reformasi ekonomi yang cenderung liberal dengan pengawasan politik yang ketat oleh PKC.



### 3.4 Republik Rakyat Cina Era Ziang Zemin dan Jhu Rongji (1996 - Sekarang)

Reformasi ekonomi Cina telah melangkah lebih jauh dengan mengenalkan perekonomian liberal yang berorientasi pasar dalam sistem ekonomi komando, sebagai indikator, bahwa ekspor Cina saat itu dibandingkan dengan negara-negara tetangganya berada pada posisi tertinggi.<sup>28</sup> Reformasi yang dijalankan tersebut telah menyentuh hal yang mendasar dalam perikehidupan masyarakat Cina, diantaranya ditinggalkannya kepemilikan bersama dalam perekonomian, pemisahan antara pemerintah lokal dan perusahaan daerah, dan diberlakukannya desentralisasi dalam administrasi pemerintahan dan perekonomian. Cina dengan kata lain telah mengalami transformasi.

Era Deng merupakan masa yang sangat mengesankan, dengan terciptanya kondisi stabil atas sistem ekonomi pasar sosialis yang berkarakter Cina telah menimbulkan permasalahan bagi penerus Deng. Ziang Zeming dan Jhu Rongji harus menemukan saluran yang tepat bagi kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Deng. Mereka harus dapat mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan inovatif sebagai kerangka untuk mempertahankan pertumbuhan Cina. Mereka dituntut untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ditimbulkan kebijakan dari Deng, dengan menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan perekonomian Cina selama kurun waktu lima puluh tahun terakhir. Pusat perhatian pemerintah Cina adalah meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Cina yang sempat menurun. Pada era Deng pertumbuhan ekonomi Cina mencapai 9,8 % per tahun sedangkan pada periode tahun 1995-1997 pertumbuhan rata-rata dalam harga konstan berlaku pertumbuhan negatif sebesar 1,17%.<sup>29</sup> Penjelasan atas penurunan kecenderungan ini adalah bahwa sumber-sumber pertumbuhan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi di era Deng tidak lagi tersedia lagi di era rezim Ziang Zeming.

<sup>28</sup> Lihat pada David S. Goodman & Gerald Segal, *China Without Deng*, Imprint Book, Sydney, 1995, halaman 25

<sup>29</sup> Pertumbuhan rata-rata GDP sebesar 14,2 % pada Tahun 1992, 13,5 % pada tahun 1993, 12,6 % pada Tahun 1994, 10,5 % pada Tahun 1995, 9,6 % pada tahun 1996 dan 8,8 % pada Tahun 1997, Robert F Dernberger, *The people's Republic of China at 50's The Economy*, The China Quarterly, no 159, September 1999. halalamn 612



Pada awal 1980-an saat rezim Deng awal berkuasa, perbaikan pada industri rumah tangga dan pasar diperekonomian daerah menghasilkan produksi sektor pertanian yang sangat signifikan, sebesar satu per tiga dari GDP Cina. Rezim Deng sektor industri mencoba mengganti sektor pertanian dengan jalan dibukanya perusahaan-perusahaan non pemerintahan pada pertengahan dekade 80-an. Sebagai hasilnya adalah berkembang biaknya perusahaan-perusahaan perkotaan dan pedesaan (*Township and Villages Enterprise, TVE*). Pada tahun 1985 sektor ini menyumbangkan 30,7 % dari GNP. Pada tahun 1984 -1994 pertumbuhan sektor ini sebesar 33,9 %.<sup>30</sup> Pada pertengahan dekade 90-an sektor ini mengalami penurunan dimulai pada Tahun 1996. Hal ini terjadi karena, menurunnya akses terhadap kredit bank, dan melunaknya permintaan dalam negeri atas produk sektor ini.

Sementara itu, Jhu Rongji menghadapi permasalahan ekonomi dimana tidak adanya sejumlah pemimpin-pemimpin Cina yang memiliki pandangan kedepan bagi perekonomian Cina. Hal mendasar yang tidak diketahui untuk mempertahankan tujuan dan memelihara dukungan politik dari rakyat Cina sebagai proses akhir.

Sebagai dampak dari interaksinya dalam perekonomian global, dewasa ini Cina mencatatkan beberapa fenomena sebagai berikut: *Pertama*, munculnya Cina sebagai kekuatan perdagangan dunia. Pada awal tahun 1950-an Cina hanya melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara sosialis, sekitar 60 negara. Hal ini karena blokade Barat waktu itu, sedangkan saat ini rekan dagang Cina mencapai 227 negara. Nilai ekspor Cina pada tahun 1950-an hanya mencapai beberapa ratus juta dolar saja, namun pada tahun 1998 mencapai 323,9 juta dolar AS (naik sekitar 300 kalilipat). Di tahun 1978 posisi volume perdagangan luar negeri Cina berada pada rangking 32, ditahun 1998 menjadi rangking ke-11. Cadangan devisa luar negeri Cina pada tahun 1979 hanya sekitar 840 juta dolar AS. Menjadi 150 juta dolar AS pada Agustus 1999. Per Juli 1999 Cina telah menandatangani persetujuan kontrak investasi luar negeri sebanyak 334. 000 kontrak dengan nilai investasi sebesar 594, 81 milyar dolar AS, *actualized*

---

<sup>30</sup> *Ibid*



*contractual* sebesar 288, 94 milyar dolar AS. Pada periode 1993-1998 Cina berada pada posisi ke-2 nilai investasi terbesar diantara negara-negara berkembang. Kurang lebih 400 perusahaan dari 500 perusahaan investasi asing terbaik didunia yang membuka hubungan bisnis atau melakukan investasi di Cina selama waktu enam tahun tersebut.<sup>31</sup>

*Kedua*, tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini jumlah kemiskinan Cina telah berubah dari 250 juta pada tahun 1978 menjadi hanya 42 juta pada tahun 1998. Kemiskinan hanya terjadi pada daerah-daerah pedalaman dengan sumber daya yang minim dan lingkungan yang jelek. Ditaksirkan pada tahun 2000, 20 juta penduduk akan dientaskan dari kemiskinan.

Pada tahun 1950-an, tingkat konsumsi masyarakat Cina dalam setahun hanya 80 yuan. Saat ini telah mencapai 3000 yuan. Komoditas utamanya terbagi mulai dari sepeda dan jam tangan sampai mobil dan komputer personal. Pada 100 keluarga di Cina terdapat 48 TV berwarna, 72,98 lemari pendingin, 165,74 kipas angin, dan 89,12 mesin cuci (data statistik tahun 1997). Tingkat harapan hidup di Cina membaik dari hanya 35 tahun pada tahun 1949 menjadi 71 tahun pada tahun 1999 atau diatas rata-rata standar dunia yang hanya 64. Tingkat kematian menurun dari 33 per 1000 penduduk pada tahun 1949 menjadi hanya 6,5 per penduduk 1000 pada tahun 1999.<sup>32</sup>

*Ketiga*, meningkatnya Urbanisasi. Pertumbuhan urbanisasi di Cina berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini. Hal ini berkaitan dengan kebijakan reformasi dan pintu terbuka yang telah dijalankan di Cina sejak tahun 1978. Selama ini area perkotaan merupakan tulang punggung perekonomian Cina. Jumlah kota-kota di Cina meningkat dari hanya 193 kota pada tahun 1979 menjadi 668 pada tahun 1997. Pertumbuhan populasi penduduk kota meningkat dari 12% pada tahun 1978 menjadi 43,8 % pada tahun 1997.<sup>33</sup>

*Keempat*, meningkatnya lapangan kerja. Saat ini, masyarakat Cina memiliki banyak pilihan untuk mencari lapangan kerja. Walaupun demikian pemerintah masih memberlakukan beberapa hambatan untuk membatasi

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*



urbanisasi. Tenaga kerja berlimpah di Cina terutama di daerah pedesaan, dengan demikian pembangunan desa dimaksudkan pula untuk menarik lebih banyak pemodal, saat ini terdapat 1,2 juta perusahaan swasta yang membuka usaha di desa dengan jumlah tenaga kerja 1,7 juta dan terdapat 31,2 juta industri kecil yang menyerap tenaga kerja sejumlah 61,1 juta orang.<sup>34</sup>

*Kelima*, meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Sebelum tahun 1949 terdapat 80% orang dewasa buta huruf, saat ini telah menurun menjadi 6%. Jumlah anak sekolah hanya 20% sebelum tahun 1949 menjadi 98,9% pada tahun 1998. Pada tahun 1949 hanya terdapat 3000 institusi medis dengan 80.000 jumlah tempat tidur rumah sakit, 500 000 tenaga medis atau bila dibandingkan dengan penduduk Cina saat itu maka hanya terdapat 1,5 tempat tidur dan kurang dari 1 dokter per 1000 orang. Pada tahun 1998 tercatat 310.000 organisasi medis dengan jumlah tempat tidur rumah sakit sebanyak 3,14 juta kasur dan 4,42 tenaga medis, termasuk didalamnya 1,42 juta orang dokter.<sup>35</sup>

*Keenam*, semakin terbukanya Cina terhadap dunia luar. Cina akan semakin berpartisipasi dalam ekonomi dan meningkatkan kerjasama. Hal ini berdasarkan merendahnya tariff impor Cina. Pada tahun 2000 berkurang sampai 15 % dan sebelum tahun 2005 tarif akan menjadi kurang dari 10%. Keterbukaan Cina juga berlaku di sektor perbankan dimana Cina membuka pintu bagi bank-bank luar negeri untuk melakukan investasi di Cina. Dimasa mendatang hal ini akan meningkatkan perdagangan jasa, misalnya dalam hal investasi luar negeri pada sektor perbankan, asuransi, pariwisata, ritel, perdagangan luar negeri dan jasa resmi serta meningkatnya usaha-usaha di sektor energi, transportasi, komunikasi, dan industri-industri infrastruktur lainnya.<sup>36</sup>

Fenomena-fenomena tersebut berpengaruh terhadap sistem perundang-undangan investasi luar negeri, perlindungan hak intelektual dan mengubah pelayanan bagi perusahaan-perusahaan investasi asing, dimana kesemuanya itu ditujukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi para pelaku-pelaku bisnis asing di Cina. Dengan populasi terbesar didunia, Cina menawarkan

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*



## V. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan dan penulis diskripsikan sekaligus analisa dengan didukung oleh data-data yang ada, terlihat bahwa adanya globalisasi ekonomi berpengaruh terhadap munculnya kebijaksanaan desentralisasi di Cina. Globalisasi sendiri didiskripsikan sebagai hilangnya batas-batas negara dan hambatan-hambatan dalam perdagangan antar negara yang merupakan gambaran perubahan multi lapis dan multi dimensi proses dan fenomena hidup yang sebagian besar didorong oleh kapitalisme beserta nilai-nilai hidup dan pelaksanaannya. Globalisasi dalam bidang ekonomi dimaksudkan sebagai proses terintegrasinya perekonomian negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, saling tergantung, dan saling pengaruh-mempengaruhi dimana diperlihatkan oleh saling tergantung dan terintegrasinya produksi, investasi dan perdagangan internasional.

Globalisasi ekonomi yang berlangsung selama ini berdampak pada munculnya kecenderungan globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya globalisasi ekonomi dewasa ini, yaitu adanya peningkatan nilai perdagangan dan output dunia yang cukup signifikan, arus dan besarnya investasi asing secara langsung dalam pasar modal internasional. Faktor-faktor utama yang mendorong munculnya globalisasi adalah menurunnya hambatan-hambatan dalam perdagangan dan investasi, kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi dan transportasi, dan adanya perubahan tata dunia internasional.

Globalisasi ekonomi menciptakan lingkungan global yang kondusif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara sehingga tiap negara akan berusaha untuk berpartisipasi dalam perekonomian global dengan keunggulan komparatif yang mereka miliki dalam mencapai tujuan ekonomi nasionalnya.



Globalisasi ekonomi yang liberal ini, mengisyaratkan sejumlah ketentuan dan tata hubungan ekonomi internasional dalam aktifitasnya. Dengan demikian agar dapat berpartisipasi dalam lingkungan global tersebut, setiap negara menyesuaikan diri dengan ketentuan dan tatanan yang cenderung liberal.

Disisi lain, globalisasi ekonomi menciptakan ketergantungan dari adanya perubahan pola hubungan internasional yang bergeser dari pola hubungan tradisional yang unilateral pola hubungan transnasionalisme yang bersifat multilateral. Tuntutan-tuntutan globalisme dalam hubungan ekonomi internasional adalah adanya kemudahan-kemudahan yang akan menopaug kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kemudahan yang diinginkan dalam globalisasi adalah adanya desentralisasi. Desentralisasi dimaksudkan untuk mempermudah hubungan ekonomi dan pengambilan kebijaksanaan ditingkat bawah dalam rangka efektifitas.

Sebagaimana lazimnya negara dengan sistem perencanaan terpusat, Cina juga menerapkan sistem ekonomi yang sentralistik dimana segala sesuatunya dipusatkan pada tingkat pemerintahan pusat. Adanya kontradiksi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Cina untuk mengintegrasikan diri dalam perekonomian global. Untuk bisa diterima dalam perekonomian global dan beradaptasi dengan lingkungan baru itu Cina melaksnakan kebijaksanaan desentralisasi, suatu sistem pengambilan keputusan yang bertolak belakang dengan sistem negara yang Sosialis. Berdasar pada kenyataan itu, globalisasi ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kebijaksanaan desentralisasi yang diberlakukan di Cina.

Faktor internal yang berpengaruh secara bebar terhadap adanya kebijaksanaan desentralisasi adalah adanya kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh Mao Zedong. Pembangunan yang dilakukan Mao justru menempatkan Cina dalam krisis ekonomi dan untuk mengeluarkan Cina dari krisis tersebut maka Deng Xiaoping mengeluarkan kebijakan reformasi ekonomi politiknya. Reformasi ini mengubah substansi sistem perekonomian Cina melalui amandemen konstitusi yang mengubah sistem ekonomi Cina dari sistem ekonomi sosialis menjadi sistem ekonomi pasar



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Katalog, dan Kamus

- Alston. Lee J., Thrain Eggertsson, Douglass C. North (ed.), 1996, *Empirical Studies in Institutional Change*, Cambridge : Cambridge University Press
- Anonim, 1990, *Normalisasi Hubungan Diplomatik Antara RI dan RRC; Kerjasama dan Tantangannya*, Jakarta : Departemen Luar Negeri dan USU.
- Anoraga. Panji, 1994, *Perusahaan Multi Nasional*, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Apter . David E., 1991, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta : PT. Rajawali Press,
- Attali. Jacques, 1997, *Milenium Ketiga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Bakry. Umar S., 1996, *Cina dan Quo Vadis ?*, Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo. Miriam, 1972, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Clelland. Charles A. Mc, 1982, *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*, Penyunting Hilman Adil, Jakarta : CV. Rajawali.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*, Jakarta : CV. Rajawali Press.
- Chan, Anthony T.H., Ng Hock Guan (ed), 1996 *Economic Management and Transition Towards a Market Economy: an Asian Perspective*, Singapore : World Scientific
- Chan Pinlin (ed.), 1996, *PRC. Tomorrow: Development under the Ninth Five Year Plan*, Taipei-Taiwan: Graduate Institute of Political Science : Sun Yat Sen University Kaoshiung
- Chia Siow Yue, Joseph L.H. Tan, 1996, *ASEAN in The WTO; Challenges and Response*, Singapore : Institut of South East Asian Studies.



- Corsi. C, S.Kudrya, C.Cordone (ed), 1997, *From Control State to Free Global Market Economy*, Dordrecht Nedtherland : Kluwer Academy Publisher.
- Edward M. Garaham, May 1996, *Global Corporation and National Goverments*, Washiongton DC-Amerika Serikat : Institutes for International Economies,
- Finifter. Ada, ed., 1983, *Political Science : The State of Dicipline*, Washington DC : American Political Science Association, ,
- Goodman. David S., & Gerald Segal, 1995, *China Without Deng*, Sydney : Imprint Book.
- Hadi. Sutrisno, 1973, *Metodelogi Research, Jilid I*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada
- \_\_\_\_\_, 1984, *Metodelogi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Metodelogi Reseach untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta : Andi Ofset.
- Handayani. Linda E., 1997. *Pengaruh Kebangkitan Ekonomi RRC terhadap Perekonomian ASEAN Tahun 1980-1990an*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Jayabaya.
- Hauss. Chandler, 1997, *Comparative politics; Domnestic Response to Global Challenge ; Second Edition*, St. Paul - Minneapollis : West Publishing Company.
- Hill. Charles W.L., 2001, *Global Business Today; Second Edition*, New York : Mc Graw Hill.
- Howell. Jude, 1993, *China Opens it Doors, The politics of economic transtitions*, Colorado : Liner Publisher.
- Isaak. Robert A., 1995, *Ekonomi Politik Internasional*, pengantar Mochtar Mas'oeed, Tiara Wacana, Yogyakarta,
- John Wong, 1993, *Understanding China's Socialist Market Economy*, Singapore : Times Academic Press



- Kartadjoemena. H.S., *GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Keohane. Robert O, Helen, Milner (eds), 1996, *Internationalization and domestic Politics*, Cambridge-UK : Cambridge University Press.
- Koentjoroningrat, 1981, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Koves. Andreas and Marer, 1991, *Foreign Economic Liberalization : Transformation in Socialist and Market Economies*, Colorado : Interview Press.
- Latief. Dochak, 2000, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Marzuki, 1991, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Universitas Islam Indonesia.
- Mas'ood. Mochtar, 1990, *Ekonomi Politik Internasional*, Yogyakarta, PAUS - UGM.
- \_\_\_\_\_, September 1994, *Iimu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodelogi, Edisi Revisi*, Jakarta : LP3ES,
- \_\_\_\_\_, 1995, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Moleong. Lexy J., 1986, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja Karya.
- Nasutio SF. Mulia., 1997, *Teori Ekonomi Makro; Pendekatan pada Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan
- Nazir. Mohammad, 1988, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nopirin, 1992, *Ekonomi Internasional ( Edisi 2 )*, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi -Universitas Gajah Mada.
- Nuechterlein. Donald E, Spring, 1979, *The Concept of National Interest A Time for New Approach*, Orbish,



- Palmer. Norman D., (ed), 1970, *A Design for International Research: Scope, Theory, Methods and Relevance*, Philadelphia : -The American Academy of Political and Social Science.
- Plano. Jack C, dkk, 1985, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Rachmat. Jalaluddin, 1984, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Resdakarya.
- Rowly Chris and Lewis Mark (ed), 1996, *Greater China: Political Economy, Inward Investment and Business Culture*, London : Frank Cass,
- Roy. S.L., 1991, *Sejarah Diplomasi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Smith. Steve, Ken Booh, Marybis Zalewski ( eds.), 1996, *International Theory : Positivism and Beyond*, Cambridge : Cambridge University Press
- Sueo Sekiyuki (ed), 1994, *Economic Interactions and Interdependence in East Asia*, Tokyo : Ushiba Memorial Fund - Japan Center for International Exchange
- Sukma. Rizal, April 1995, "Pemikiran Strategis Cina dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping", Jakarta : CSIS.
- Surachmad. Winarso, 1980. *Pengantar Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, Bandung :Tarsito.
- The Liang Gie, 1984, *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- Thoha. Mahmud (Penyunting), 1998, *Dampak Persetujuan Putaran Uruguay -GATT terhadap Industri Kecil*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Wibowo,I., 2000, *Negara dan Masyarakat; Bekaca dari Pengalaman RRC*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, CV. Mandar Jaya, Bandung, 1989,
- Wenguo Cai, Murray G. Smith, and Xu Xianguan (ed), 1996, *China and the World Trade Organization, Realities, and Resolution*, Renouf Publishing



Yun Wing Sun, 1991, *The China-Hongkong Connection, The Key to China open Door Policy*, Cambridge : Cambridge University Press.

**B. Jurnal,**

Analisis CSIS, tahun XXV No 2, 1996

\_\_\_\_\_, Tahun XX, No. 3 Mei-Juni 1991

Current History, Volume 1993, No 584, September 1994

China Quarterly, The, 1995

China Quarterly, The, No 159, September 1999

Foreign Affairs, Volume 75 No. 2, March/April, 1996

\_\_\_\_\_, Volume 78, No 5, September/October 1999

Global, Jurnal Ilmu Politik, No. 1, 1990,

Gamma No 26 / II, 16-22 Agustus 2000

Jurnal Reitaku Jurnal of Interdisciplinary Studies, Volume 7 No 2, Autumn 1999,

Jurnal Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia.

Jurnal Ilmu Politik I, 1992, Jakarta: PT. Gramedia.

Journal of People's China, I Januari 1954

Prisma, No 1, Januari 1980

\_\_\_\_\_, No 3, tahun 1989,



- Bruce Cumings, 1996, *The World Shakes China; China's influence in World Affairs*, The Affairs, dari [http: www.asiadragon.com](http://www.asiadragon.com), didownload pada 7 Agustus 2001
- Han Lei, *China Expected to enter WTO by year end*, dari [http: www.chinadaily.com](http://www.chinadaily.com), didownload pada 9 Januari 2001
- Peter A. Geurivitch, " *Robert O Keohane : The Studi of International Relation*", dari [http:www.apsanet.org/PS/sept99/keohane.cfm](http://www.apsanet.org/PS/sept99/keohane.cfm) didownload pada 23 September 2001
- Pieter Bottelier, " *WTO and Reform of China's State Bank*", dalam *China Economic Outlook Journal*, June 2000, dari [http:www.china.com](http://www.china.com) didownload pada 9 Januari 2001
- \_\_\_\_\_, " *WTO and The Internet in China*", dalam *China Economic Outlook Journal*, November 2000, dari [http:www.china.com](http://www.china.com) didownload pada 9 Januari 2001
- Waltz. Kenneth, " *Globalization and governance*", dari [http:www.rrojasdatabank.org](http://www.rrojasdatabank.org) di download pada

#### D. Majalah dan Surat kabar

- Asia 21, 21 Juli 1999
- Asiaweek, " *Who Won in The WTO Deal*", December 3, 1999
- Asiaweek, " *No Compromise*", 17 Desember 1999
- Beijing Review, No 11. April 2001
- China Daily, " *Politics Blocking China's Entry Into WTO*", 13 Desember 1996
- \_\_\_\_\_, " *World Bank Supports China's Membership in WTO*", 17 Desember 1996
- \_\_\_\_\_, " *WTO Should Consider Demend of Developing Countries*", 17 Desember 1996
- \_\_\_\_\_, " *China Reaffirms Positions on WTO Accession*", 31 Januari 1997



Lampiran 1: Peta Negara Republik Rakyat Cina



Sumber : [www.chinatoday.com](http://www.chinatoday.com)



Lampiran 2: Pidato Ziang Zhemin, Rencana Pembangunan Lima Tahun RRC.

## REPORT ON THE OUTLINE OF THE TENTH FIVE-YEAR PLAN FOR NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

### 关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告

—2001年3月5日在第九届全国人民代表大会第四次会议上  
(Delivered at the Fourth Session of the Ninth National People's Congress on March 5, 2001)

Premier Zhu Rongji of the State Council

国务院总理 朱镕基

Fellow Deputies,

Beginning this year, China will implement the first five-year plan for the new century. The Proposal of the CPC Central Committee for the Formulation of the Tenth Five-Year Plan for National Economic and Social Development was adopted at the Fifth Plenary Session of the 15th CPC Central Committee. The Proposal defined objectives, guiding principles and major tasks for China's economic and social development during the next five years. In the spirit of the Proposal and on the basis of opinions solicited from all sectors of society, the State Council has drawn up the Outline of the Tenth Five-Year Plan for National Economic and Social Development (Draft). On behalf of the State Council, I now make my report to you and present the Outline (Draft) for your consideration and also for comments from members of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference.

#### I. Review of National Economic and Social Development During the Ninth Five-Year Plan Period

Over the past five years, the people of all ethnic groups worked hard together, blazed new trails with a pioneering spirit, and obtained great achievements in all fields of endeavor under the leadership of the Communist Party of China.

The national economy experienced sustained, rapid and sound development, and overall national strength continued to grow. In the five years, China's GDP increased by an average annual rate of 8.3 percent and reached 8.9404 trillion yuan in 2000. The mission of quadrupling the per-capita GNP of 1980 has been overfulfilled. As the economy continued to grow and economic performance improved, national revenue in 2000 reached 1.338 trillion yuan, an average increase of 16.5 percent annually. The output of major industrial and agricultural products now stands in the front ranks of the world's economies, and commodity shortages were by and large eliminated. Progress was made in industrial restructuring. The quantities of grain and other major agricultural products we are capable of producing increased noticeably, marking a historic change from a long-term shortage of agricultural products to a basic balance in their total supply and demand, with even a surplus during good harvest years. Good results were achieved in eliminating outmoded industrial production capacity, reducing excess production capacity and upgrading technology in key enterprises. Information and other new and high-tech industries grew rapidly. Marked success was achieved in infrastructure development, alleviating bottlenecks in energy, transportation, communication, and raw and processed materials.

Economic restructuring was extensively carried out, and a socialist market economy was preliminarily established. Significant advances were made in the establishment of a modern corporate structure in large and medium-sized State-owned enterprises. Most key State-owned enterprises became corporations, and a considerable number of them were listed on stock markets inside or out-

各位代表:

从今年开始,我国将实施新世纪第一个五年计划。中国共产党十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》,提出了未来五年国民经济和社会发展的奋斗目标、指导方针和主要任务。根据《建议》的精神,国务院认真听取各方面意见,制定了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要(草案)》。现在,我代表国务院向大会作报告,请各位代表连同《纲要(草案)》一并审议,并请全国政协各位委员提出意见。





the return of Hong Kong and Macao to the embrace of the motherland, the principle of "one country, two systems" and the basic laws of the two special administrative regions have been implemented in a comprehensive way. Outstanding achievements were made in the work of the governments of the special administrative regions. Social stability and economic development were secured in Hong Kong and Macao.

With the fulfillment of the Ninth Five-Year Plan, we attained the strategic objectives for the second stage of China's modernization drive, which laid a solid foundation for undertaking the Tenth Five-Year Plan and moving on to the third stage. This constituted a great achievement in China's socialist modernization drive and a new milestone in the progress of the Chinese nation.

These tremendous achievements in economic and social development during the Ninth Five-Year Plan period were hard-won victories over numerous difficulties. We successfully coped with the challenges posed by unexpected international events. We protected ourselves from the impact of the Asian financial crisis. We controlled inflation during the early days of the Ninth Five-Year Plan period and curbed deflation in the middle and late days. We also conquered severe floods and droughts. We attained these achievements thanks to the timely and correct policy decisions made by the CPC Central Committee with Comrade Jiang Zemin at its core in the face of numerous problems and difficulties and to the concerted efforts of the people throughout the country. On behalf of the State Council, I would now like to pay my highest respects to the people of all ethnic groups. You have all been working hard and making contributions in your own fields of endeavor. I also wish to express our sincere thanks to our compatriots in Hong Kong Special Administrative Region, Macao Special Administrative Region, Taiwan, as well as to overseas Chinese who have shown their concern and support for the development and reunification of the country.

During the implementation of the Ninth Five-Year Plan, we have accumulated a wealth of experience in improving macro-economic management and regulation to meet the requirements for developing a socialist market economy.

First, we have solved problems blocking our advance by stimulating economic development. Development is the fundamental principle. In the face of various social problems, we have always made economic development the central task and adopted effective measures to promote a sustained, rapid and sound development of the national economy, thus providing a foundation for handling other problems properly. Meanwhile, we adhered to the principle of "doing two jobs at once and attaching equal importance to each". We increased our efforts to improve socialist culture and ethics, democracy and the legal system, and this has created a good political and social environment and given a strong impetus for economic development.

Second, we made timely adjustments to the macro-control policy in accordance with the changing economic situation. In dealing with inflation, we paid attention to ensuring sustained expansion of the economy and a successful "soft-landing." In curbing deflation, we adhered to the principle of boosting domestic demand, resolutely followed a proactive fiscal policy, and improved various policies and measures in the course of experience. We issued additional national bonds and expanded investment on the one hand, and we appropriately increased the income of the medium- and low-income urban residents and encouraged more consumption on the other, thus stimulating economic growth. We also adopted such measures as raising the export tax rebate rate and cracking down on smuggling in order to expand exports, achieve a balance of international payments, and keep the value of the RMB stable. We implemented prudent monetary policies, adjusted interest rates and adopted many other measures to support economic growth. At the same time, we regulated the monetary supply, guided the direction of credit, and guarded against and reduced financial risks.

Third, we integrated the expansion of domestic demand with economic restructuring. In view of the excess production capacity in the general processing industries, investments from national bonds were mainly put into infrastructure development. Investment in agriculture, science, technology and education was also increased, and support was rendered for technological upgrading in enterprises. We made use of the surplus production capacity in the capital goods industry to accomplish some large undertakings that we had been wanting to but were unable to do for years. By doing so, we stimulated economic growth and increased the stamina for further economic development.

Fourth, we balanced reform, development and stability. Under complicated and difficult conditions, instead of coming to a halt, reform pressed forward vigorously and in an orderly manner, giving a powerful impetus to economic development. In the meantime, attention was paid to adjusting the magnitude of reform to the tolerance of the people. When economic restructuring and deep-

科技、教育加快发展, 社会事业全面进步。“863”计划顺利实施。航空航天、信息、新材料和生物工程等高新技术领域获得一批重要成果。基础研究和应用研究取得新进展。部门所属应用型科研院所企业化改革基本完成, 其他科研院所体制改革全面展开。科技成果市场化、产业化进程加快。各级各类教育全面发展, 基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的目标初步实现。高等教育管理体制取得重大进展。扩大高校招生受到群众普遍欢迎。人口和计划生育工作取得新成绩。生态建设和环境保护的力度明显加大。文化、卫生、体育等各项社会事业继续发展。廉政建设和反腐败斗争不断取得成效。社会治安综合治理进一步加强。社会主义精神文明建设和民主法制建设取得新的进展。国防和军队建设迈出新的步伐。

“九五”期间, 我国政府恢复对香港、澳门行使主权, 祖国和平统一大业取得历史性进展。香港、澳门回归祖国以来, “一国两制”方针和基本法得到全面贯彻执行。特别行政区政府工作卓有成效, 香港、澳门社会稳定、经济发展。

随着“九五”计划的完成, 我们实现了现代化建设第二步战略目标, 为实施“十五”计划, 开始迈向第三步战略目标奠定了良好基础。这是我国社会主义现代化事业取得的伟大成就, 是中华民族发展史上一个新的里程碑。

“九五”时期经济社会发展的巨大成就, 是克服重重困难取得的, 来之不易。我们成功应对了国际突发事件的挑战, 有效抵御了亚洲金融危机的冲击, 既克服“九五”前期通货膨胀的影响, 又抑制了中后期的通货紧缩趋势, 并战胜了严重的水旱灾害。这些成就的取得, 是以江泽民同志为核心的党中央面对诸多矛盾和困难交织的局面, 运筹帷幄, 及时作出一系列正确决策和部署, 全国上下团结奋斗的结果。我代表国务院, 向在各个领域和岗位上辛勤劳动、作出贡献的全国各族人民致以崇高敬意! 向关心与支持祖国建设和统一的香港特别行政区、澳门特别行政区同胞和台湾同胞以及海外侨胞, 表示诚挚的感谢!

“九五”时期的实践, 丰富了我们按照发展社会主义市场经济的要求, 加强和改善宏观经济管理与调控的经验。

第一, 坚持用发展的办法解决前进中的问题。发展是硬道理。面对各种社会矛盾, 我们始终抓住经济建设这个中心, 采取有效措施促进国民经济持续快速健康发展, 从而为处理好其他矛盾提供了基础。同时, 坚持两手抓、两手都要硬的方针, 不断加强社会主义精神文明建设和民主法制建设, 为集中精力从事经济建设创造了良好的政治社会环境, 并提供强大的精神动力。

第二, 根据经济形势的变化, 适时调整宏观调控



the actual growth rate of the Ninth Five-Year Plan period, it is still fairly high. Arduous efforts have to be made to attain this target through better economic performance. However, as some uncertainties exist both at home and abroad, we have to leave some leeway when defining our target. This will help people focus on restructuring and improving economic returns, and also help prevent overheating of the economy and poor quality or redundant development.

Concentrating on economic restructuring. We have already reached the point where we cannot further develop the economy without making structural adjustments. Under the old economic structure and its crude manner of growth, products will not be marketable, and it will be impossible to sustain resources and preserve the environment. We must adjust the economic structure in developing the economy and maintain a relatively rapid growth in structural adjustments. In the next five years, efforts should be intensified to adjust the patterns of economic development, between different industries, between different regions, and between urban and rural areas, with emphasis on the industrial structure. We should stabilize and strengthen agriculture as the foundation of the economy, accelerate industrial reform, reorganization, upgrading and optimization, vigorously develop the service industry, accelerate efforts to base the national economy and society on information, and continue to reinforce the infrastructure.

Making reform and opening up and technological progress the driving force. The success of both economic development and structural adjustment depends on institutional, scientific and technological innovation. In the next five years, we must unswervingly pursue reform, open China wider to the outside world, and break down the institutional obstacles to the development of productive forces. This will provide a strong impetus for economic and social development. In addition, we have to give priority to the development of science, technology and education, further implement the strategy of developing China through science and education, invigorate science and technology, train more skilled personnel, and better integrate science, technology and education with the economy.

Making improvement of the people's living standards the basic starting point. Raising the people's living standards in both urban and rural areas is the basic goal of our economic development and a crucial factor for expanding domestic demand and stimulating sustained economic growth. We must give priority to raising the people's living standards. To accomplish this we must create more jobs, increase personal income, distribute income more equitably, improve the social security system, and ensure a more comfortable life for the people.

Coordinating economic development with social development. We should make great efforts to improve socialist culture and ethics, democracy and the legal system, balance reform, development and stability, accelerate development of various social undertakings, and ensure social stability. We need to pay close attention to and solve issues of population, resources and the ecological environment, take further steps to implement the strategy of sustainable development, and stimulate coordinated economic and social development.

The Outline of the Tenth Five-Year Plan emphasizes its strategic, macro-economic and policy characteristics. It contains fewer specific targets and sets more tentative ones adjustable to structural changes. The Outline focuses on key development areas and the settlement of major problems, orients our efforts, and presents corresponding policies and measures. It stresses that the role of market mechanisms should be given full play in the implementation of the Plan, and that economic levers, economic policy and legislation be further employed in the government's macro-control. In the process of formulating the Plan, we need to encourage more participation by all elements of society, thus making it a process of giving full scope to democracy, absorbing all useful ideas, and reaching agreement among all sides.

### III. Strengthening Agriculture as the Foundation of the Economy and Striving to Increase Farmers' Income

Agriculture, rural areas and farmers are of great importance to the reform, opening up and modernization drive. During the Tenth Five-Year Plan period, we need to give top priority to implementing the Party's basic rural policy, strengthening agriculture as the foundation of the economy and increasing farmers' income. We must focus on the following aspects of this work:

Accelerating restructuring of agricultural production and the development of the rural economy. This is the fundamental way to improve economic returns

们提出了严峻挑战,也为我们提供了迎头赶上、实现跨越式发展的历史性机遇。从国内看,我们正处在经济结构调整的关键时期,改革处于攻坚阶段,加入世贸组织又会带来一些新的问题。各方面任务十分繁重,许多深层次矛盾需要解决,形势要求我们必须抓住机遇,加快发展。同时,我们也具备许多有利条件,能够在较长时期实现国民经济较快发展。

根据“十五”期间的形势和任务,《纲要》提出今后五年经济和社会发展的主要目标是:国民经济保持较快发展速度,经济结构战略性调整取得明显成效,经济增长质量和效益显著提高,为到2010年国内生产总值比2000年翻一番奠定坚实基础;国有企业建立现代企业制度取得重大进展,社会保障制度比较健全,社会主义市场经济体制逐步完善,对外开放和国际合作进一步开展;就业渠道拓宽,城乡居民收入持续增加,物质文化生活有较大改善,生态建设和环境保护得到加强;科技、教育加快发展,国民素质进一步提高,精神文明建设和民主法制建设取得明显进展。

“十五”计划《纲要》,体现了以下重要指导方针。

坚持把发展作为主题。强调速度与效益相统一,在提高效益的前提下实现较快的发展。有市场、有效益的速度,才是真正的发展,才是硬道理。综合考虑各方面因素,“十五”期间年均经济增长速度预期目标为7%左右。这个速度虽然比“九五”实际达到的速度低一点,但仍然是一个较高的速度。要在提高效益的基础上实现这个目标,必须付出艰巨努力。同时,由于国际国内都存在一些不确定因素,计划的预期目标要留有余地。这样,有利于引导各方面把主要精力放在调整结构和提高效益上,也有利于防止经济过热和重复建设。

坚持把结构调整作为主线。我国经济已经到了不调整就不能发展的时候。按原有结构和粗放增长方式发展经济,不仅产品没有市场,资源、环境也难以承受。必须在发展中调整结构,在结构调整中保持较快发展。今后五年要着力调整产业结构、地区结构和城乡结构,特别要把产业结构调整作为关键。要巩固和加强农业基础地位,加快工业改组改造和结构优化升级,大力发展服务业,加快国民经济和社会信息化,继续加强基础设施建设。

坚持把改革开放和科技进步作为动力。经济发展和结构调整,都要靠体制创新和科技创新来推动。今后五年要坚定不移地推进改革,扩大开放,突破影响生产力发展的体制性障碍,为经济社会发展提供强大动力。要把发展科技、教育放在突出位置,进一步实施科教兴国战略,振兴科技,培养人才,促进科技、教育与经济紧密结合。

坚持把提高人民生活水平作为根本出发点。不断改善城乡人民生活,既是发展经济的根本目的,也



## LINGUAL CLUB / 双语俱乐部

in agriculture and increase farmers' income. While effectively protecting cultivated land and stabilizing our grain production capacities, we need to restructure the patterns of farming, focusing on improving strains, quality and economic returns. We need to accelerate the development of animal husbandry, forestry and aquaculture. We need to adjust the patterns of agricultural production appropriately in different regions, taking into account their local comparative advantages. Agricultural production needs to be developed in light of local characteristics, and scale of economy and specialization need to be developed to raise the proportion of production marketed. Great efforts need to be exerted to promote the industrial management of agricultural production, to support leading enterprises, and to spread the practice of farmers working with companies or producing crops on a contract basis. We need to develop industries for processing, storing and transporting agricultural products and keeping them fresh in order to gain better returns from intensive processing of agricultural products. Town and township enterprises need guidance in restructuring, technological progress and institutional innovations. Small towns and cities need to be expanded, and steady progress needs to be made in urbanization in order to increase job opportunities and sources of income for farmers. We need to work diligently to reinvigorate agriculture through science and education. We need to strengthen the research, development and application of biotechnology, information technology and other high and new technologies, and spread the use of improved strains and advanced technologies. Great efforts need to be made to stimulate the industrialization of agriculture by applying agricultural science and technology. Market information systems for agricultural products need to be established and standards and inspection procedures need to be formulated to ensure food safety and quality. In restructuring agriculture, we need to proceed in light of local conditions and follow the principles governing the development of the market, and we need to protect farmers' autonomy in production and operation and refrain from pressure and coercion.

Actively promoting the reforms in rural areas. While keeping the system of stable, long-term land contracts as a foundation, areas where conditions permit should be encouraged to explore a land operation rights transfer system. In light of the new situation in grain production and distribution, we need to continue to deepen the reform of the grain distribution system. While increasing the central grain reserves appropriately, the main grain-consuming areas should accelerate the pace of market-oriented grain distribution, and their need for grain should be met by establishing long-term and stable purchase and sale relations with the main grain-producing areas and by renewing and regulating the central grain reserves. The relevant departments in the main grain-producing areas should continue to adhere to the three policies of purchasing surplus grain from farmers at protective prices without limit, of having State-owned grain purchase and wholesale businesses sell grain at a profit, and of ensuring closed operation of grain purchase funds and the reform of State-owned grain purchase and wholesale businesses. These departments need to purchase surplus grain from farmers at protective prices without limit, and they will continue to receive funds from the central treasury to make full use of their superiority in grain production. This will expand the grain market for the main grain-producing areas and promote a reasonable rise in grain prices. This will also be conducive to adjusting the agricultural structure in the main grain-consuming areas and broadly increasing farmers' incomes. Basic farmland should be protected, and conversion of cultivated land to non-agricultural land without authorization will never be allowed. This is where we draw the line. The system of administrative fees and taxes in rural areas needs to be reformed by raising the current rates of agricultural tax and special agricultural product tax where it is appropriate, and at the same time abolishing all administrative fees imposed exclusively on farmers, such as contributions to township and village public accumulation funds. This is a sound policy for safeguarding the legitimate rights and interests of farmers and reducing their burden. Reform needs to be accelerated with a review of the experience gained from pilot projects in Anhui Province. As a result of the reform of taxes and administrative fees, it will be necessary to decrease the number of the administrative bodies and employees in towns and townships, and reduce the number of village and group functionaries receiving government subsidies. It will be necessary to dissolve or merge some townships and towns where conditions permit. We need to continue to deepen the financial reform in rural areas and actively seek a financial system that helps stimulate rural economic development. It is necessary to accelerate the reform of the management system for rural credit cooperatives in light of local conditions. It is of particular importance to clearly establish ownership, exercising better control over rural credit cooperatives by bringing them within the legal person framework, and hold individuals

是扩大内需、促进经济持续增长的迫切需要。要坚持把提高人民生活水平摆在重要位置，扩大就业门路，增加居民收入，合理调节收入分配关系，健全社会保障体系，保证人民群众向更加宽裕的小康生活迈进。

坚持把经济发展和社会发展结合起来。大力加强社会主义精神文明建设和民主法制建设，处理好改革、发展、稳定的关系，促进各项社会事业发展，确保社会稳定。高度重视和认真解决人口、资源和生态环境问题，进一步实施可持续发展战略，推动经济、社会、生态环境协调发展。

“十五”计划《纲要》突出了战略性、宏观性、政策性，减少实物指标，增加反映结构变化的预期指标；围绕要解决的主要问题和重点发展领域，提出努力方向和相应的政策措施。强调计划的实施要充分发挥市场机制的作用，政府宏观调控要更多地运用经济杠杆、经济政策和法律手段。在计划制定方法上，力求提高社会参与度，使计划制定过程成为发扬民主、集思广益的过程，成为各有关方面达成共识的过程。

### 三、加强农业基础地位， 努力增加农民收入

农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。“十五”期间要把全面贯彻党在农村的基本政策，加强农业基础地位和增加农民收入，作为经济工作的首要任务，着重抓好以下几项工作。

加快农业和农村经济结构调整。这是提高农业经济效益，增加农民收入的根本途径。在切实保护耕地、稳定粮食生产能力的同时，以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种植业结构、加快发展畜牧业、林业、水产业。发挥各地农业的比较优势，合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率。大力促进农业产业化经营，扶持龙头企业，推广“公司加农户”、“订单农业”等多种形式，发展农产品加工、储运、保鲜等产业，提高农业的后续效益。引导乡镇企业结构调整、技术进步和体制创新。发展小城镇，繁荣小城镇经济，积极稳妥地推进城镇化，拓宽农民的就业空间和增收渠道。大力推进科教兴农，加强生物技术、信息技术等高新技术的研究与开发应用，推广优良品种和先进适用技术，积极扶持农业科技产业发展。加强农业社会化服务体系建设，建立农产品市场信息、食品安全和质量标准与检测体系。调整结构要因地制宜，依据市场规律，维护农民生产经营自主权，不搞强迫命令。

积极推进农村各项改革。在长期稳定土地承包关系的基础上，鼓励有条件的地区积极探索土地经营权流转制度改革。根据粮食生产和流通的新情况，继续深化粮食流通体制改革。在适当扩大中央储备粮规模的同时



responsible for preventing and defusing financial risks. Adhering to their mission of serving agriculture, rural areas and farmers, rural credit cooperatives must strengthen their operation and management, and expand their roles as the dominant financial force in rural areas and as the financial link between farmers. The Agricultural Bank of China and other financial institutions should also give more support to agriculture and the rural economy. The reform of rural supply and marketing cooperatives should be deepened.

Stepping up the construction of agricultural and rural infrastructure. More investments need to be made to accelerate the harnessing of big rivers and lakes. No time can be lost in constructing pivotal projects on major rivers and reinforcing decaying reservoirs to improve their flood-control, flow-management and storage capabilities. Great efforts need to be made to upgrade the water conservancy projects in large irrigated areas, and farmers need to be encouraged to play a more active role in building irrigation and water conservancy projects. We should do a good job in water and soil conservation. Efforts to build national commodity grain bases and quality agricultural product bases need to be intensified to stimulate comprehensive agricultural development. We need to continue to increase the construction of power grids, telecommunications, radio and television installations, roads and water supply facilities in rural areas to improve the production, living and marketing conditions there.

Continuing to fight against poverty in rural areas. Although the seven-year plan to help 80 million people out of poverty has been basically fulfilled, it will be an arduous task for a long time to bring about a fundamental change for the better in poverty-stricken areas. Priority needs to be given in our anti-poverty endeavor to ethnic minority areas in central and west China, the old revolutionary base areas, border areas and destitute areas. Assistance to the poor needs to continue to be development-oriented. More funds need to be put into anti-poverty efforts in every possible way. We need to expand the scale of programs that provide jobs as a form of relief and support efforts in poverty-stricken areas to improve the infrastructure.

#### IV. Energetically Optimizing and Improving Industrial Structure

Readjusting and improving industrial structure is the key to the strategic restructuring of the economy. We must stress the following aspects.

Enhancing traditional industries with high, new and advanced technologies. We need to pay close attention to the restructuring and reform of traditional industries. In these industries enterprises are the main entities, and they should be directed by the market and supported by technological advances. The following measures should be taken. First, we need to increase product variety, improve product quality, save on energy, reduce waste, prevent and control pollution, and increase productivity. These measures are most important in the energy, metallurgy, chemical, machinery, automobile, building materials, construction, textile and light industries. Support should be given to a number of key enterprises for technological renovation to improve their technology and equipment. Second, we need to speed up development of universal, key and accessory technology that can stimulate structural advancement by depending on both domestic innovation and imported technology. We need to stimulate equipment manufacturing and design and build complete plants of large, advanced and highly-efficient equipment that are urgently needed in China. Third, in major industries, we need to encourage the establishment of a number of large companies and enterprise groups through listing, merging, association and reorganization. Such companies and groups need to have their proprietary intellectual property rights, core products and a strong central leadership, and they should become key players and pillars in industrial readjustment and advancement. Fourth, we need to support and promote renovation of old industrial bases, fully utilizing their strong foundation and concentration of talent to raise their production levels. At the same time, we need to take economic, legal and necessary administrative measures to continue closing down plants and mines that produce shoddy goods, waste resources, cause serious pollution, or operate under unsafe conditions. Outmoded and redundant production capacity needs to be abandoned or reduced. Relocation and reconstruction of these outmoded facilities will be prohibited. Enterprises that have been in the red for long with little hope of recovery and whose debts surpass assets should be allowed to go bankrupt, and mines with exhausted resources should be closed. We should take the initiative to facilitate and gradually standardize the channels for encouraging such enterprises to quit the market.

时,粮食主销区要加快粮食流通市场化进程,通过与粮食主产区建立长期稳定的购销关系,以及中央储备粮的轮换与调控,保证粮食需要。粮食主产区要继续坚持“三项政策、一项改革”,按保护价敞开收购农民余粮,中央财政继续给予资金支持,以充分发挥其粮食生产的优势。这样做,既可为主产区腾出粮食销售市场,促进粮价合理回升,也有利于推进主销区农业结构调整,全面增加农民收入。要保护好基本农田,决不允许擅自将耕地改为非农用地。这是一条不可逾越的“红线”。推进农村税费制度改革,取消乡统筹、村提留和其他面向农民征收的一切行政性收费,同时适当提高现行农业税和农业特产税税率。这是保障农民合法权益、减轻农民负担的治本之策。要在总结安徽省试点经验的基础上,加快改革步伐。同税费改革相结合,精简乡镇机构,裁减人员,减少村组干部补贴人数;有条件的地方,适度撤并乡镇。继续深化农村金融改革,积极探索适应农村经济发展要求的农村金融体系。因地制宜加快农村信用社管理体制改革,关键是要明确产权关系,完善法人治理结构,落实防范和化解风险的责任。农村信用社要坚持为农业、农村、农民服务的方向,加强经营管理,充分发挥在农村金融中的主力军和联系农民的金融纽带作用。农业银行和其他金融机构要加强对农业和农村经济的支持。深化农村供销社改革。

加强农业和农村基础设施建设。进一步增加投入,加快大江大河大湖治理,抓紧主要江河控制性工程建设和病险水库加固,提高防洪调蓄能力。着力抓好大型灌区节水工程改造,积极开展群众性农田水利建设,搞好水土保持。加强国家商品粮和优质农产品基地建设,搞好农业综合开发。继续加强农村电网、通信、广播电视、道路、供水等设施建设,切实改善农村生产、生活和市场条件。

继续搞好农村扶贫工作。“八七”扶贫攻坚任务虽已基本完成,但从根本上改变贫困地区面貌,仍是一项长期而艰巨的任务。要继续加大扶贫力度,重点做好中西部少数民族地区、革命老区、边疆地区和特困地区的扶贫工作。坚持开发式扶贫,多方面增加扶贫资金投入,扩大以工代赈规模,支持贫困地区加强基础设施建设。

#### 四、大力推进产业结构优化升级

产业结构调整 and 升级,是经济结构战略性调整的重点,要突出以下几个方面。

用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业。要把传统产业的改组改造放在重要位置,以市场为导向,以企业为主体,以技术进步为支撑,抓好几个环节。一是围绕增加品种、改善质量、节能降耗、防治污染和提高劳动生产率,在能源、冶金、化工、轻纺、机械、汽车、建材及建筑等行业,支持一批重点企业技术改造。



## LINGUAL CLUB / 双语俱乐部

Developing new and high-tech industries, and using information technology to stimulate industrialization. In accordance with actual situations, we need to selectively stimulate development of new and high-tech industries such as information technology, bioengineering and materials science. We need to lend support to important high-tech projects, such as high-speed, wide-band information networks, key integrated circuits and new-type carrier rockets in order to strengthen China's new and high-tech industries on an overall as well as individual basis. We need to expand the manufacturing of information technology products, develop the ability to manufacture all components of integrated systems, and enhance our capability for independent development. We also need to develop the software industry, strengthen the development of the information infrastructure, and apply information technology extensively throughout society, so that industrialization and the information revolution go hand in hand.

Intensifying construction of water conservation, transportation, energy and other infrastructural facilities and attaching great importance to strategic issues concerning resources. Lack of water resources is a serious limitation on the economic and social development of our country. We need to put water conservation high on our work agenda, establish a rational pricing mechanism, comprehensively adopt water conservation technologies and measures, develop water-efficient industries, and raise the entire society's awareness of water conservation. Prevention and control of water pollution should be strengthened. We need to expedite the planning and building of projects to divert water from the south to the north. In transportation, we need to build highways, railways, ports, channels, airports and pipelines in order to establish a comprehensive modern transportation system that is unimpeded, safe and convenient. Energy, oil in particular, is of strategic importance. Domestic development and production of oil can no longer keep pace with the needs of the country's economic and social development, resulting in an increasing imbalance between oil supply and demand. Therefore, we need to take all possible measures to conserve oil, accelerate exploration and exploitation of oil and natural gas resources, and make effective use of overseas resources. We need to institute a system for preserving strategic resources such as oil as soon as possible. We need to vigorously carry out the renovation of large coal mines, construct highly productive and efficient mines, and place special emphasis on the exploitation of clean coal. While making full use of existing power-generating capacity, we need to develop hydroelectric power and build large-scale thermal power plants near coal mines, reduce small thermal power stations, and moderately develop nuclear power. Emphasis should be placed on the development of all types of new energy. We should further reform the power management system, gradually allow power plants and grids to operate separately, and institute bidding for the power supply.

Accelerating development of the service industry. This is an important avenue for stimulating economic restructuring and increasing employment. Actively developing modern services, such as those involving information, banking, accounting, consulting and legal services, will help raise the overall quality of the service industry. Up-to-date management and technology should be applied to renovate traditional service sectors, such as internal and foreign trade, transportation and municipal services, to improve their quality and efficiency. Services for urban consumers, such as real estate, community services, tourism, catering, entertainment and fitness services, need to be expanded. We need to deepen reform and adopt necessary policies and measures to create an environment favorable for the development of the service industry.

## V. Implementing the Strategy for Developing the Western Region to Promote Coordinated Progress of Different Regions

Carrying out the strategy for western development to accelerate the development of the central and western regions is a major step taken to achieve the strategic goals of the third stage of the country's modernization drive. During the Tenth Five-Year Plan period, we need to place emphasis on key projects for a good beginning of the program. Construction of infrastructure and protection of the ecological environment should take priority, and we should strive for major breakthroughs within five to ten years. At the same time, we hope to develop science, technology, and education considerably.

We must focus on a number of major projects of strategic significance, such as the transmission of natural gas and electricity from western to eastern regions and the planned Qinghai-Tibet Railway. We need to give priority to pro-

切实提高工艺和装备水平。二是通过自主创新和引进技术、加快对推动结构升级的共性技术、关键技术和配套技术的开发。振兴装备制造业,开发制造急需的大型高效和先进成套技术装备。三是通过上市、兼并、联合、重组等形式,在主要行业形成若干拥有自主知识产权、主业突出、核心能力强的大公司和企业集团,使之成为调整结构、促进升级的骨干和依托。四是积极支持和促进老工业基地改造,充分发挥其基础雄厚、人才聚集的优势,努力提高产业水平。以资源开采为主的城市和大矿区,要因地制宜发展接续和替代产业。

与此同时,要综合运用经济、法律和必要的行政手段,继续依法关闭产品质量低劣、浪费资源、污染严重、不具备安全生产条件的厂矿,淘汰落后和压缩过剩生产能力,并严禁转移重建。长期亏损、资不抵债、扭亏无望的企业和资源枯竭的矿山,要实施破产关闭。积极疏通和逐步规范企业退出市场的通道。

发展高新技术产业,以信息化带动工业化。从实际出发,有选择地加快信息技术、生物工程和新材料等高新技术产业发展。重点支持建设高速宽带信息网络、关键集成电路、新型运载火箭等重大高技术工程,形成我国高新技术产业的群体优势和局部强势。加快发展信息产品制造业,提高自主开发能力和系统集成能力。积极发展软件产业。加强信息基础设施建设。要在企业技术开发和生产经营、社会公共服务、政府行政管理等方面广泛应用数字化、网络化技术,把工业化和信息化更好地结合起来。

加强水利、交通、能源等基础设施建设,高度重视资源战略问题。水资源短缺,是我国经济和社会发展的严重制约因素。要把节水放在突出位置,建立合理的水资源管理体制和水价形成机制,全面推行各种节水技术和措施,发展节水型产业,建立节水型社会。加强水污染防治,搞好污水处理和利用。加紧南水北调等重大项目的规划和建设。要加强公路、铁路、港口、航道、机场、管道系统的建设,建立健全畅通、安全、便捷的现代综合运输体系。能源特别是石油问题,是资源战略的一个重要问题。国内石油开发和生产不能适应经济和社会发展的需要,供需矛盾日益突出。必须千方百计节约和替代石油,加快石油和天然气勘探与开发,积极利用国外资源,并尽快建立石油等战略资源的储备制度。积极推进大型煤矿改造,建设高产高效矿井,重视洁净煤技术的开发利用。充分利用现有发电能力,积极发展水电、坑口大机组火电,压缩小火电,适度发展核电。加强城乡电网建设和改造,推进全国联网。深化电力体制改革,逐步推进厂网分开、竞价上网。重视发展各种新能源。

加快发展服务业。这是促进结构升级和增加就业的重要途径。积极发展信息、金融、会计、咨询、法律



fields where we have been doing well and which have a great bearing on development, and we have to strive to make fresh progress in the important fields of genomics, information technology, nanoscience, ecology and geoscience. We have to facilitate the integration of natural and social sciences and promote the development of management science. Emphasis should be placed on the development of philosophy and other social sciences and the advances of theoretical innovation.

We need to accelerate the reform of the structure of scientific disciplines and technological fields and promote closer connection of science and technology with the economy. Efforts to develop a State system to stimulate innovation need to be increased, and enterprises should be encouraged to play an important role in technological progress and innovation. We need to continue to encourage research institutes engaged in technological development to merge with enterprises or be turned into enterprises, push forward the reform of non-profitable research institutes, and establish a number of research institutes that can exert international influence. We need to develop agencies providing scientific and technological services. We need to improve the venture capital investment mechanism, establish a growth enterprise market, and support small and medium-sized enterprises in technological innovation. The State and the society need to invest more in science and technology. Great efforts have to be made to build national key laboratories.

Persisting in the appropriately advanced development of education to serve national economic and social development. In developing education, we should meet the needs of modernization, the world and the future, and concentrate on improving quality-oriented education to ensure that students improve in terms of their moral qualities, intellectual ability, physical fitness and aesthetic appreciation. We need to consolidate the achievements of making nine-year compulsory education basically universal in the country and eliminating illiteracy among young and middle-aged people, accelerate the expansion of senior secondary school education and higher education, and develop high-level programs in selected universities and disciplines. Great efforts have to be made to develop vocational education and training and to establish an educational system featuring the integration of vocational education with general education. We need to develop adult education and various forms of continuing education and gradually establish a system of lifelong education. Information technology needs to be used to develop long-distance education. In light of the needs of economic and social development, we need to continue to revise the educational structure and organization, optimize the division of disciplines, update teaching materials, reform the curriculum, examination and evaluation systems, improve the methods and quality of instruction, strengthen moral and ideological and political education, recruit a strong corps of capable teachers, and improve the overall quality of teachers.

We need to deepen the reform of the systems for operating schools and managing education. We need to allow institutions of higher learning to make operating decisions according to law, and to continue the transformation to a system of independent operation of logistics services in universities and colleges. We need to encourage and help all sectors of society to run schools, and we need to exercise oversight over their operation. The State and society need to invest more in education. More transfer payments and investment in special projects from the central and provincial financial departments have to be provided for education in poverty-stricken areas. County governments need to strengthen overall planning of funds for elementary education. Measures must be implemented to guarantee the coordinated payment of teachers' salaries. We need to improve the systems of scholarships, grants and loans to support students, and we need to take effective measures to curb arbitrary charges levied by schools.

Making efforts to implement the strategy of tapping human resources, and focusing on the important tasks of training, attracting and utilizing talented people. In light of the overall interests of the modernization drive and long-term development, we need to train and nurture a contingent of leading cadres who are highly competent, who persist in taking the socialist road with Chinese characteristics, who have a good understanding of political theory and a pioneering spirit, who have mastered modern science and culture and acquired managerial expertise, and who are well-experienced. We need to train and cultivate a contingent of specialized and highly qualified public servants who are honest, industrious and eager to serve the people, and a contingent of professional personnel and enterprise managers who have advanced technological and managerial knowledge and innovative ability and meet the needs of economic and social development. We need to attach importance to training leading scholars in fron-

## 六、落实科教兴国战略， 大力开发人才资源

这是《纲要》的重要内容，也是实现今后五年各项任务的重要保证。

促进科技进步和创新，为结构调整和经济发展提供强大动力。一要积极推进具有战略意义的高技术研究，力争在一些关系国民经济命脉和国家安全的关键技术领域取得突破。努力提高自主创新能力，促进高新技术成果产业化。二要为传统产业升级提供技术支持。重点在农产品加工及转化、装备制造、节水节能、纺织品后整理等方面的技术取得进展，加快高新技术向传统产业渗透。三要加强基础研究和应用基础研究，提高科技持续创新能力。加强基础科学重点领域的前沿性交叉性研究。选择我国具有优势和对发展有重大意义的领域，加强应用基础研究，力争在基因组学、信息科学、纳米科学、生态科学和地球科学等方面取得新进展。促进自然科学与社会科学的交叉融合，推动管理科学发展。重视发展哲学社会科学，推进理论创新。

加快科技体制改革步伐，进一步促进科技与经济紧密结合。加强国家创新体系建设。推动企业成为技术进步和创新的主体。继续鼓励技术开发类科研院所进入企业或改制为企业。积极推进社会公益类科研院所改革。培育和形成一批具有国际影响的科研机构。发展社会化的科技中介服务业。完善风险投资机制，建立创业板股票市场，支持中小企业技术创新。加大国家和社会对科技的投入。加强国家重点实验室建设。

坚持教育适度超前发展，为国民经济和社会发展服务。发展教育，要面向现代化、面向世界、面向未来，着力推进素质教育，促进学生德、智、体、美全面发展。巩固基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的成果，加快高中阶段教育和高等教育的发展，重点建设一批高水平大学和学科。大力发展职业教育和职业培训，建立职业教育与普通教育相互沟通的教育体系。发展成人教育和多种形式的继续教育，逐步形成终身教育体系。重视发展儿童早期教育。利用信息技术发展远程教育。根据经济和社会发展的要求，继续调整教育结构和布局，优化专业设置，更新教材，改革课程体系、考试评价制度和教学方法，提高教学质量。加强德育，尤其要重视青少年的品德教育，改进学校思想政治工作。搞好教师队伍建设和全面提高教师的思想和业务素质。

深化办学体制和教育管理体制改革。依法落实高校办学自主权，继续推进高校后勤服务社会化。鼓励、支持和规范社会力量办学。增加国家和社会对教育的投入。适应农村税费改革后的新情况，县级政府要负责对基础教育经费的统筹。落实教师工资统一发放的措施。中央财政和省级财政要加大对困难地区、民族地区教育



tier disciplines and improving the scientific qualifications and working skills of the entire labor force. We need to deepen the reform of the personnel system; establish and improve the methods by which professionals are recruited, examined, evaluated, transferred, motivated and supervised; and formulate a mechanism that encourages talented people to emerge in large numbers and to make full use of their talent. We need to establish and improve the human resources market and protect intellectual property rights in accordance with the law. We need to attract and employ highly qualified professional personnel from abroad, and encourage students studying overseas to come back to work in China or serve their country in other appropriate ways.

## VII. Further Deepening Reforms and Opening Wider to the Outside World

To gradually bring the system of socialist market economy to completion and to stimulate structural readjustment and economic growth, we will press ahead with reforms and open wider to the outside world.

Deepening the reform of State-owned enterprises to enable them to compete as equals in the market. The key issue in this regard is to accelerate the establishment and improvement of a modern corporate structure. We need to encourage large and medium-sized State-owned enterprises to adopt the shareholding system and to change their operating procedures by listing their shares on the stock market, setting up joint ventures with foreign investors, or holding each other's shares. The State must hold a controlling stake in strategic enterprises that have a bearing on the national economy and national security, but not necessarily in others. We need to energetically explore effective ways to manage State assets. The legal person system of governance for enterprises must be fully developed and implemented. The supervision and control of State-owned enterprises in particular need to be established and strengthened, and the role of the board of supervisors needs to be fully developed. Enterprises need to further reform their personnel, labor and income distribution systems in order to improve the mechanisms that provide incentives and restraints and to strengthen scientific management. In the course of readjusting the industrial structure, we must adhere to the principles of "advancing in some aspects while withdrawing from others" and "focusing on certain tasks while putting others aside" and promote strategic readjustment of the overall arrangement of the State-owned sector of the economy. We need to continue to relax control over small and medium-sized State-owned enterprises to enhance their vitality. More efforts need to be made to separate the functions of government from those of enterprises, and the functions of government need to be transformed to reduce administrative oversight and approval. Chambers of commerce, trade associations and other such intermediary agencies are encouraged to play appropriate roles. We need to further reform the management systems of industries such as electricity, railways, civil aviation and telecommunications, and introduce a mechanism for competition. The reforms need to improve the relations between the government and enterprises so as to meet the requirements of a socialist market economy. The ownership system needs to be further improved. We need to uphold the dominance of the public sector of the economy, let the State-owned sector play the leading role, develop various forms of collective undertakings, and support, encourage and guide the healthy development of private and individual sectors of the economy.

Overhauling and regulating market order, and expanding the market system. This is an urgent task to ensure normal operation of the economy and an important measure to strengthen the socialist market economy. We must improve laws and regulations concerning markets and enforce the law strictly. We need to improve oversight mechanisms and employ advanced technology to improve market supervision. We must persist in cracking down on criminal activities such as producing and marketing fake and shoddy goods, tax evasion, tax fraud, obtaining foreign currency through deception, and smuggling. We need to overhaul the construction market, reorganize and standardize the financial order, strengthen financial discipline, tighten audit supervision, standardize the operation of intermediary agencies, break up monopolies by departments or industries, eliminate regional barriers, and improve management and supervision of industrial safety. We need to establish as soon as possible and improve an integrated national market system that is standardized and encourages fair competition. We need to focus our efforts on the development of markets for production factors, especially capital, foster professional ethics that stress honesty and trustworthiness, and accelerate the establishment and improvement of a

的转移支付和专项投入。健全奖学金、助学金和助学贷款等制度。采取有力措施,切实制止学校乱收费。

实施人才战略,把培养、吸引和用好人才作为一项重大任务。着眼于现代化建设全局和长远发展,培养和造就坚持走有中国特色社会主义道路,有较高政治理论素养和开拓精神,掌握现代科学文化和管理知识,并经过实践考验的高素质领导人才队伍。培养和造就具有公仆意识、廉洁、勤政、高素质、专业化的公务员队伍。培养和造就掌握先进科学技术和知识、创新能力强、适应经济和社会发展需要的各类专业队伍和企业经营管理队伍。重视培养具有世界前沿水平的学科带头人。普遍提高全体劳动者的科学素养和劳动技能。深化干部人事制度改革,建立和完善对各级各类人才的选拔任用、考核评价、流动配置、激励监督的制度,形成有利于人才辈出、人尽其才的机制。建立和完善人才市场。依法保护知识产权。吸引聘用海外高级专门人才。鼓励留学人员回国工作或以适当方式为祖国服务。

## 七、进一步深化改革和扩大对外开放

要按照逐步完善社会主义市场经济体制、促进结构调整和经济发展的要求,积极推进改革,扩大对外开放。

继续深化国有企业改革,使企业真正成为市场竞争的主体。重点是加快建立和完善现代企业制度。鼓励国有大中型企业通过规范上市、中外合资和相互参股等形式,实行股份制,转换经营机制。对关系国民经济命脉和国家安全的重要企业,国家必须控股;对其他企业,不必都要控股。积极探索国有资产管理的有效形式。健全企业法人治理结构。特别要建立和完善对国有企业的监管机制,充分发挥监事会的作用。深化企业人事、劳动和分配制度改革,建立健全激励机制和约束机制,强化科学管理。要结合产业结构调整,坚持“有进有退、有所为有所不为”的方针,推进国有经济布局的战略调整。继续放开搞活国有中小企业。进一步实行政企分开,切实转变政府职能,减少行政性审批。发挥商会、行业协会等中介组织的作用。推进电力、铁路、民航、通信等行业管理体制的改革,引入竞争机制。通过改革,使政府与企业的关系真正转到符合社会主义市场经济要求的轨道上来。继续调整和完善所有制结构。坚持以公有制经济为主体,发挥国有经济主导作用,发展多种形式的集体经济,支持、鼓励和引导私营、个体经济健康发展。

大力整顿和规范市场经济秩序,进一步发展市场体系。这既是保证当前经济正常运行的迫切需要,又是完善社会主义市场经济体制的重要举措。要健全市场法律法规,严格执法。完善市场监督机制,运用现代科技手段,加大监管力度。坚持不懈地打击制售假冒伪劣产



and rural residents. We need to develop preventive medical care for communities, improve public health services in rural areas, and expand public-oriented sports facilities.

### IX. Continuing to Implement the Strategy of Sustainable Development

We need to better coordinate the development of population, resources and the environment, and place more emphasis on the implementation of the strategy of sustainable development.

Adhering to the basic State policy on family planning. We must work hard to sustain the low birth rate and improve prenatal and postnatal care. We need to devote more effort to the management of family planning in rural areas and among the floating population. We should establish awards for family planning and continue to hold leaders of local Party and government organizations responsible for work in this regard. Legislation on population and family planning must be accelerated. We need to expand care for senior citizens.

Protecting natural resources and using them properly. We need to protect and make proper use of valuable resources such as fresh water, farmland and energy in accordance with the law. We must gradually establish a system of reserves for strategically important mineral resources and ensure their safe supply. We need to strengthen the comprehensive development, utilization and conservation of marine resources. We need to increase our recycling of resources in order to utilize our resources more effectively. We need to improve the system of paying compensation for the use of natural resources. We must safeguard the rights and interests of the State as the owner of mineral and other resources. We must improve laws and regulations in this regard, and strengthen law enforcement.

Improving ecological conservation and strengthening environmental protection. Greater efforts need to be exerted to complete projects to protect natural forests, such as those along the upper reaches of the Yangtze River and the upper and middle reaches of the Yellow River. We need to intensify work on the Northeast, North and Northwest China Shelter Forest Projects and similar projects on the middle and lower reaches of the Yangtze. We need to step up our efforts to prevent the karst from becoming stony desert. No time can be lost in bringing under control the sources of sand storms affecting the area around Beijing and Tianjin. We need to continue our efforts to control and treat water pollution in important river valleys, regions and sea areas. We need to treat pollution in large and medium cities with the aim of noticeably improving the quality of the environment there. We also need to pay due attention to prevention and control of environmental pollution in rural areas, especially chemical pollution in agricultural production. We need to improve environmental, meteorological and seismological monitoring to help prevention and reduction of natural disasters.

### X. Promoting Cultural and Ethic Progress, Improving Democracy and the Legal System, and Strengthening National Defense

Vigorously promoting socialist cultural and ethic progress. We need to follow the principle of "doing two jobs at once and attaching equal importance to each." We need to consolidate and strengthen the guiding role of Marxism and educate the people in Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought and Deng Xiaoping Theory. We need to promote patriotism, collectivism and socialism. We need to continue education of our cadres in the important principle of "Three Represents" (The Communist Party of China represents the requirement to develop advanced productive forces, an orientation towards advanced culture, and the fundamental interests of the overwhelming majority of the people in China.) and foster the spirit of studying hard, being politically-minded, and being honest and upright. Our cadres should have a correct outlook on the world and life and have correct values. We need to work hard to foster ideas and ethics appropriate for a socialist market economy. We need to administer the country in accordance with moral principles as well as the law. We need to disseminate scientific knowledge, combat ignorance and superstition, and encourage healthy lifestyles. We need to further develop various cultural undertakings, such as literature and art, journalism and publishing, and radio, film and television. We should adhere to the principles of serving the people and socialism and of "letting a hundred flowers blossom and a hundred schools of thought contend." We

但不能把国有资产量化给个人。加强对垄断行业个人收入分配的监管。要规范社会分配秩序，强化税收对收入分配的调节功能，防止收入差距过分扩大。

调整消费结构，改善消费环境。着力改善城乡居民的住行条件。大力发展经济适用住房，建立廉租房供应保障体系。积极发展公共交通。加强城市绿化和城乡基础设施建设，改善城乡居民生活环境。发展社区卫生预防保健，努力改善农村卫生服务条件。加强群众性体育设施建设。

### 九、继续实施可持续发展战略

促进人口、资源、环境协调发展，把实施可持续发展战略放在更突出的位置。

坚持计划生育基本国策。要努力保持低生育水平，促进优生优育。重点做好农村和流动人口计划生育工作。建立计划生育利益导向机制，继续实行地方党政领导责任制。加快人口与计划生育法制建设。认真做好老龄人口的工作，发展老龄事业。

保护和合理利用资源。依法保护和合理利用淡水、土地、能源等宝贵资源。逐步建立战略性矿产资源储备和安全供应体系。加强对海洋资源的综合开发利用和保护。积极开展资源回收利用，大力提高资源综合利用率。健全资源的有偿使用制度。维护矿产等资源的国家所有者权益。完善资源保护和利用的法律法规，强化执法监督。

加强生态建设和环境保护。抓好长江上游、黄河上中游等地区的天然林保护工程建设。继续加强东北、华北、西北和长江中下游等重点防护林体系建设。加强天然草原的保护和建设。推进岩溶地区石漠化综合治理。抓紧治理京津地区风沙源。继续开展重点流域、区域、海域的污染治理。综合治理城市污染，搞好城市绿化，使大中城市环境质量明显改善。重视农村污染治理和环境保护。健全环境、气象和地震监测体系，做好防灾减灾工作。

### 十、加强精神文明和民主法制建设，加强国防建设

大力加强社会主义精神文明建设。坚持两手抓、两手都要硬的方针。巩固和加强马克思主义的指导地位，用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论教育人民，弘扬爱国主义、集体主义、社会主义精神。在干部中深入开展“三个代表”重要思想的教育，坚持讲学习、讲政治、讲正气，树立正确的世界观、人生观、价值观。努力建立适应社会主义市场经济发展的思想道德体系，把依法治国和以德治国结合起来。普及科学知识，反对愚昧迷信，倡导文明健康的生活方式。进一步发展文学艺术、新闻出版、广播影视等各项事业。坚持为人民服务、为



need to produce more and better cultural and intellectual works. We need to maintain the correct orientation of public opinion, and place strong emphasis on the establishment and management of new information media. We need to build more libraries, cultural centers, science and technology centers, museums, archives, and recreation centers for juveniles and senior citizens. We need to deepen reform of the cultural system and promote the development of industries related to culture. We need to organize and standardize the cultural market and persist in the fight against pornography and other illegal products.

Energetically improving socialist democracy and the legal system. We need to develop a socialist democratic political system, govern the country according to the law, and make China a socialist country ruled by law. We need to press ahead with reform of the political system; implement democratic elections, decision-making, management and supervision; protect the extensive rights and freedoms of the people as prescribed by law; and respect and guarantee human rights. We need to continue to strengthen the legislative and supervisory role of the People's Congress, and expand the role of the Chinese People's Political Consultative Conference in political consultation, democratic supervision, and administration and deliberation of State affairs. We need to bring the legal system into line with a socialist market economy. Governments at all levels must conscientiously subject themselves to the supervision of the people's congresses at corresponding levels and consult with the Chinese People's Political Consultative Conference. They must govern in accordance with the law and be strict in performing official duties. We need to deepen the reform of the judicial system, strictly enforce laws, and administer justice impartially. We need to put greater efforts into combating corruption and building a clean government. We need to strengthen legal education and raise the awareness of law among all citizens. We need to strengthen development of legal infrastructures, and improve the qualifications of procuratorial, judicial and public security officers.

We need to make further efforts to implement the Party's policies toward ethnic groups, adhere to and build upon the system of regional autonomy of ethnic minorities, and develop socialist relationships among all ethnic groups characterized by equality, unity and mutual assistance. As part of our efforts to develop the western regions of China, we need to accelerate the all-round economic and social development of the areas inhabited by ethnic minorities, and strive for common prosperity and progress of all ethnic groups. We need to implement the Party's policies on religion in a comprehensive manner, protect the people's freedom of religious belief, administer religious affairs in accordance with the law, and help the various religions adapt to socialist society. We need to conscientiously implement the Party's policies on affairs concerning overseas Chinese and bring their role into full play in the modernization drive and the great cause of peaceful reunification of the country.

We need to better safeguard social stability and correctly handle conflicts among the people in the new era. We should pay close attention to correspondence from the people and their personal visits. We need to improve public order through comprehensive measures and crack down on criminal activities that pose a threat to social order and national security. We must use legal means to combat ethnic separatist activities, religious extremist forces, violent and terrorist activities, cults, and illegal activities carried out under the guise of religion. We need to continue our campaign against the Falun Gong cult, and further expose and condemn the anti-humanity, anti-society and anti-science nature of the cult, which has become a tool for domestic and overseas forces hostile to our socialist government. We need to mete out severe punishment to the small number of criminals while making unremitting efforts to unite, educate and rescue the vast majority of people who have been taken in.

Strengthening national defense and building up the armed services. This is an important guarantee for the security of the State and the success of the modernization drive. As we focus our efforts on developing the national economy, we must also strengthen our national defense and increase our defense capabilities. We need to strengthen ideological and political work among servicemen, ensure the absolute leadership of the Party over the armed forces, and guide the development of the armed forces in the correct direction. We need to work conscientiously to implement the military strategy of active defense in the new era; persist in reform and innovation; strengthen the armed forces through science and technology, with an emphasis on quality and thrift; run the armed forces by law; and streamline the armed forces in a Chinese way in order to build a more modernized, standardized revolutionary army. We need to raise the people's awareness of the importance of national defense and improve the mobilization system. We need to strengthen defense-related scientific research, reform and restructure science, technology and industry related to national defense, develop new

社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针, 生产出更多更好的精神产品。坚持正确的舆论导向。高度重视新的信息媒体的建设和管理。加强图书馆、文化馆、科技馆、博物馆、档案馆等文化设施建设, 加强青少年、老年活动场所建设。继续开展群众性精神文明创建活动。深化文化体制改革, 完善文化经济政策, 推动有关文化产业发展。整顿和规范文化市场。坚持不懈地开展“打黄打非”斗争。

积极推进社会主义民主法制建设, 发展社会主义民主政治, 依法治国, 建设社会主义法治国家。继续推进政治体制改革, 实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督, 保证人民依法享有广泛的权利和自由, 尊重和保障人权。继续加强人民代表大会的立法和监督工作。发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政作用。完善适应社会主义市场经济体制的法律体系。各级政府要自觉接受同级人大的监督, 主动听取政协的意见。推进政府工作法制化, 依法行政, 从严治政。深化司法改革, 严格执法、公正司法。深入开展反腐败斗争, 加强廉政建设。强化法制教育, 增强全体公民的法制观念。加强政法系统基础设施建设, 提高政法队伍素质。

进一步落实党的民族政策, 坚持和完善民族区域自治制度, 发展平等、团结、互助的社会主义民族关系。结合西部大开发, 加大支持力度, 加快少数民族和民族地区经济与社会全面发展, 促进各民族共同繁荣和进步。全面贯彻党的宗教政策, 保障公民宗教信仰自由, 依法管理宗教事务, 积极引导宗教与社会主义社会相适应。认真贯彻党的侨务政策, 充分发挥海外侨胞在祖国现代化建设与和平统一大业中的作用。

进一步维护社会稳定。正确处理新时期人民内部矛盾。重视群众的来信来访。搞好社会治安综合治理, 打击各种危害社会与国家安全的犯罪活动。依法打击民族分裂活动、宗教极端势力、暴力恐怖活动、邪教和利用宗教进行非法活动。继续开展同“法轮功”邪教组织的斗争, 深入揭露和批判其反人类、反社会、反科学的邪教本质, 及其沦为国内外敌对势力反对我国社会主义政权工具的反动面目, 依法严厉打击极少数违法犯罪分子, 坚持不懈地团结、教育、挽救绝大多数被蒙骗的群众。

加强国防和军队建设。这是国家安全和现代化建设的重要保证。在集中力量发展国民经济的同时, 必须积极推进国防建设, 增强国防实力。要大力加强军队思想政治建设, 确保党对军队的绝对领导和军队建设的正确方向。认真贯彻新时期积极防御的战略方针, 坚持改革创新, 坚持质量建军, 科技强军, 勤俭建军, 依法治军, 走有中国特色的精兵之路, 全面提高军队革命化、现代化、正规化建设水平。强化全民国防意识, 健全国防动员体制。加强国防科研, 推进国防科技工业调整,



## LINGUAL CLUB / 双语俱乐部

weapons and equipment, utilize modern technology, especially high technology to improve the defense capabilities and combat effectiveness of the armed forces, and ensure their preparedness for any contingency.

Fellow Deputies, As we enter the new century, we will continue to adhere to the principle of "one country, two systems" and the basic laws of Hong Kong and Macao special administrative regions. We will render full support to the chief executives and governments of Hong Kong and Macao in their efforts to govern the regions in accordance with the law, and defend the long-term prosperity and stability of Hong Kong and Macao.

An early settlement of the Taiwan question and the accomplishment of national reunification are the shared aspirations of the entire Chinese nation and an enormous task we are now facing. We will continue to follow the basic principles of "peaceful reunification" and "one country, two systems" and the eight-point proposal put forward by President Jiang Zemin. We will, together with the vast majority of our compatriots in Taiwan, resolutely put a stop to any separatist attempt and do our utmost to achieve peaceful reunification. We will adhere to the one China principle, continue to push for cross-Straits dialogue and negotiations on that basis, and promote economic, cultural and personnel exchanges between the two sides. We are confident that with the unremitting efforts of all Chinese people, the great cause of national reunification will surely be accomplished at an early date.

In the face of an international situation characterized by growing political multi-polarization and economic globalization, we will, as always, pursue an independent foreign policy of peace, develop friendly relations and cooperation with all countries on the basis of the Five Principles of Peaceful Coexistence, and strive for a long-term peaceful international environment and good relations with our neighbors. China will take an active part in international affairs and make fresh contributions to the maintenance of world peace, the promotion of international cooperation, the achievement of common development, and the establishment of a peaceful, stable, just and reasonable new international political and economic order.

Fellow Deputies, The year 2001 is the first year into the new century and the first year for the implementation of the Tenth Five-Year Plan. To ensure a good beginning for this endeavor, it is crucial to act in the spirit of the Fifth Plenary Session of the Party's Fifteenth Central Committee and its conference on economic work, and do all aspects of this year's work well. We need to adhere to the policy of expanding domestic demand and continue to follow a proactive fiscal policy and a prudent monetary policy. We will issue 150 billion yuan of long-term treasury bonds, and invest the ensuing revenue in projects under construction and development projects in the western regions. We will raise the salaries of staffs of government organizations and institutions at an appropriate rate. We will also increase the earnings of urban residents with low incomes. We need to put strengthening agriculture and increasing farmers' incomes on the top of our economic agenda, and take effective measures to solve outstanding agricultural and other problems presently facing rural areas. We need to consolidate and build on our achievements in the reform of State-owned enterprises, and pay special attention to establishing a modern corporate structure, transforming operational mechanisms and intensifying scientific management. We need to quicken preparation for accession into the World Trade Organization. We need to improve the social security system, create more jobs by various means, and raise people's living standards. An important and pressing task is to make great efforts in reorganizing and standardizing the order of the market economy. We need to promote cultural and ethnic progress and improve democracy and the legal system. We need to continue to handle the relationship between reform, development and stability properly, improve all facets of public security and maintain social stability. We fully support Beijing's bid to host the Olympic Games. We need to make overall plans by taking all factors into consideration and avail ourselves of the favorable circumstances in order to sustain our forward momentum in economic and social development.

Fellow Deputies, We have already entered the 21st century and started to march toward the strategic objectives of the third stage in the modernization drive. No difficulties or hardships can deter we Chinese people in our pursuit of success. Let us rally closely around the Party Central Committee with Comrade Jiang Zemin at its core, hold high the great banner of Deng Xiaoping Theory, adhere to the Party's basic line, and follow the guidance of the important principle of the "Three Represents." Let us bestir ourselves and work diligently toward the objectives set forth in the Tenth Five-Year Plan for the establishment of a strong, prosperous, democratic, and culturally advanced modern socialist country! ■

改革、发展新型武器装备, 增强现代技术特别是高技术条件下防卫作战的能力, 做好应付各种复杂情况的准备。

各位代表! 进入新世纪, 我们将继续按照“一国两制”方针和基本法, 全力支持香港、澳门特别行政区行政长官和政府依法施政, 加强港澳与内地的经济合作及交流, 维护香港、澳门的长期繁荣稳定。

尽早解决台湾问题, 实现祖国完全统一, 是中华儿女的共同期盼, 是我们面临的重大任务。我们将继续执行“和平统一、一国两制”的基本方针和江泽民主席提出的八项主张, 与广大台湾同胞一道, 坚决阻止任何制造分裂的图谋, 尽一切可能争取和平统一。我们将坚持一个中国原则, 在此基础上继续推动两岸对话与谈判, 发展两岸经济文化交流和人员往来。我们坚信, 经过中华儿女的不懈奋斗, 祖国统一大业必将早日完成。

面对世界多极化和经济全球化深入发展的国际形势, 我们将始终不渝地奉行独立自主的和平外交政策, 在和平共处五项原则的基础上, 进一步同世界各国发展友好合作关系, 争取一个长期的国际和平环境和良好的周边环境。中国将积极参与国际事务, 为维护世界和平、促进国际合作、实现共同发展, 为推动建立和平稳定、公正合理的国际政治经济新秩序, 作出新的贡献。

各位代表! 2001年是进入新世纪、实施“十五”计划的第一年。全面贯彻党的十五届五中全会和中央经济工作会议精神, 做好今年的各项工作, 对于实施“十五”计划起好步、开好局, 至关重要。要坚持扩大国内需求的方针, 实施积极的财政政策和稳健的货币政策。继续发行1500亿元长期建设国债, 集中用于在建项目和西部开发项目。同时, 适当增加机关事业单位人员工资, 提高城镇低收入者收入。把加强农业基础地位和增加农民收入放在经济工作首位, 采取有力措施切实解决当前农业、农村中存在的突出问题。巩固和扩大国有企业改革成果, 在建立现代企业制度、转换经营机制和加强科学管理上狠下功夫。抓紧做好加入世贸组织的各项准备工作。加快完善社会保障体系, 多渠道扩大就业, 改善人民生活。要把大力整顿和规范市场经济秩序, 作为一项紧迫的重要任务。加强精神文明和民主法制建设。继续处理好改革、发展、稳定的关系, 搞好社会治安综合治理, 维护社会稳定。支持北京市申办奥运。要统筹兼顾, 乘势前进, 保持经济和社会发展的良好势头。

各位代表! 我们已经跨进了21世纪, 迈上了向现代化建设第三步战略目标进军的新征程。任何艰难险阻都挡不住中国人民胜利前进的步伐! 让我们紧密团结在以江泽民同志为核心的党中央周围, 高举邓小平理论伟大旗帜, 坚持党的基本路线, 以“三个代表”重要思想为指导, 振奋精神, 扎实工作, 为实现“十五”计划目标, 为把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家而努力奋斗! ■



Lampiran : 3



## CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

(Adopted on December 4, 1982)

### PREAMBLE

China is one of the countries with the longest histories in the world. The people of all nationalities in China have jointly created a splendid culture and have a glorious revolutionary tradition. Feudal China was gradually reduced after 1840 to a semi-colonial and semi-feudal country. The Chinese people waged wave upon wave of heroic struggles for national independence and liberation and for democracy and freedom. Great and earth-shaking historical changes have taken place in China in the 20th century. The Revolution of 1911, led by Dr Sun Yat-sen, abolished the feudal monarchy and gave birth to the Republic of China. But the Chinese people had yet to fulfil their historical task of overthrowing imperialism and feudalism. After waging hard, protracted and tortuous struggles, armed and otherwise, the Chinese people of all nationalities led by the Communist Party of China with Chairman Mao Zedong as its leader ultimately, in 1949, overthrew the rule of imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism, won the great victory of the new-democratic revolution and founded the People's Republic of China. Thereupon the Chinese people took state power into their own hands and became masters of the country.

After the founding of the People's Republic, the transition of Chinese society from a new-democratic to a socialist society was effected step by step. The socialist transformation of the private ownership of the means of production was completed, the system of exploitation of man by man eliminated and the socialist system established. The people's democratic dictatorship by the working class and based on the alliance of workers and peasants, which is in essence dictatorship of the proletariat, has been consolidated and developed. The Chinese people and the Chinese People's Liberation Army have thwarted aggression, sabotage and armed provocations by imperialists and hegemonists, safeguarded China's national independence and



do so in the political and social life of the country, in promoting friendship with the people of other countries and in the struggle for socialist modernization and for the reunification and unity of the country. The People's Republic of China is a unitary multi-national state built up jointly by the people of all its nationalities. Socialist relations of equality, unity and mutual assistance have been established among them and will continue to be strengthened. In the struggle to safeguard the unity of the nationalities, it is necessary to combat big-nation chauvinism, mainly Han chauvinism, and also necessary to combat local-national chauvinism. The state does its utmost to promote the common prosperity of all nationalities in the country. China's achievements in revolution and construction are inseparable from support by the people of the world. The future of China is closely linked with that of the whole world. China adheres to an independent foreign policy as well as to the five principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence in developing diplomatic relations and economic and cultural exchanges with other countries; China consistently opposes imperialism, hegemonism and colonialism, works to strengthen unity with the people of other countries, supports the oppressed nations and the developing countries in their just struggle to win and reserve national independence and develop their national economies, and strives to safeguard world peace and promote the cause of human progress. This Constitution affirms the achievements of the struggles of the Chinese people of all nationalities and defines the basic system and basic tasks of the state in legal form; it is the fundamental law of the state and has supreme legal authority. The people of all nationalities, all state organs, the armed forces, all political parties and public organizations and all enterprises and undertakings in the country must take the Constitution as the basic norm of conduct, and they have the duty to uphold the dignity of the Constitution and ensure its implementation.

---

## CHAPTER I. GENERAL PRINCIPLES

**Article 1.** The People's Republic of China is a socialist state under the people's democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants. The socialist system is the basic system of the People's Republic of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited.



and the law must be investigated. No organization or individual may enjoy the privilege of being above the Constitution and the law.

**Article 6. The basis of the socialist economic system of the People's Republic of China is socialist public ownership of the means of production, namely, ownership by the whole people and collective ownership by the working people. The system of socialist public ownership supersedes the system of exploitation of man by man; it applies the principle of 'from each according to his ability, to each according to his work.'**

**Article 7. The state economy is the sector of socialist economy under ownership by the whole people; it is the leading force in the national economy. The state ensures the consolidation and growth of the state economy.**

**Article 8. Rural people's communes, agricultural producers' co-operatives, and other forms of co-operative economy such as producers' supply and marketing, credit and consumers co-operatives, belong to the sector of socialist economy under collective ownership by the working people. Working people who are members of rural economic collectives have the right, within the limits prescribed by law, to farm private plots of cropland and hilly land, engage in household sideline production and raise privately owned livestock. The various forms of co-operative economy in the cities and towns, such as those in the handicraft, industrial, building, transport, commercial and service trades, all belong to the sector of socialist economy under collective ownership by the working people. The state protects the lawful rights and interests of the urban and rural economic collectives and encourages, guides and helps the growth of the collective economy.**

**Article 9. Mineral resources, waters, forests, mountains, grassland, unreclaimed land, beaches and other natural resources are owned by the state, that is, by the whole people, with the exception of the forests, mountains, grassland, unreclaimed land and beaches that are owned by collectives in accordance with the law. The state ensures the rational use of natural resources and protects rare animals and plants. The appropriation or damage of natural resources by any organization or individual by whatever means is prohibited.**

**Article 10. Land in the cities is owned by the state. Land in the rural and suburban areas is**



the nationwide use of Putonghua (common speech based on Beijing pronunciation).

**Article 20. The state promotes the development of the natural and social sciences,** disseminates scientific and technical knowledge, and commends and rewards achievements in scientific research as well as technological discoveries and inventions.

**Article 21. The state develops medical and health services,** promotes modern medicine and traditional Chinese medicine, encourages and supports the setting up of various medical and health facilities by the rural economic collectives, state enterprises and undertakings and neighbourhood organizations, and promotes sanitation activities of a mass character, all to protect the people's health. The state develops physical culture and promotes mass sports activities to build up the people's physique.

**Article 22. The state promotes the development of literature and art,** the press, broadcasting and television undertakings, publishing and distribution services, libraries, museums, cultural centres and other cultural undertakings, that serve the people and socialism, and sponsors mass cultural activities. The state protects places of scenic and historical interest, valuable cultural monuments and relics and other important items of China's historical and cultural heritage.

**Article 23. The state trains specialized personnel in all fields** who serve socialism, increases the number of intellectuals and creates conditions to give full scope to their role in socialist modernization.

**Article 24. The state strengthens the building of socialist spiritual civilization** through reading education in high ideals and morality, general education and education in discipline and the legal system, and through promoting the formulation and observance of rules of conduct and common pledges by different sections of the people in urban and rural areas. The state advocates the civic virtues of love for the motherland, for the people, for labour, for science and for socialism; it educates the people in patriotism, collectivism, internationalism and communism and in dialectical and historical materialism; it combats the decadent ideas of capitalism and feudalism and other decadent ideas.

**Article 25. The state promotes family planning** so that population growth may fit the plans



for economic and social development.

**Article 26. The state protects and improves the living environment** and the ecological environment, and prevents and controls pollution and other public hazards. The state organizes and encourages afforestation and the protection of forests.

**Article 27. All state organs carry out the principle of simple and efficient administration**, the system of responsibility for work and the system of training functionaries and appraising their work in order constantly to improve quality of work and efficiency and combat bureaucratism. All state organs and functionaries must rely on the support of the people, keep in close touch with them, heed their opinions and suggestions, accept their supervision and work hard to serve them.

**Article 28. The state maintains public order and suppresses treasonable and other counter-revolutionary activities**; it penalizes actions that endanger public security and disrupt the socialist economy and other criminal activities, and punishes and reforms criminals.

**Article 29. The armed forces of the People's Republic of China belong to the people.** Their tasks are to strengthen national defence, resist aggression, defend the motherland, safeguard the people's peaceful labour, participate in national reconstruction, and work hard to serve the people. The state strengthens the revolutionization, modernization and regularization of the armed forces in order to increase the national defence capability.

**Article 30. The administrative division of the People's Republic of China is as follows:**

(1) The country is divided into provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government; (2) Provinces and autonomous regions are divided into autonomous prefectures, counties, autonomous counties and cities; (3) Counties and autonomous counties are divided into townships, nationality townships and towns. Municipalities directly under the Central Government and other large cities are divided into districts and counties. Autonomous prefectures are divided into counties, autonomous counties, and cities. All autonomous regions, autonomous prefectures and autonomous counties are national autonomous areas.

**Article 31. The state may establish special administrative regions when necessary.** The systems to be instituted in special administrative regions shall be prescribed by law enacted by



**Article 49. Marriage, the family, and mother and child are protected by the state.** Both husband and wife have the duty to practise family planning. Parents have the duty to rear and educate their minor children, and children who have come of age have the duty to support and assist their parents. Violation of the freedom of marriage is prohibited. Maltreatment of old people, women and children is prohibited.

**Article 50. The People's Republic of China protects the legitimate rights and interests of Chinese nationals residing abroad** and protects the lawful rights and interests of returned overseas Chinese and of the family members of Chinese nationals residing abroad.

**Article 51. The exercise by citizens of the People's Republic of China of their freedoms and rights may not infringe upon the interests of the state,** of society and of the collective, or upon the lawful freedoms and rights of other citizens.

**Article 52. It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the sovereignty of the country** and the unity of all its nationalities.

**Article 53. Citizens of the People's Republic of China must abide by the constitution and the law,** keep state secrets, protect public property and observe labour discipline and public order and respect social ethics.

**Article 54. It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the security, honour and interests of the motherland;** they must not commit acts detrimental to the security, honour and interests of the motherland.

**Article 55. It is the sacred obligation of every citizen of the People's Republic of China to defend the motherland and resist aggression.** It is the honourable duty of citizens of the People's Republic of China to perform military service and join the militia in accordance with the law.

**Article 56. It is the duty of citizens of the People's Republic of China to pay taxes in accordance with the law.**



## CHAPTER III. THE STRUCTURE OF THE STATE

### SECTION 1. THE NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS

Article 57. The National People's Congress of the People's Republic of China is the highest organ of state power. Its permanent body is the Standing Committee of the National People's Congress.

Article 58. The National People's Congress and its Standing Committee exercise the legislative power of the state.

Article 59. The National People's Congress is composed of deputies elected by the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government, and by the armed forces. All the minority nationalities are entitled to appropriate representation. Election of deputies to the National People's Congress is conducted by the Standing Committee of the National People's Congress. The number of deputies to the National People's Congress and the manner of their election are prescribed by law.

Article 60. The National People's Congress is elected for a term of five years. Two months before the expiration of the term of office of a National People's Congress, its Standing Committee must ensure that the election of deputies to the succeeding National People's Congress is completed. Should exceptional circumstances prevent such an election, it may be postponed by decision of a majority vote of more than two-thirds of all those on the Standing Committee of the incumbent National People's Congress, and the term of office of the incumbent National People's Congress may be extended. The election of deputies to the succeeding National People's Congress must be completed within one year after the termination of such exceptional circumstances.

Article 61. The National People's Congress meets in session once a year and is convened by its Standing Committee. A session of the National People's Congress may be convened at any time the Standing Committee deems this necessary, or when more than one-third of the deputies to the National People's Congress so propose. When the National People's



- 2) To approve the establishment of provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government;
- 3) To decide on the establishment of special administrative regions and the systems to be instituted there;
- 4) To decide on questions of war and peace; and
- 5) To exercise such other functions and powers as the highest organ of state power should exercise.

**Article 63. The National People's Congress has the power to recall or remove from office the following persons:**

- 1) The President and the Vice-President of the People's Republic of China;
- 2) The Premier, Vice-Premiers, State Councillors, Ministers in charge of Ministries or Commissions and the Auditor-General and the Secretary-General of the State Council;
- 3) The Chairman of the Central Military Commission and others on the commission;
- 4) The President of the Supreme People's Court; and
- 5) The Procurator-General of the Supreme People's Procuratorate.

**Article 64. Amendments to the Constitution are to be proposed by the Standing Committee of the National People's Congress or by more than one-fifth of the deputies to the National People's Congress and adopted by a majority vote of more than two-thirds of all the deputies to the Congress. Statutes and resolutions are adopted by a majority vote of more than one half of all the deputies to the National People's Congress.**

**Article 65. The Standing Committee of the National People's Congress is composed of the following: The Chairman; The Vice-Chairmen; The Secretary-General; and Members. Minority nationalities are entitled to appropriate representation on the Standing Committee of the National People's Congress. The National People's Congress elects, and has**



power to recall, all those on its Standing Committee. No one on the Standing Committee of the National People's Congress shall hold any post in any of the administrative, judicial or procuratorial organs of the state.

**Article 66. The Standing Committee of the National People's Congress is elected for the same term as the National People's Congress;** it exercises its functions and powers until a new Standing Committee is elected by the succeeding National People's Congress. The Chairman and Vice-Chairmen of the Standing Committee shall serve no more than two consecutive terms.

**Article 67. The Standing Committee of the National People's Congress exercises the following functions and powers:**

- 1) To interpret the Constitution and supervise its enforcement;
- 2) To enact and amend statutes with the exception of those which should be enacted by the National People's Congress;
- 3) To enact, when the National People's Congress is not in session, partial supplements and amendments to statutes enacted by the National People's Congress provided that they do not contravene the basic principles of these statutes;
- 4) To interpret statutes;
- 5) To examine and approve, when the National People's Congress is not in session, partial adjustments to the plan for national economic and social development and to the state budget that prove necessary in the course of their implementation;
- 6) To supervise the work of the State Council, the Central Military Commission, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate;
- 7) To annul those administrative rules and regulations, decisions or orders of the State Council that contravene the Constitution or the statutes;
- 8) To annul those local regulations or decisions of the organs of state power of provinces,



treaty obligations concerning common defence against aggression;

19) To decide on general mobilization or partial mobilization;

20) To decide on the enforcement of martial law throughout the country or in particular provinces, autonomous regions or municipalities directly under the Central Government; and

21) To exercise such other functions and powers as the National People's Congress may assign to it.

**Article 68. The Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress presides over the work of the Standing Committee and convenes its meetings.** The Vice-Chairmen and the Secretary-General assist the Chairman in his work. Chairmanship meetings with the participation of the chairman, vice-chairmen and secretary-general handle the important day-to-day work of the Standing Committee of the National People's Congress.

**Article 69. The Standing Committee of the National People's Congress is responsible to the National People's Congress** and reports on its work to the Congress.

**Article 70. The National People's Congress establishes a Nationalities Committee, a Law Committee, a Finance and Economic Committee, an Education, Science, Culture and Public Health Committee, a Foreign Affairs Committee, an Overseas Chinese Committee and such other special committees as are necessary.** These special committees work under the direction of the Standing Committee of the National People's Congress when the Congress is not in session. The special committees examine, discuss and draw up relevant bills and draft resolutions under the direction of the National People's Congress and its Standing Committee.

**Article 71. The National People's Congress and its Standing Committee may, when they deem it necessary, appoint committees of inquiry into specific questions** and adopt relevant resolutions in the light of their reports. All organs of state, public organizations and citizens concerned are obliged to supply the necessary information to those committees of inquiry when they conduct investigations.



**Article 72.** Deputies to the National People's Congress and all those on its Standing Committee have the right, in accordance with procedures prescribed by law, to submit bills and proposals within the scope of the respective functions and powers of the National People's Congress and its Standing Committee.

**Article 73.** Deputies to the National People's Congress during its sessions, and all those on its Standing Committee during its meetings, have the right to address questions, in accordance with procedures prescribed by law, to the State Council or the ministries and commissions under the State Council, which must answer the questions in a responsible manner.

**Article 74.** No deputy to the National People's Congress may be arrested or placed on criminal trial without the consent of the Presidium of the current session of the National People's Congress or, when the National People's Congress is not in session, without the consent of its Standing Committee.

**Article 75.** Deputies to the National People's Congress may not be called to legal account for their speeches or votes at its meetings.

**Article 76.** Deputies to the National People's Congress must play an exemplary role in abiding by the Constitution and the law and keeping state secrets and, in production and other work and their public activities, assist in the enforcement of the Constitution and the law. Deputies to the National People's Congress should maintain close contact with the units and people which elected them, listen to and convey their opinions and demands and work hard to serve them.

**Article 77.** Deputies to the National People's Congress are subject to the supervision of the units which elected them. The electoral units have the power, through procedures prescribed by law, to recall the deputies whom they elected.

**Article 78.** The organization and working procedures of the National People's Congress and its Standing Committee are prescribed by law.



elect a new Vice-President to fill the vacancy. In the event that the offices of both the President and the Vice-President of the People's Republic of China fall vacant, the National People's Congress shall elect a new President and a new Vice-President. Prior to such election, the Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress shall temporarily act as the President of the People's Republic of China.

### **SECTION 3. THE STATE COUNCIL**

**Article 85. The State Council, that is, the Central People's Government of the People's Republic of China, is the executive body of the highest organ of state power; it is the highest organ of state administration.**

**Article 86. The State Council is composed of the following:** The Premier; The Vice-Premiers; The State Councillors; The Ministers in charge of Ministries; The Ministers in charge of Commissions; The Auditor-General; and The Secretary-General. The Premier has overall responsibility for the State Council. The Ministers have overall responsibility for the respective ministries or commissions under their charge. The organization of the State Council is described by law.

**Article 87. The term of office of the State Council is the same as that of the National People's Congress. The Premier, Vice-Premiers and State Councillors shall serve no more than two consecutive terms.**

**Article 88. The Premier directs the work of the State Council.** The Vice-Premiers and State Councillors assist the Premier in his work. Executive meetings of the State Council are composed of the Premier, the Vice-Premiers, the State Councillors and the Secretary-General of the State Council. The Premier convenes and presides over the executive meetings and plenary meetings of the State Council.

**Article 89. The State Council exercises the following functions and powers:** (1) To adopt administrative measures, enact administrative rules and regulations and issue decisions and orders in accordance with the Constitution and the statutes; (2) To submit proposals to the National People's Congress or its Standing Committee; (3) To lay down the tasks and responsibilities of the ministries and commissions of the State Council, to exercise unified



leadership over the work of the ministries and commissions and to direct all other administrative work of a national character that does not fall within the jurisdiction of the ministries and commissions; (4) To exercise unified leadership over the work of local organs of state administration at different levels throughout the country, and to lay down the detailed division of functions and powers between the Central Government and the organs of state administration of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government; (5) To draw up and implement the plan for national economic and social development and the state budget; (6) To direct and administer economic work and urban and rural development; (7) To direct and administer the work concerning education, science, culture, public health, physical culture and family planning; (8) To direct and administer the work concerning civil affairs, public security, judicial administration, supervision and other related matters; (9) To conduct foreign affairs and conclude treaties and agreements with foreign states; (10) To direct and administer the building of national defence; (11) To direct and administer affairs concerning the nationalities and to safeguard the equal rights of minority nationalities and the right of autonomy of the national autonomous areas; (12) To protect the legitimate rights and interests of Chinese nationals residing abroad and protect the lawful rights and interests of returned overseas Chinese and of the family members of Chinese nationals residing abroad; (13) To alter or annul inappropriate orders, directives and regulations issued by the ministries or commissions; (14) To alter or annul inappropriate decisions and orders issued by local organs of state administration at different levels; (15) To approve the geographic division of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government, and to approve the establishment and geographic division of autonomous prefectures, counties, autonomous counties and cities; (16) To decide on the enforcement of martial law in parts of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government; (17) To examine and decide on the size of administrative organs and, in accordance with the law, to appoint, remove and train administrative officers, appraise their work and reward or punish them; and (18) To exercise such other functions and powers as the National People's Congress or its Standing Committee may assign it.

**Article 90. The ministers in charge of ministries or commissions of the State Council are responsible for the work of their respective departments and convene and preside over their ministerial meetings or commission meetings that discuss and decide on major issues**



**Article 95.** People's congresses and people's governments are established in provinces, municipalities directly under the Central Government, counties, cities, municipal districts, townships, nationality townships and towns. The organization of local people's congresses and local people's governments at different levels is prescribed by law. Organs of self-government are established in autonomous regions, autonomous prefectures and autonomous counties. The organization and working procedures of organs of self-government are prescribed by law in accordance with the basic principles laid down in Sections V and VI of Chapter Three of the Constitution.

**Article 96.** Local people's congresses at different levels are local organs of state power. Local people's congresses at and above the county level establish standing committees.

**Article 97.** Deputies to the people's congresses of provinces, municipalities directly under the Central Government, and cities divided into districts are elected by the people's congresses at the next lower level; deputies to the people's congresses of counties, cities not divided into districts, municipal districts, townships, nationality townships and towns are elected directly by their constituencies. The number of deputies to local people's congresses at different levels and the manner of their election are prescribed by law.

**Article 98.** The term of office of the people's congresses of provinces, municipalities directly under the Central Government and cities divided into districts is five years. The term of office of the people's congresses of counties, cities not divided into districts, municipal districts, townships, nationality townships and towns is three years.

**Article 99.** Local people's congresses at different levels ensure the observance and implementation of the Constitution, the statutes and the administrative rules and regulations in their respective administrative areas. Within the limits of their authority as prescribed by law, they adopt and issue resolutions and examine and decide on plans for local economic and cultural development and for development of public services. Local people's congresses at and above the county level examine and approve the plans for economic and social development and the budgets of their respective administrative areas, and examine and approve reports on their implementation. They have the power to alter or annul inappropriate decisions of their own standing committees. The people's congresses of nationality townships



within the limits of their authority as prescribed by law, take specific measures suited to the peculiarities of the nationalities concerned.

**Article 100.** The people's congresses of provinces and municipalities directly under the Central Government, and their standing committees, may adopt local regulations, which must not contravene the Constitution, the statutes and the administrative rules and regulations, and shall report such local regulations to the Standing Committee of the National People's Congress for the record.

**Article 101.** At their respective levels, local people's congresses elect, and have the power to recall, governors and deputy governors, or mayors and deputy mayors, or presidents and deputy heads of counties, districts, townships and towns. Local people's congresses at and above the county level elect, and have the power to recall, presidents of people's courts and chief procurators of people's procuratorates at the corresponding level. The election or recall of chief procurators of people's procuratorates shall be reported to the chief procurators of the people's procuratorates at the next higher level for submission to the standing committees of the people's congresses at the corresponding level for approval.

**Article 102.** Deputies to the people's congresses of provinces, municipalities directly under the Central Government and cities divided into districts are subject to supervision by the units which elected them; deputies to the people's congresses of cities, cities not divided into districts, municipal districts, townships, nationality townships and towns are subject to supervision by their constituencies. The electoral units and constituencies which elect deputies to local people's congresses at different levels have the power, according to procedures prescribed by law, to recall deputies whom they elected.

**Article 103.** The standing committee of a local people's congress at and above the county level is composed of a chairman, vice-chairmen and members and is responsible, and reports on its work, to the people's congress at the corresponding level. The people's congress at and above the county level elects, and has the power to recall, members on the standing committee of the people's congress at the corresponding level. The standing committee of a local people's congress at and above the county level shall hold



by post in state administrative, judicial and procuratorial organs.

**Article 104.** The standing committee of a local people's congress at and above the county level discusses and decides on major issues in all fields of work in its administrative area; supervises the work of the people's government, people's court and people's procuratorate at the corresponding level; annuls inappropriate decisions and orders of the people's government at the corresponding level; annuls inappropriate resolutions of the people's congress at the next lower level; decides on the appointment and removal of functionaries of state organs within its jurisdiction as prescribed by law; and, when the people's congress at the corresponding level is not in session, recalls individual deputies to the people's congress at the next higher level and elects individual deputies to fill vacancies in that people's congress.

**Article 105.** Local people's governments at different levels are the executive bodies of local organs of state power as well as the local organs of state administration at the corresponding level. Local people's governments at different levels practise the system of overall responsibility by governors, mayors, county heads, district heads, township heads and town heads.

**Article 106.** The term of office of local people's governments at different levels is the same as that of the people's congresses at the corresponding level.

**Article 107.** Local people's governments at and above the county level, within the limits of their authority as prescribed by law, conduct the administrative work concerning the economy, education, science, culture, public health, physical culture, urban and rural development, finance, civil affairs, public security, nationalities affairs, judicial administration, supervision and family planning in their respective administrative areas; issue decisions and orders; appoint, remove and train administrative functionaries, appraise their work and reward or punish them. People's governments of townships, nationality townships and towns carry out the resolutions of the people's congress at the corresponding level as well as the decisions and orders of the state administrative organs at the next higher level and conduct administrative work in their respective administrative areas. People's governments of provinces and municipalities directly under the Central Government



## **SECTION 6. THE ORGANS OF SELF-GOVERNMENT OF NATIONAL AUTONOMOUS AREAS**

**Article 112.** The organs of self-government of national autonomous areas are the people's congresses and people's governments of autonomous regions, autonomous prefectures and autonomous counties.

**Article 113.** In the people's congress of an autonomous region, prefecture or county, in addition to the deputies of the nationality or nationalities exercising regional autonomy in the administrative area, the other nationalities inhabiting the area are also entitled to appropriate representation. The chairmanship and vice-chairmanships of the standing committee of the people's congress of an autonomous region, prefecture or county shall include a citizen or citizens of the nationality or nationalities exercising regional autonomy in the area concerned.

**Article 114.** The administrative head of an autonomous region, prefecture or county shall be a citizen of the nationality, or of one of the nationalities, exercising regional autonomy in the area concerned.

**Article 115.** The organs of self-government of autonomous regions, prefectures and counties exercise the functions and powers of local organs of state as specified in Section V of Chapter Three of the Constitution. At the same time, they exercise the right of autonomy within the limits of their authority as prescribed by the Constitution, the law of regional national autonomy and other laws, and implement the laws and policies of the state in the light of the existing local situation.

**Article 116.** People's congresses of national autonomous areas have the power to enact autonomy regulations and specific regulations in the light of the political, economic and cultural characteristics of the nationality or nationalities in the areas concerned. The autonomy regulations and specific regulations of autonomous regions shall be submitted to the Standing Committee of the National People's Congress for approval before they go into effect. Those of autonomous prefectures and counties shall be submitted to the standing committees of the people's congresses of provinces or autonomous regions for approval before



they go into effect, and they shall be reported to the Standing Committee of the National People's Congress for the record.

**Article 117.** The organs of self-government of the national autonomous areas have the power of autonomy in administering the finances of their areas. All revenues accruing to the national autonomous areas under the financial system of the state shall be managed and used independently by the organs of self-government of those areas.

**Article 118.** The organs of self-government of the national autonomous areas independently arrange for and administer local economic development under the guidance of state plans. In developing natural resources and building enterprises in the national autonomous areas, the state shall give due consideration to the interests of those areas.

**Article 119.** The organs of self-government of the national autonomous areas independently administer educational, scientific, cultural, public health and physical culture affairs in their respective areas, sort out and protect the cultural legacy of the nationalities and work for the development and prosperity of their cultures.

**Article 120.** The organs of self-government of the national autonomous areas may, in accordance with the military system of the state and concrete local needs and with the approval of the State Council, organize local public security forces for the maintenance of public order.

**Article 121.** In performing their functions, the organs of self-government of the national autonomous areas, in accordance with the autonomy regulations of the respective areas, employ the spoken and written language or languages in common use in the locality.

**Article 122.** The state gives financial, material and technical assistance to the minority nationalities to accelerate their economic and cultural development. The state helps the national autonomous areas train large numbers of cadres at different levels and specialized personnel and skilled workers of different professions and trades from among the nationality or



organs for legal supervision.

**Article 130.** The People's Republic of China establishes the Supreme People's Procuratorate and the local people's procuratorates at different levels, military procuratorates and other special people's procuratorates. The term of office of the Procurator-General of the Supreme People's Procuratorate is the same as that of the National People's Congress; he shall serve no more than two consecutive terms. The organization of people's procuratorates is prescribed by law.

**Article 131.** People's procuratorates shall, in accordance with the law, exercise procuratorial power independently and are not subject to interference by administrative organs, public organizations or individuals.

**Article 132.** The Supreme People's Procuratorate is the highest procuratorial organ. The Supreme People's Procuratorate directs the work of the local people's procuratorates at different levels and of the special people's procuratorates; people's procuratorates at higher levels direct the work of those at lower levels.

**Article 133.** The Supreme People's Procuratorate is responsible to the National People's Congress and its Standing Committee. Local people's procuratorates at different levels are responsible to the organs of state power at the corresponding levels which created them and to the people's procuratorates at the higher level.

**Article 134.** Citizens of all nationalities have the right to use the spoken and written languages of their own nationalities in court proceedings. The people's courts and people's procuratorates should provide translation for any party to the court proceedings who is not familiar with the spoken or written languages in common use in the locality. In an area where people of a minority nationality live in a compact community or where a number of nationalities live together, hearings should be conducted in the language or languages in common use in the locality; indictments, judgments, verdicts and other documents should be written, according to actual needs, in the language or languages in common use in the locality.

**Article 135.** The people's courts, people's procuratorates and public security organs shall, in handling criminal cases, divide their functions, each taking responsibility for its own



Lampiran : 4. Amandemen Konstitusi Republik Rakyat Cina 1988

**AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA**

**(Adopted at the First Session of the Seventh National People's Congress  
on April 12, 1988)**

1. Article 11 of the Constitution shall include a new paragraph, which reads:  
"The state permits the private sector of the economy to exist and develop within the limits prescribed by law. The private sector of the economy is a complement to the socialist public economy. The state protects the lawful rights and interests of the private sector of the economy, and exercises guidance, supervision and control over the private sector of the economy."
2. The fourth paragraph of Article 10 of the Constitution, which provides that "no organization or individual may appropriate, buy, sell or lease land, or unlawfully transfer land in other ways," shall be amended as: "No organization or individual may appropriate, buy, sell or unlawfully transfer land in other ways. The right to the use of the land may be transferred in accordance with the law."



Lampiran : 5. Amandemen Konstitusi Republik Rakyat Cina 1993

**AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA**

**(Adopted at the First Session of the Seventh National People's Congress  
on March 29, 1993)**

**Article 3**

The final two sentences of the seventh paragraph of the Preamble to the Constitution, ("The basic task of the nation in the years to come is to concentrate its efforts on socialist modernization. Under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people's democratic dictatorship and the socialist road, steadily improve socialist institutions, develop socialist democracy, improve the socialist legal system, and work hard and self-reliantly to improve the socialist legal system, and work hard and self-reliantly to modernize the country's industry, agriculture, national defense and science and technology step by step to turn China into a socialist country with a high level of culture and democracy.), are amended to "Our country is in the primary stage of socialism. The basic task before the nation is the concentration of efforts of socialist modernization construction in accordance with the theory of building socialism with Chinese characteristics. Under the leadership of the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought, the Chinese people of all nationalities will continue to adhere to the people's democratic dictatorship and the socialist road and to uphold reform and opening to the outside world, steadily improve socialist institutions, develop socialist democracy, improve the socialist legal system, and work hard and self-reliantly to modernize the country's industry, agriculture, national defense and science and technology step by step to build China into a strong, prosperous culturally advanced, democratic socialist nation."



#### Article 4

The following sentence is added to the end of the tenth paragraph of the Preamble to the Constitution: "Multi-party cooperation and the political consultation system under the leadership of the Communist Party of China shall continue and develop for the extended future."

#### Article 5

Article 7 of the Constitution, ("The state economy is the sector of socialist economy under ownership by the whole people; it is the leading force in the national economy. The state ensures the consolidation and growth of the state economy."), is amended to "The state-owned economy, i.e. the socialist economy with ownership by the people as a whole, is the leading force in the national economy. The state will ensure the consolidation and development to the state-owned economy."

#### Article 6

The first paragraph of Article 8 of the Constitution, ("Rural people's communes, agricultural producers' cooperatives and other forms of cooperative economy, such as producers', supply and marketing, credit and consumers' cooperatives, belong to the sector of the socialist economy under collective ownership by the working people. Working people who are members of rural economic collectives have the right, within the limits prescribed by law, to farm plots of cropland and hilly land allotted for their use, engage in household sideline production and raise privately owned livestock."), is amended to "The rural contracted responsibility system based mainly on the household linking remuneration to output and cooperative economic forms – producers', supply and marketing, credit and consumers' cooperatives – are part of the socialist economy collectively owned by the working people. Working people who are all members of rural economic collectives have the right, within the limits prescribed by law, to farm plots of cropland and hilly land allotted for their private use, engage in household sideline production and raise privately owned livestock."



#### Article 7

Article 15 of the Constitution, ("The state practices planned economy on the basis of socialist public ownership. It ensures the proportionate and coordinated growth of the national economy through overall balancing by economic planning and the supplementary role of regulation by the market.

Disturbance of socioeconomic order or disruption of the state economic plan by an organization or individual is prohibited."), is amended to "The state practices socialist market economy." "The shall enhance economic legislation and improve macro-control of the economy." "The state shall, in accordance with the law, prohibit disturbance of the socioeconomic order by any organization or individual."

#### Article 8

Article 16 of the Constitution, ("State enterprises have decision-making power with regard to operation and management within the limits prescribed by law, on condition that they submit to unified leadership by the state and fulfill their obligations under the state plan. State enterprises practice democratic management through congresses of workers and staff and in other ways in accordance with the law."), is amended to "State-owned enterprises have decision-making power with regard to operations within the limits prescribed by law. State-owned enterprises practice democratic management through congresses of workers and staff and in other ways in accordance with the law."

#### Article 9

Article 17 of the Constitution, ("Collective economic organizations have decision-making power in conducting independent economic activities, on condition that they accept the guidance of the state plan and abide by the relevant laws. Collective economic organizations practice democratic management in accordance with the law. The entire body of their workers elects or removes their managerial personnel and decides on major issues concerning operation and management."), is amended to "Collective economic organizations have decision-making power in conduction independent



**Lampiran 6: Komunike Press Penandatanganan Persetujuan Bilateral antara Pemerintah Republik Rakyat Cina dengan Pemerintah Amerika Serikat Berkenaan dengan Penerimaan Cina dalam Keanggotaan WTO**

**PRESS COMMUNIQUE ON THE SIGNING OF THE BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON CHINA'S ACCESSION TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION**

**15 NOVEMBER, 1999**

From 10th to 15th November 1999, the Chinese Government Delegation headed by Mr. Shi Guangsheng, Minister of Foreign Trade and Economic Cooperation of the People's Republic of China, and the United States' Government Delegation headed by Ambassador Charlene Barshefsky, U.S. Trade Representative and Mr. Gene Sperling, Director of the National Economic Council of the United States of America, held negotiations in Beijing on the issue of China's accession to the World Trade Organization. The two sides signed on November 15th the Bilateral Agreement Between the Government of the People's Republic of China and the Government of the United States of America on China's Accession to the World Trade Organization.

The two delegations have noted that both the Chinese and U.S. governments and their leaders, Presidents Jiang Zemin and Bill Clinton, have attached great importance to the talks, not only for its commercial importance, but also for its importance to the global economy and long term strategic significance. We believe this agreement benefits both China and the United States.

The signing of the aforementioned agreement by China and the United States will help accelerate the process of China's accession to WTO and the development of China-US economic cooperation and trade relations. The two sides are looking forward to close cooperation in the WTO in the future so as to help ensure the sound development of China-US relations and the prosperity of the world economy.

Sumber: [www.chinaembassy-indonesia.com](http://www.chinaembassy-indonesia.com)





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121  
E-mail : lemlit unej @ jember. telkom.net.id

Nomor : 236/J 25.3.1/PL.5/2001

06 Maret 2001

Perihal : *Permohonan ijin melaksanakan penelitian*

Kepada : *Yth. Sdr. Pimpinan*

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 700/J25.1.2/PL.5/2001 Tanggal 26 Pebruari 2001, perihal ijin penelitian mahasiswa :

**Nama/NIM** : LUKMAN HAKIM / 96-1092  
**Fakultas/jurusan** : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Hub. Internasional  
**Alamat** : Jl. Bangka III/19 Jember.  
**Judul Penelitian** : Pengaruh Sistem Ekonomi Internasional Terhadap Perubahan Struktur Politik Domestik Republik Rakyat Cina.  
**Lokasi** : Jakarta  
**Lama Penelitian** : 6 (enam) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



etua,

Dr. Ir. T. Sutikto, MSc.  
NIP. 131 131 022

Disusun Kepada Yth. :

dr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
Mahasiswa ybs.  
Resip





Depok 19 April 2001

Surat keterangan

Dengan ini kami menugaskan bahwa mahasiswa

Nama /Nim : Lubman Habius /96-1092

Fakultas/jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /  
Hubungan Internasional  
Universitas Jember

telah melaksanakan penelitian studi literatur  
di UPT Perpustakaan U1.

Atas Bujarama Saudara di samping ini kami kasih.

Koordinator Peliputan

Pengguna

UPT Perpustakaan U1



*[Handwritten signature]*

Retro Prabandari, U1





**CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES**

**SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : LUKMAN HAKIM

Status : MAHASISWA FISIP / Hub.Int./UNEJ

Alamat : jl. Bangsa III/19 JEMBER

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan  
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)  
dalam bidang: Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap  
Kebijaksanaan Desentralisasi  
di Republik Rakyat Cina.

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 14 April 2001



Soedarso  
Kepala Perpustakaan

